

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENODAAN AGAMA
KASUS AHOK DI JAKARTA PADA MEDIA ISLAM ONLINE
REPUBLIKA.CO.ID DAN *NU.OR.ID***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh :

FITRI

NIM: 1500048003

**PROGRAM MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Fitri**
NIM : 1500048003
Judul Penelitian : **Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama
Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online
Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id**
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ KPI

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENODAAN AGAMA
KASUS AHOK DI JAKARTA PADA MEDIA ISLAM ONLINE
REPUBLIKA.CO.ID DAN NU.OR.ID**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Fitri

NIM: 1500048003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Fitri

NIM : 1500048003

Judul Penelitian : **Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama
Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online
Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada
tanggal 31 Juli 2018 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar
Magister dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

29/8/18

Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A.
Sekretaris Sidang/Penguji

23-8-2018

Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A.
Penguji 1

13-8-18

Dr. H. Abdul Choliq, MT., M.Ag
Penguji 2

8-8-2018

NOTA DINAS

Semarang, 20 Juli 2018

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh

Nama : **Fitri**
NIM : 1500048003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : **Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama**

Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister KPI untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A
NIP: 196310171991032001

NOTA DINAS

Semarang, 20 Juli 2018

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh

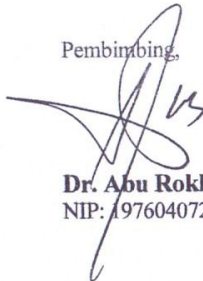
Nama : **Fitri**
NIM : 1500048003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : **Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama**

Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister KPI untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Abu Rokhmad, M.Ag
NIP: 197604072001121003

PERSEMBAHAN

*Teruntuk,
Keluarga Tercinta
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam*

*Pegiat pena
Dan Almamater tercinta,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al Hujurat ayat 6)

ABSTRAK

Judul : Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online *Republika.co.id* dan *Nu.or.id*

Penulis : Fitri

NIM : 1500048003

Laporan peristiwa yang tersaji pada media merupakan hasil konstruksi realitas atas suatu kejadian. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Framing pemberitaan oleh media Islam online terhadap kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok di Jakarta menarik untuk dikaji. Praktik pengemasan berita yang sarat akan wacana, mensinyalir media mengkonstruksi pesan bahwa isu-isu ada pada agenda publik. Selain media online digemari oleh masyarakat, wacana yang telah terbentuk dalam media mempunyai dampak yang sangat penting dalam proses berkembangnya ideologi yang ada pada masyarakat. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana konstruksi pesan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada media online *Republika.co.id* dan *Nu.or.id* ? (2) Bagaimana kecenderungan media *Republika.co.id* dan *Nu.or.id* terhadap isu yang diwacanakan pada pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi berita *Republika.co.id* dan *NU.or.id* dibagi dalam tiga perspektif yaitu perspektif pemerintah dan ulama, perspektif hukum dan politik, serta perspektif sosial keagamaan. *Republika* menyoroti kasus Ahok merupakan kasus penodaan agama dan harus dihukum dengan adil. Kaum yang menyuarakan dengan tegas direpresentasikan oleh ormas yang berideologi fundamentalis. Sedangkan *NU.or.id* mewacanakan kasus Ahok menyinggung perasaan umat Islam, hal ini diwakili oleh narasumber yang ditonjolkan dalam menyuarakan perdamaian, tidak memihak, serta diserahkan kepada hukum. Hal ini menunjukkan pandangannya bersikap moderat. (2) Kecenderungan pemberitaan pada *Republika.co.id* dan *Nu.or.id* dapat dilihat dari framing berita. Kedua media ada perbedaan dari sisi penekanan atau

ideologi yang ditonjolkan. Republika.co.id menekankan aspek hukum dan agama dalam beritanya. *Pertama*, aspek agama, pernyataan kontroversi Ahok yang menyinggung Al Maidah 51 dinilai telah menodai Al Quran (kitab suci agama Islam) yang menjadi panutan umat muslim. *Kedua*, aspek hukum, penekanan kasus Ahok dibawa ke ranah peradilan dan harus dihukum. Sedangkan NU.or.id dalam pemberitaan kasus Ahok di Jakarta cenderung menekankan pada tiga aspek yaitu hukum, agama, dan politik. *Pertama* aspek hukum, wacana cenderung mengangkat isu hukum sebagai penyelesaian problem. *Kedua*, aspek agama, wacana dikaitkan pada persoalan pernyataan Ahok yang menyinggung Al Quran dan umat Islam. *Ketiga*, aspek politik, wacana yang dibentuk dari pernyataan Kapolri sebagai pihak otoritas yang mengungkapkan adanya agenda politik yang menyusupi kasus Ahok.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H

13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َ = a كَتَبَ kataba

....ِ = i سئِلَ su'ila

....ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

...ِآ = ā قَال qāla

...ِإِ = ī قِيلَ qīla

...ُأُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

...ِأَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

...ُأَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sosok suri tauladan sepanjang zaman yang menuntun umatnya di jalan terang, hingga menjadi pribadi yang beriman dan berilmu seperti saat ini.

Adapun tesis dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama Kasus Ahok di Jakarta pada Republika.co.id dan NU.or.id” merupakan tugas akhir untuk syarat menyelesaikan pendidikan program Magister pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, MA, Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, Ketua Jurusan program Magister KPI yang dedikasinya patut diteladani.

4. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, M.A, Sekretaris Jurusan program Magister KPI yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A, Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan, baik dari segi keilmuan maupun substansi.
6. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag, Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan, baik dari segi keilmuan maupun tulisan.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan berbagi ilmu kepada penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan persoalan akademis dan administrasi.
8. Orangtuaku tercinta, Ibu Nanik Hartati dan Bapak Abdurrohman, terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, doa dan dukungan yang selalu dicurahkan kepada penulis.
9. Kakak dan adikku tersayang, terimakasih atas perhatian dan dukungannya.
10. Teman seperjuangan, partner belajar, keluarga besar KPI/ Magister 2015.
11. Teman-teman NR-B Pascasarjana.
12. Segenap keluarga besar LPM FDK, serta rekan-rekan jurnalis yang berkenan *sharing* informasi.
13. Segenap keluarga besar *English Club* Walisongo.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis menerima kritik, saran, dan masukan demi kebaikan penelitian ini. Akhirnya teriring salam dan doa, penulis berharap semoga karya tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juli 2018

Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Definisi Konseptual	17
3. Sumber Data Penelitian	18
4. Fokus Penelitian.....	19
5. Pengumpulan Data Penelitian.....	19

6. Teknik Analisis Data	25
F. Sistematika Pembahasan	28

BAB II : FRAMING PEMBERITAAN AGAMA DI MEDIA ISLAM ONLINE

A. Media Islam Online	30
1. Media Online.....	30
2. Media Islam Online	39
B. Jurnalistik Online	41
C. Framing dan Konstruksi dalam Pemberitaan.....	46
1. Berita.....	46
2. Pandangan Konstruksionis dalam Pemberitaan	56
3. Wacana dan Ideologi Media Islam	62
4. Framing.....	69
D. Penodaan Agama	76

BAB III : KONSTRUKSI PEMBERITAAN PENODAAN AGAMA KASUS AHOK DI JAKARTA PADA MEDIA ISLAM ONLINE

A. Profil Media Online	83
B. Konstruksi Berita Penodaan Agama di Republika.co.id	84
C. Konstruksi Berita Penodaan Agama di Nu.or.id	121
D. Perbandingan Konstruksi Berita Republika.co.id	

dan NU.or.id	162
--------------------	-----

BAB IV :KECENDERUNGAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN PENODAAN AGAMA KASUS AHOK DI JAKARTA

A. Analisis Framing Republika.co.id dan NU.or.id	184
B. Analisis Kecenderungan Republika.co.id dan NU.or.id pada Pemberitaan Penodaan Agama Kasus Ahok.....	247

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	260
B. Saran	262
C. Penutup	263

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pers memiliki peranan penting dan kekuasaan dalam pemberitaan. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, mempunyai peran dan tanggungjawab yaitu menyebarkan informasi, edukasi, entertain dan kontrol sosial. Sirikit Syah dalam bukunya *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*, (2012) mengungkapkan Noam Chomsky menyoroti media berkaitan bagaimana makna dibelokkan dari realita sebenarnya¹, media melalui bahasa yang digunakan dapat menyesatkan pengetahuan atau opini publik.² Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pembaca, sehingga pembaca percaya dengan pemberitaan media.

Media memang dituntut untuk membuat berita yang nyata, yaitu fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Namun, ada kepentingan-kepentingan lain yang pada akhirnya membuat wacana berita berbeda dengan realitas sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari siapa narasumber yang dipilih, isu-isu apa yang dominan dari

¹Contoh jelas dari teori ini adalah kasus Ahmadinejad vs CNN, dalam jumpa pers Iran menyebutkan bahwa akan membangun reaktor nuklir sebagai rekayasa teknologi demi rakyat Iran, namun wartawan CNN menerjemahkan teknologi nuklir menjadi senjata nuklir. Hal ini berakhir dengan *banning* terhadap CNN di Iran dan CNN meminta maaf atas kejadian tersebut.

²Sirikit Syah, *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 228.

peristiwa, atau pun posisi berita dalam suatu media.³ Media umumnya melakukan strategi pengemasan pesan dalam rangka pembentukan opini publik. Jurnalis tentu harus memiliki keterampilan membuat dan mengemas berita yang menarik.

Media bukanlah saluran bebas. Media bukanlah seperti apa yang digambarkan publik yang memberitakan apa adanya. Media justru mengkonstruksi realitas. Peristiwa yang sama bisa dikonstruksi secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada yang dianggap penting, ada yang tidak menganggap sebagai berita.⁴ Perbedaan tersebut memberikan pemahaman bahwa berita yang dimuat oleh media telah melalui proses konstruksi.

Laporan tentang kegiatan atau peristiwa merupakan hasil konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.⁵ Pembuatan frame berita didasarkan atas kepentingan bisa internal maupun eksternal media, baik teknis, ekonomis, politis ataupun ideologis. Pembuatan sebuah wacana dalam frame berita tidak hanya mengindikasikan adanya

³Ayu Nur Irwinesia Putri,” Analisis Framing Berita Demonstrasi Mahasiswa Semarang Terkait Kenaikan Harga BBM pada TV Borobudur”, *Jurnal The Messenger*, Volume IV, No.1, Juli (2012): 19-20.

⁴Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2002), 2.

⁵ Ibnu hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam media Massa*, 11

kepentingan-kepentingan itu, tetapi juga dapat mengarahkan hendak dibawa ke mana isu yang akan diangkat dalam wacana tersebut.⁶

Peristiwa terkait isu agama selalu menarik perhatian media massa sebagai materi liputan. Persoalan agama pada dasarnya merupakan persoalan seluruh umat manusia. Bagi masyarakat Indonesia yang mendasarkan kehidupannya pada Pancasila, dan secara konstitusional juga dinyatakan harus beragama yaitu pasal 29 UUD 1945,⁷ maka agama merupakan satu di antara aspek-aspek *human interest* dalam pemberitaan. Artinya, berita tentang agama akan selalu menarik perhatian pembaca, sebab hal tersebut akan memberitakan tentang kehidupan para pembacanya. Apa yang dimaksud dengan agama dalam konteks ini, agama dalam pengertian luas, menyangkut seluruh aspek kehidupan beragama dengan segala kompleksitas yang menyertainya. Karena itu berita-berita agama lebih banyak mengungkap fenomena umat beragama.⁸

Indonesia sebagai negara yang multikultural terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama telah hidup rukun dan damai berdasarkan Pancasila serta berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberikan hak kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama dan menjalankan sesuai dengan

⁶ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, 22.

⁷ Isi pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktik*,

kepercayaan masing-masing. Negara juga turut bertanggung jawab dalam meningkatkan ketakwaan dan menuntun warganya untuk berakhlak mulia, namun disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang menyimpang. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bertentangan dengan keyakinan mayoritas.⁹ Hal itu menimbulkan problem penodaan agama di masyarakat.

Hasil riset kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Setara Institute¹⁰ menyatakan sepanjang tahun 1965-2017 terdapat 97 kasus. Sebelum era reformasi ada 9 kasus penodaan agama, dan jumlahnya bertambah menjadi 88 kasus setelah reformasi. Penyelesaian kasus penodaan agama dari 97 kasus tersebut, 76 kasus diselesaikan melalui jalur persidangan dan 21 kasus di luar persidangan atau non-yuridis. Sementara, dilihat ada tidaknya tekanan massa dari 97 kasus, ada 35 kasus tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 kasus melibatkan tekanan massa. Kasus

⁹ Yayan Sopyan, “Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah Atas Putusan MK No. 140/Puu-vii/2009”, *Jurnal Cita Hukum* Vol.3 No.2 Desember (2015): 199, diakses pada 7 Agustus 2017, doi: 10.15408/jch.v2i2.2314.

¹⁰ Organisasi di Indonesia yang didedikasikan untuk ide bahwa setiap orang harus diperlakukan sama sementara menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan menjunjung tinggi martabat manusia. Lembaga ini didirikan oleh orang-orang yang ingin menghapuskan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial lainnya, serta meningkatkan solidaritas dengan lemah dan korban.

penodaan agama terkait dengan Islam yaitu 88 kasus. Sedangkan Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.¹¹

Kasus penodaan agama di Indonesia meningkat, karena bersinggungan dengan kepentingan politik. Setiap kasus penodaan agama yang terjadi melibatkan tekanan massa dari kelompok tertentu.¹² Kasus penodaan agama di Jakarta pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama (Ahok), seorang etnis Cina beragama Kristen menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini memicu adanya demonstrasi besar pada 4 November dan 2 Desember 2016. Demonstrasi ini dikenal dengan Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212. Demonstrasi melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pemuda, organisasi keagamaan, bahkan Ikatan Pemuda Tionghoa. Demonstrasi ini bertujuan menjaga kedamaian dan keharmonisan Indonesia, serta menyeru tuntutan hukum kepada Ahok karena diduga melakukan penghinaan Al Quran.¹³

Peristiwa ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51 yang menjadi polemik

¹¹Fathiyah Wardah, "Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia", diakses 2 Juli 2017, <http://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>.

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/17/12272071/pasca-reformasi.kasus.penistaan.agama.meningkat.karena.politisasi>

¹³<https://www.eramuslim.com>, Ikut Aksi Bela Islam, Pemuda Tionghoa: Ahok Harus Dihukum, edisi 4 November 2016, diakses 12/12/2016.

yaitu, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Al-Maidah 51.”¹⁴

Video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu, pada Kamis 6 Oktober 2016 viral di media sosial lewat jejaring facebook milik Buni Yani. Video itu lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam.¹⁵ Ahok dituduh melakukan penodaan agama dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016.¹⁶ Ahok menyinggung ayat Al Quran terkait pemilihan kepala daerah yang menyudutkan dirinya oleh lawan politik, pidatonya menyebut dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51. Selain itu, Ahok mencalonkan diri pada pemilihan gubernur 2017. Kasus ini mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Sebelumnya, MUI DKI Jakarta telah mengeluarkan teguran untuk tidak membuat pernyataan kebencian yang meresahkan umat Islam di Ibu Kota. Menurut Ketua MUI teguran itu belum cukup, karena kasus Ahok sudah menjadi isu nasional.¹⁷

Kasus Ahok yang bernuansa etno-religi, politik serta memuat unsur konflik menjadi perhatian tidak hanya nasional bahkan

¹⁴Kutipan pidato Ahok dalam Putusan No. 1537/Pid.B/ 2016/ PN.Jkt Utr, halaman 6

¹⁵<https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>, diakses 6/11/2016.

¹⁶<http://www.tempo.co>, *Soal Al Maidah 51, Ahok: Tak mungkin saya Menista Al Quran*, edisi 24 Oktober 2016, diakses 12/12/2016.

¹⁷<https://kumparan.com/pranama-dewati/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-lebih-tinggi-dari-fatwa>.

internasional mengenai kasus penodaan agama di Jakarta. Media Islam nasional turut meliput, karena kasus penodaan agama tersebut menyinggung kitab Suci umat Islam. Media seperti *Republika.co.id* dan *Nu.or.id* memuat kasus penodaan agama di Jakarta. *Republika* merupakan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia, *Republika.co.id* merupakan media online *Republika*. Sedangkan *Nu.or.id* merupakan website terbaik dan terpercaya yang menjadi rujukan, NU Online merupakan situs resmi organisasi *Islam* terbesar di Indonesia yang menyajikan berita dan beragam artikel.¹⁸

Pemberitaan di era informasi berkembang pesat, khususnya di media online. Tipe baru jurnalisme, karena fitur-fiturnya mengemuka dalam teknologi, dalam praktik jurnalistiknya tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.¹⁹ Adanya internet membawa pengaruh besar dalam cara manusia berkomunikasi, khususnya dalam mengakses informasi.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk

¹⁸<http://www.muslimedianews.com/2015/02/top-20-website-islam-rujukan-terbaik.html#ixzz5LPKmrQJj>

¹⁹ Annisa Aninditya Wibawa, dkk, "Etika dan Prinsip Jurnalisme Media Siber Detik.com Mengenai Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir", *Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran Vol.1, No.1* (2012): 4

Indonesia sendiri sebanyak 256, 2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51, 8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun 2014. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. Data survei juga mengungkapkan bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angka total pengguna internet berada di pulau Jawa. Sisanya 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi, 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB, 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.²⁰

Atas dasar data-data yang peneliti paparkan, Framing pemberitaan oleh media online terhadap kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok di Jakarta menarik untuk dikaji. Praktik pengemasan berita yang sarat akan wacana, mensinyalir media mengkonstruksi pesan bahwa isu-isu ada pada agenda publik. Selain media online digemari oleh masyarakat, wacana yang telah terbentuk dalam media mempunyai dampak yang sangat penting dalam proses berkembangnya ideologi yang ada pada masyarakat. Kasus sensitif bernuansa agama menghadirkan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat, bukan saja melalui isi yang tertulis, tetapi juga yang telah dikemas dalam bentuk wacana-wacana yang penuh dengan makna simbolik. Framing menjadi penting dalam praktik jurnalistik, karena pengemasan berita merupakan keterampilan yang

²⁰Kompas.com, 2016 Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 juta, [https://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.d](https://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta) i.indonesia.capai.132.juta. Diakses 2 Januari 2018.

harus dimiliki oleh awak media untuk mengarahkan opini publik. Hal ini menengaskan fakta bahwa media memiliki kekuasaan yang cukup besar mengenai apa yang penting atau tidak penting untuk diberitakan.²¹ Analisis framing dihadirkan guna membedah wacana yang dikonstruksi oleh media.

Untuk itu, publik harus memahami pengemasan berita secara baik. Pengemasan dalam pemberitaan akan mendorong publik ke sebuah pengertian yang benar terhadap akar masalah, dan tentunya menjaga kebenaran berita. Namun apabila dalam pengemasan berita tidak memahami konteks dan substansinya, maka kemungkinan opini publik yang muncul bernuansa intoleran. Banyaknya informasi di media online yang luas dan bebas, menuntut khalayak harus kritis terhadap media dan pemberitaannya. Sikap kritis tersebut dapat menciptakan sebuah kekuatan penekan yang bisa menangkal berbagai distorsi atas pemberitaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pesan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada media online Republika.co.id dan NU.or.id ?

²¹ Graeme Burton, *Yang Tersembunyi di Balik Media: Pengantar Kepada Kajian Media*, (Jakarta: Jalasutra, 2008), 199.

2. Bagaimana kecenderungan media Republika.co.id dan NU.or.id terhadap isu yang diwacanakan pada pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konstruksi pesan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada media online Republika.co.id dan NU.or.id.
- b. Untuk mengetahui kecenderungan media Republika.co.id dan NU.or.id terhadap isu yang diwacanakan pada pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis:

Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi media bernuansa Islami dalam bidang ilmu komunikasi. Bersifat akademis karena peran media dalam membingkai berita dan kajian Islam memberikan perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan dan jurnalistik seiring kemajuan teknologi komunikasi.

b. Praktis:

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan pemahaman baru bagi praktisis mengenai cara media mengkonstruksi realitas atau melakukan pewacanaan

terkait kasus penodaan agama oleh Ahok di Jakarta. Bagi publik atau pembaca, diharapkan dapat memberi kesadaran baru terkait isu-isu yang diwacanakan oleh media, membangun sikap moderat, toleransi antarumat beragama, menghindari kekerasan terhadap pihak lain yang berbeda pemikiran atau berbeda agama, dan menjaga integritas bangsa. Selain itu, diharapkan masyarakat bersikap kritis terhadap pemberitaan khususnya di media online.

D. KAJIAN PUSTAKA

Pertama, tesis karya Kristanto Hartadi dengan judul “Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011”. Penelitian ini menganalisis isi dua surat kabar mainstream di Indonesia yaitu Kompas dan Media Indonesia terkait pemberitaan kasus di Temanggung. Dengan menggunakan analisis model Shoemaker dan Reese bertujuan untuk mengungkapkan pembingkaihan yang dibuat oleh Kompas dan Media Indonesia dalam kasus kerusuhan di Temanggung, serta sumbangan framing yang cukup signifikan dalam pengembangan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis teks-teks pemberitaan Kompas dan Media Indonesia yang terkait kasus kerusuhan di Temanggung. Selain dokumentasi, dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui proses dan

framing. Pada penelitian ini menyatakan bahwa meski kedua surat kabar yaitu Kompas dan Media Indonesia melancarkan framing, yang mendesak pemerintah agar melindungi warga negara dan minoritas dari kekerasan atas nama agama dan mendesak pembubaran ormas anarkis, namun pada praktiknya proses itu tidak tuntas, sehingga efek yang diharapkan juga tidak terlalu kuat.²² Perbedaan penelitian penulis dengan tesis Kristanto Hartadi ialah objek penelitian, lokus penelitian dan model analisisnya. Jika penelitian ini mengangkat kasus kerusuhan di Temanggung, dan menganalisis berita media cetak nasional, penulis mengkaji kasus penodaan agama di Jakarta pada media online yaitu *Nu.or.id* dan *Republika.co.Id*. Analisis framing yang penulis gunakan model Pan dan Kosicki.

Kedua, Penelitian “Konstruksi Radikalisme Di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal Oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika” dilakukan oleh Najahan Musyafak pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas isi pesan teks dan konstruksi pesan situs media online. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis framing yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani. Data yang digunakan hampir sepenuhnya bersifat literer, sehingga sumber data adalah semua tulisan berkriteria radikal yang ada pada kesembilan belas situs online. Hasil yang dikemukakan dalam

²² Kristanto Hartadi, *Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011*, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta), 2012, vi

penelitian tersebut antara lain, realitas isi pesan teks yang ada di sembilan belas situs online terungkap fakta bahwa terdapat enam situs yang tidak dapat diakses. Ketigabelas situs sering membahas tentang tema-tema yang memiliki kriteria keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Selain itu, konstruksi pesan pada tigabelas situs media online mendudukkan umat Islam pada posisi korban atas segala hal yang dilakukan oleh Barat.²³ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama mengangkat metode penelitian kualitatif dengan analisis framing, tetapi berbeda dengan model skema analisis yang penulis gunakan. Selain itu perbedaan yang lain terletak pada fokus penelitian framing pemberitaan penodaan agama, dan lokus penulis media online *Nu.or.id* dan *Republika.co.Id*.

Ketiga, “The Framing of International Media on Islam and Terrorism” penelitian pada tahun 2013 oleh Sofia Hayati Yusof, dkk. Penelitian ini menggunakan analisis isi dalam metode penelitian pengumpulan data, coding dan analisis data. Pemberitaan mengenai Islam di majalah berita internasional *The Economist* dari Inggris dan *TIME* dari Amerika Serikat menjadi bahan kajian. Hasil studi pada dua majalah berita internasional menemukan meskipun ada klaim dibuat oleh media bahwa dunia akan damai dan umat Islam bukanlah teroris tanpa Osama bin Laden. Liputan media yang dipilih

²³Najahan Musyafak, *Konstruksi Radikalisme Di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2015), 155-156.

menunjukkan masih ada pelabelan negatif yang dilakukan terhadap Islam yang terkait dengan terorisme. Ini ditunjukkan dengan jelas sebagian besar liputan tentang isu-isu yang berkaitan dengan Islam berkisar pada perang dan terorisme. Media masih bias melawan Islam, dan pemberitaan merupakan berita keras. Media membuat persepsi negatif terhadap Islam secara keseluruhan. Penelitian ini menjadi kritik pada media cetak internasional dalam menggambarkan masalah yang lebih adil tentang Islam dan Muslim.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah framing media. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian. Jika penelitian ini mengangkat topik tentang Islam dan Terorisme, serta bersumber dari media cetak, penulis fokus pada framing penodaan agama dan bersumber dari media online.

Keempat, “Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs *Eramuslim.com* dan *Voa-islam.com*” Penelitian pada tahun 2014 oleh Hatta Abdul Malik. Penelitian ini menganalisis isi berita, bertujuan untuk mengetahui pembingkai dan ideologi gerakan Islam pada situs *Eramuslim.com* dan *Voa-islam.com*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif. Analisis framing model Pan dan Kosicki digunakan untuk menganalisis data berupa teks, foto, desain situs, grafis, gambar bergerak dan simbol-simbol. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, media Islam online yaitu *Eramuslim.com* menampilkan berita-berita yang santun, namun

²⁴ Sofia hayati Yusof, et all, “The Framing of International Media on Islam and Terrorism”, *European Scientific Journal* March Vol.3 No.8 (2013): 119, diakses 12 Desember 2016.

lebih menyoroti persoalan umat Islam di negara yang sedang mengalami konflik. Situs ini lebih sering memberikan instrumen-instrumen daripada labeling kepada tokoh atau gerakan Islam. Ideologi situs ini dapat dikategorikan Islam fundamentalis. Situs *Voa-islam.com* seringkali memberikan pemberitaan yang bersifat menghasut, memfitnah dan labeling kepada tokoh atau gerakan Islam yang tidak sesuai dengan mereka. Situs ini dapat dikategorikan fundamentalis dan radikal.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah pada penggunaan media berbasis internet, bersifat kualitatif dan framing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus maupun objek penelitian

Kelima, “Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia” penelitian pada tahun 2013 oleh Rusmulyadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis framing. Tulisan ini mengulas bagaimana tiga media Islam online, yaitu *arrahmah.com*, *vua-islam.com* dan *hidayatullah.com* mengkonstruksi atau mengemas pemberitaan seputar konflik keagamaan di Indonesia dalam kurun 2011 hingga awal 2012. Hasil studi ini menyatakan bahwa dalam melakukan pewartaan atau membuat berita konflik keagamaan, ketiga media online tersebut telah melakukan pembingkai (framing) yang

²⁵ Hatta Abdul Malik, *Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs eramuslim.com dan Voa-islam.com*, (Semarang: LP2M-IAIN Walisongo Semarang, 2014), 101.

cenderung vulgar, sarkas dan provokatif.²⁶ Perbedaan penelitian penulis dengan Jurnal Rusmulyadi ialah lokus penelitian, jika Rusmulyadi pada media Islam online di Indonesia, penulis meneliti pada media online *Nu.or.id* dan *Republika.co.Id*. Selain itu fokus penelitian penulis tentang framing penodaan agama kasus Ahok di Jakarta.

Penelitian penulis ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Sama, karena penelitian merupakan studi kualitatif. Berbeda, karena penulis meneliti berita penodaan agama kasus Ahok di Jakarta untuk mengetahui konstruksi pemberitaan serta kecenderungan ideologi dengan menggunakan analisis framing Zhongdhang Pan dan Kosicki. Selain itu, media online yang menjadi lokus penulis yaitu *Republika.co.id* dan *Nu.or.id* belum dikaji pada penelitian-penelitian sebelumnya secara bersamaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yang akan menganalisis isi pemberitaan terkait penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada tahun 2016. Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa pada situasi tertentu atas objek yang

²⁶ Rusmulyadi, “*Framing Media Islam Online terhadap Konflik Keagamaan di Indonesia*”, (Jurnal Komunikasi Islam Volume 03, Nomor 01, Juni 2013), 74.

diteliti. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat.²⁷ Pendekatan dalam penelitian yang digunakan sebagai cara pandang untuk mendukung penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian guna mempertegas penjelasan suatu konsep sehingga terjadi persamaan persepsi. Adapun konsep batasan dalam penelitian ini adalah:

a. Framing

Framing merupakan sebuah strategi bagaimana realitas dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media.²⁸

²⁷Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: kencana, 2006), 306.

²⁸Eriyanto, *Analisis Framing*, 66.

b. Penodaan agama

Penodaan agama dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.²⁹ Indikator dalam kajian ini penentangan atau menodai hal-hal yang dianggap suci atau tidak boleh diserang yaitu simbol-simbol agama atau pemimpin agama atau kitab suci Al Quran, dan ulama oleh umat non-Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. (1) sumber primer merupakan semua bahan tertulis yang berasal langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas dan dikaji. Teks-teks berita terkait peristiwa penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada situs *Nu.or.id* dan *Republika.co.id* menjadi sumber data primer. Peneliti mengambil teks berita khususnya terkait penodaan agama kasus Ahok pada kurun waktu bulan Oktober 2016 sampai Mei 2017, karena waktu tersebut media meliput dan memberitakannya. (2) Sumber sekunder dimaksudkan sebagai bahan-bahan tertulis yang berasal tidak langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.

²⁹ Titik Suwariyati, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama Edisi IX*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 193.

Data seperti artikel atau penelitian yang terkait dengan framing, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penodaan agama kasus Ahok sebagai data pendukung penelitian.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peliputan media online yaitu *Nu.or.id* dan *Republika.co.id* terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok di Jakarta. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan teks-teks berita yang dimuat pada situs *Nu.or.id* dan *Republika.co.id* terkait kasus penodaan agama oleh Ahok, baik dari awal kasus ini disorot oleh media sampai tutup kasus dengan vonis pengadilan. Peneliti membatasi objek dengan tujuan agar data yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

5. Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³⁰Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. *Pertama*, penulis mengumpulkan data-data berupa teks atau tulisan berita dan gambar terkait penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada situs media online *Nu.or.id* dan *Republika.co.id*. Penulis mengumpulkan berita dengan *keyword* topik penodaan agama/ ahok pada kolom pencari di media *Republika.co.id* dan *Nu.or.id*. Kemudian, penulis

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) , 326.

memilah dan mengumpulkan berita terkait penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada kedua media tersebut dengan kriteria berita memenuhi unsur 5W+1H, memiliki narasumber, dan diposting pada tanggal yang sama, di waktu yang berdekatan baik di Republika.co.id dan Nu.or.id. *Kedua*, penulis menentukan sampel dari kumpulan berita yang diperoleh untuk dianalisis. Penulis mengambil sebanyak 40 berita, dengan rincian 20 berita di Republika.co.id, dan 20 berita di Nu.or.id. Berita-berita tersebut dimuat pada tanggal yang sama serta di waktu yang berdekatan, selain itu memenuhi kriteria unsur berita. Adapun hasil pengumpulan data berita sebagai berikut:

Tabel. 1. Koleksi Data Republika.co.id

No	Tanggal & waktu Publikasi	Judul Berita
1.	10/10/ 2016 10:12 WIB	Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 tak Dilanjutkan
2.	12/10/ 2016 14:00 WIB	MUI Minta Polisi Tindak Aksi Penodaan Agama
3.	13/10/ 2016 15:14 WIB	Unjuk Rasa di Monas, HTI: Tangkap Ahok.
4.	24/10/ 2016 11:54 WIB	Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51

5.	26/10/ 2016 17:32 WIB	Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap Keagamaan MUI
6.	1/ 11/ 2016 13:14 WIB	Gelar Perkara kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli
7.	1/11/ 2016 16: 04 WIB	Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok
8.	3/ 11/ 2016 07:32 WIB	Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah
9.	4/ 11/ 2016 18:37 WIB	Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat
10.	4/ 11/ 2016 20:16 WIB	Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November
11.	7/ 11/ 2016 10:36 WIB	Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Transparan
12.	7/ 11/ 2016 12.20 WIB	GNPF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi Lanjutan
13.	7/ 11/ 2016 18: 39 WIB	Ahok disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya
14.	8/ 11/ 2016 13.00 WIB	Ahok Diperiksa 9 jam

15.	21/11/ 2016 15:42 WIB	Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum
16.	1/ 12/ 2016 18:21 WIB	Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai
17.	2/ 12/ 2016 10:14 WIB	Kapolri: Apa yang Kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal
18.	2/ 12/ 2016 10:29 WIB	Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok
19.	10/12/ 2016 10:54 WIB	Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III
20.	9/ 05/ 2016 12:05	Ahok Divonis 2 tahun, hakim: Pidana tidak terkait Pilkada DKI

Tabel.2. Koleksi Data NU.or.id

No	Tanggal Publikasi	Judul Berita
1.	10/10/2016 11:14 WIB	Ahok Minta Maaf Kepada Umat
2.	12/10/ 2016 12:02 WIB	Sikapi Pernyataan Ahok, Ktum PBNU: Tak Boleh Emosional

3.	13/10/ 2016 16:30 WIB	Waspada! Skenario Adu Domba di Jakarta!
4.	24/10/ 2016 14:05 WIB	Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi Al Maidah 51
5.	26/10/ 2016 19:52 WIB	Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok
6.	1/ 11/ 2016 14: 11 WIB	Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok
7.	1/ 11/ 2016 15: 38 WIB	PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok
8.	3/ 11/ 2016 04.00 WIB	Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November
9.	4/ 11/ 2016 18: 44 WIB	Wapres: Ahok Akan Diproses secara Tegas dan Cepat
10.	4/ 11/ 2016 20:03 WIB	PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada Proses Hukum
11.	7/ 11/ 2016 11: 47 WIB	Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok

12.	7/ 11/ 2016 12: 26 WIB	Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok
13.	7/ 11/ 2016 16: 09 WIB	Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam
14.	8/ 11/ 2016 11: 45 WIB	Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok
15.	21/11/ 2016 17:27 WIB	Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember
16.	1/ 12/ 2016 21:48 WIB	Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan
17.	2/12/ 2016 10: 10 WIB	Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat
18.	2/ 12/ 2016 12:01 WIB	Kapolri Minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok
19.	10/12/ 2016 09:30 WIB	Greg Fealy Ungkap Kecenderungan paham Keagamaan karena Pngaruh Medsos
20.	9/ 05/ 2017 12:30 WIB	Ahok Divonis Dua tahun, PBNU Hormati Proses Hukum

6. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis objek penelitian menggunakan metode analisis framing. Teks-teks berita pada media online *Nu.or.id* dan *Republika.co.id* dianalisis menggunakan analisis framing model Zhongdhang Pan dan Kosicki. Analisis framing berfungsi untuk membongkar wacana.³¹ Hal ini dilakukan untuk mengetahui konstruksi pesan atau realitas peristiwa yang dibentuk oleh media online *Nu.or.id* dan *Republika.co.id*, serta kecenderungan ideologi pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta.

Analisis framing yang dilihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Metode ini tentu saja berusaha mengerti (*verstehen*), dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media yang membingkai isu.³² Proses pembentukan dan konstruksi realitas, hasilnya adalah bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.

Framing dalam media dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak yang kesemuanya dihubungkan dengan

³¹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi: Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 252.

³² Eriyanto, *Analisis Framing*, 10.

konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan.³³Perangkat framing model Pan dan Kosicki dibagi ke dalam empat struktur besar.

Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan umum berita. Hal yang diamati dalam struktur semantik yaitu bagan berita seperti lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang diambil, dan sumber.

Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5 W + 1 H(*who, what, when, where, why* dan *how*).

Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil.

Keempat, struktur retorik. Retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan

³³ Eriyanto, *Analisis Framing*, 253.

kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.³⁴

Tabel.3. Skema Framing Pan dan Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unityang Diamati
Sintaksis	1.Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup.
Skrip	2.Kelengkapan berita	5W + 1H
Tematik	3.Detail 4.Koherensi 5.Bentuk Kalimat 6.Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat
Retoris	7.Leksikon 8.Grafis 9.Metafora	Kata, idiom, gambar, grafik

Kategorisasi penelitian dalam analisis ini yaitu judul tulisan, teks berita yang dipilih dalam tulisan. Selanjutnya dilakukan analisis framing berdasarkan model Pan dan Kosicki

³⁴ Eriyanto, *Analisis Framing*, 256.

terhadap item berita yang terkait kasus penodaan agama di media online menganalisis konstruksi pesan. Teks berita dianalisis sesuai struktur framing yaitu sinktasis, skrip, tematik dan retorik. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan media online ditinjau dari penekanan atau penonjolan bidang yang sering muncul serta didiskripsikan sesuai interpretasi peneliti.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini dapat berjalan secara runtut dan koheren, maka penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu penjabaran tentang pengertian media online, framing dan konstruksi berita, penodaan agama. Setiap sub-bab akan dijabarkan lagi ruang lingkup teori yang akan dikaji meliputi, pengertian, dan komponen-komponennya.

Bab III memuat analisis konstruksi pesan pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta pada media *Republika.co.id* dan *Nu.or.id*.

Bab IV yaitu analisis framing terkait kecenderungan media *Republika.co.id* dan *Nu.Or.Id*. dalam pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta.

Bab V yaitu penutup pada penelitian ini meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

FRAMING PEMBERITAAN AGAMA DI MEDIA ISLAM ONLINE

A. Media Islam Online

1. MediaOnline

Idi Subandy Ibrahim dalam bukunya *Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog* (2005) mengungkapkan Marshall McLuhan mengartikan media sebagai pesan (*the medium is the message*), dalam arti media dipahami lebih dari sekadar sebuah wahana di mana pesan ditransisikan. Media adalah pesan itu sendiri. Jika sifat dari semua media adalah isi dari media itu sendiri, sedang isi dari media adalah tulisan yang merupakan informasi yang telah diwujudkan dalam bahasa. Sementara isi dari tulisan adalah pembicaraan tentang realitas, dan pembicaraan merupakan aktualisasi dari proses pemikiran. Maka media adalah perluasan dari ide-ide, gagasan-gagasan, dan pikiran terhadap kenyataan sosial.³⁵

Media menurut Shirley Biagi berasal dari kata medium yang berarti sarana dimana pesan dapat mencapai audien, sedangkan media merupakan bentuk jamak dari medium.³⁶Media

³⁵Idi Subandy Ibrahim, *Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005) 455.

³⁶Shirley Biagi, *Media Impact: An Introduction to Mass Media*, (Boston: Cengage Learning, 2017), 6.

pada dasarnya merupakan bentuk dari medium, yang dalam bahasa Inggris medium merupakan bentuk *singular* dari media. Rully Nasrullah dalam bukunya *Teori dan Riset Media Siber*, menerangkan Burton dalam memahami komunikasi diperlukan tiga hal yaitu, objek (*the object*), organ (*the organ*), dan medium (*the medium*). Pengkaji teori media seperti Innis, McLuhan, Meyrowitz, Holmes, dan Moores bahkan menegaskan bahwa media lebih pada makna teknologi, sementara medium memiliki pemahaman yang lebih luas dari sekadar makna teknologi itu sendiri. Media merupakan pembawa pesan, sedangkan medium membawa konten sekaligus konteks.³⁷

Media merupakan pusat kendali, tidak hanya kemampuan teknologinya melampaui ruang dan waktu, melainkan juga karena kesalingterhubungannya yang melekat dengan komunikasi, khususnya kapasitasnya untuk memberi individu akses pada jaringan global (*global networks*). Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi yang pesat, kehadiran internet beserta berbagai situs atau konten yang ada di dalamnya tidak hanya merubah perilaku individu, melainkan juga pada tingkat kelompok bahkan dalam skala yang semakin mengglobal.³⁸

³⁷ Rully Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), 4-5.

³⁸ Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 95

Online adalah terminologi umum yang secara longgar memberi gambaran tentang akses, pemerolehan, dan penyebaran (deseminasi) informasi digital. Internet merupakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer untuk saling berbicara di seluruh dunia. Sementara itu, web adalah *interface* yang memungkinkan melakukan pertukaran aneka data, teks, gambar, grafik, pesan-pesan, audio dan video pada internet.³⁹

Online dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu kepada internet atau *world wide web* (www). Online merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet.⁴⁰ Internet masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1990-an ketika tokoh-tokoh seperti RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, M. Ihsan, R. Soebiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo yang membangun jaringan internet dari tahun 1992-1994. Pengembangan internet itu dimulai melalui kegiatan radio amatir pada *Amateur Radio Club* (AMC) di ITB tahun 1986 membangun jaringan komunikasi *Buletin Board System* (BBS).⁴¹

Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar-komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara

³⁹Triyono Lukmantoro, dkk, *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*, (Semarang: AJI Semarang dan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, 2014), 2.

⁴⁰ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 12.

⁴¹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, 75.

terus-menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar-individu atau komputer. Penemuan Mosaic pada tahun 1993, yaitu sebuah browser untuk *world wide web* yang telah membuat sumber-sumber internet yang lebih banyak dapat diakses. Mosaic membiarkan para pengguna materi internet dengan hanya menunjuk dengan sebuah anak panah dan mengklik sebuah tetikus (*mouse*), dan hal itu mempermudah untuk melihat grafik online. Levy menggambarkan internet sebagai saluran komunikasi yang tidak terbatas, pembangunan komunikasi, iklan dan interaksi yang sangat kompleks.⁴²

Kemampuan teknologi (internet) tidak hanya melampaui ruang dan waktu, melainkan juga karena kesalingterhubungannya yang melekat dengan komunikasi, khususnya kapasitasnya untuk memberi individu akses pada jaringan global (*global networks*). Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi yang pesat, kehadiran internet beserta berbagai situs atau konten yang ada di dalamnya tidak hanya merubah perilaku individu, melainkan juga pada tingkat kelompok bahkan dalam skala yang semakin mengglobal.⁴³

Teknologi pada dasarnya memiliki kontribusi dalam menciptakan keberagaman media, inilah salah satu ciri dalam

⁴² Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Edisi ke 5*, (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

⁴³ Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2014), 95.

menciptakan keberagaman media. Dari sisi industri, biaya produksi media dan alat produksi yang semakin murah dan canggih menyebabkan kemunculan media secara massal. Teknologi memungkinkan industri media untuk memproduksi media lebih beragam, kondisi ini bisa dilihat dari konvergensi media yang tidak hanya berada dalam bentuk cetak semata, tetapi juga khalayak bisa menemukan media yang sama dalam bentuk elektronik. Tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga khalayak diberikan pilihan untuk mengonsumsi melalui jenis medianya mulai dari cetak, audio, visual, audio-visual, hingga online.⁴⁴

Media online menurut Biagi diartikan sebagai semua bentuk komunikasi yang menggabungkan teks, gambar, suara, dan video dengan menggunakan teknologi komputer. Digital media membaca, menulis dan menyimpan data secara elektronik dalam bentuk numerik menggunakan kode nomor untuk data berupa teks, gambar, suara dan video.⁴⁵

Media online (*online media*) disebut juga media siber (*cybermedia*), media internet (*internet media*) dan *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs website internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana

⁴⁴ Rully Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1

⁴⁵ Shirley Biagi, *Media Impact: Pengantar Media Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 231.

internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalisme* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.⁴⁶

Media online dalam perspektif studi media atau komunikasi massa menjadi objek kajian teori media baru/ *new media*, yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/ informasi) kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi *real time*. *New media* merupakan penyederhanaan istilah (simplikasi) terhadap bentuk media di luar lima media massa konvensional-televisi, radio, majalah, koran, dan film. *New media* merujuk pada perkembangan teknologi digital, namun *new media* sendiri tidak serta merta berarti media digital. Video, teks, gambar, grafik yang diubah menjadi data-data digital berbentuk *byte*, hanya merujuk pada sisi teknologi multimedia, salah satu dari tiga unsur dalam *new media*, selain interaktif dan intertekstual.⁴⁷

Apriadi Tamburaka dalam bukunya *Literasi Media* (2013) Menyebutkan Thomas L. Friedman mengungkapkan

⁴⁶Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 30.

⁴⁷ Romli, *Jurnalistik Online*, 31.

bahwa *the world is flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber mana pun. Kehadiran media baru (*new media/ cybermedia/ internet*) menjadikan informasi sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka. Jika selama ini institusi media sebagai lembaga yang mendominasi pemberitaan, kehadiran internet memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk mengakses informasi.⁴⁸

Media baru menyatukan semua yang dimiliki media lama, jika surat kabar hanya dapat dibaca dalam media kertas, radio hanya dapat didengar, televisi hanya menyatukan audio dan visual. Melalui internet semua itu dapat disatukan baik tulisan, suara dan gambar hidup. Pengguna internet kini dapat membaca tulisan melalui blog, website, dapat mendengarkan radio melalui radio internet, dapat menonton siaran berita melalui *live streaming* atau mengunduh video. Dengan kata lain, semua karakteristik khas masing-masing *old media* dapat disatukan dalam dunia *new media*.⁴⁹

Media online secara teknis atau fisik merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, blog dan media sosial), radio online, TV online, dan email. Media online berupa website (*news online media*) merupakan

⁴⁸Rully Nasrullah, *Media Sosial: Prosedur, Tren, dan Etika*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 1.

⁴⁹Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 77.

media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern saat ini. Media online berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori:

- a. Situs berita berupa edisi online dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti republika online, kompas cybermedia, media-indonesia.com, seputar-indonesia.com, pikiran-rakyat.com, dan tribunnews.com
- b. Situs berita berupa edisi online media penyiaran radio, seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan radio Netherland (rnw.nl)
- c. Situs berita berupa edisi online media penyiaran televisi, seperti CNN.com, metrotvnews.com dan liputan6.com
- d. Situs berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti antaranews.com dan detik.com
- e. Situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti Yahoo news, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News-layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online.

Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi enam jenis:

- a. *News organisation website*, situs lembaga pers atau penyiaran, misalnya edisi online surat kabar, televisi, agen berita, dan radio.

- b. *Commercial Organization website*, situs lembaga bisnis atau perusahaan, seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko online (*online store*) dan bisnis online.
- c. Website Pemerintah, website ini di Indonesia ditandai dengan domain go.id seperti indonesiainfo.go.id (portal nasional Indonesia), setneg.go.id, dan dpr.go.id
- d. Website kelompok kepentingan (*interest group*), termasuk website ormas, parpol, dan LSM.
- e. Website organisasi non-profit, seperti lembaga amal atau grup komunitas.
- f. Personal Website (blog)

Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet, karena itu media online tergolong media massa yang populer dan bersifat khas. Keberadaan media online sudah diperhitungkan khalayak dalam memperoleh akses informasi dan berita. Keunggulan media online sebagai berikut:

- a. Informasi bersifat *up to date* (terbaru)

Media online dapat melakukan *upgrade* suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi dan berita yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan jenis media massa lainnya.

b. Informasi bersifat *real time*

Media online dapat menyajikan informasi dan berita saat peristiwa sedang berlangsung (*live*). Sebagian besar wartawan media online dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa.

c. Informasi bersifat praktis

Media online dapat diakses di mana dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet.⁵⁰

2. Media Islam Online

Media Islam merupakan bidang studi yang tidak mudah dikaji. Istilah tersebut menyajikan permasalahan pembuatan definisi dan fokus studi yang beragam. Tidak ada definisi yang pasti mengenai media muslim/ media Islam, namun sebagai pedoman biasanya digunakan cara dengan menentukan unsur-unsur isi, etika media, dan komitmen terhadap Islam.⁵¹ Idy Subandy Ibrahim, dalam buku *Muslim dan Citra Muslim* merujuk Aslam Abdullah, media Islam dapat diartikan media untuk dan mengenai kaum muslim khususnya dan dunia kaum muslim umumnya yang dibuat berdasarkan perspektif Islam.⁵²

Media Islam memiliki ciri atau syarat tertentu, yang membedakannya dengan berbagai media lain. *Pertama*, media

⁵⁰ Indah Suryawati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

⁵¹ Idy Subandy Ibrahim, *Muslim dan Citra Muslim: dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog*, (Yogyakarta: Jelasutra, 2005), 259.

⁵² Idy Subandy Ibrahim, *Muslim dan Citra Muslim*, 261.

Islam harus dimiliki oleh orang Islam, apabila kepemilikannya bersifat kolektif (misalnya, saham perusahaan media bersangkutan sudah diperjualbelikan untuk umum di bursa efek), mayoritas saham harus dimiliki oleh orang Islam. *Kedua*, media sedikit banyak harus mengemban misi dakwah, yakni misi mengagungkan agama Allah, menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam, memajukan dan mencerdaskan umat Islam. Adanya misi dakwah ini bukan berarti media itu harus semata-mata diisi dengan kumpulan kotbah agama atau kutipan ayat kitab suci Al-Quran dan hadist Nabi. *Ketiga*, media Islam harus menerapkan aturan, etika, dan nilai-nilai ajaran Islam, dalam menjalankan bisnis perusahaan media dan aktivitas keredaksian.⁵³

Representasi sebagai media jaringan Islam dilakukan melalui nama website atau situs, kemasan beragam isu dalam media online Islam dapat dimaknai dari kemasan isi yang diangkat dalam *tag line*, menu utama, dan *headline*. Berdasarkan aspek tersebut media Islam online menegaskan posisinya sebagai media Islam.⁵⁴ Kemajuan media Islam dapat dihasilkan oleh tenaga-tenaga profesional dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Redaksi harus diberikan kebebasan kreatif dan

⁵³Satrio Arismunandar, Media Islam atau Media Islami dan Perbedaannya, *Muslimmedianews.com*, edisi 10 Agustus 2013, diakses 12/08/2017.

⁵⁴EniMaryani dan M. Fakhruddin Akbar, Media Online Islam Di Masyarakat Multikultur, *Jurnal Communication* Vol. 4 No.2 Oktober (2013), 52.

kebebasan redaksional untuk dapat menyajikan berita. Media Islam harus mampu memenuhi rasa ingin tahu umat dan informasi yang disajikan menarik serta memenuhi kebutuhan pembaca. Jelas isinya tidak dapat disandarkan semata-mata kepada kepentingan dan norma-norma yang ingin dimuat oleh para pemuka umat.⁵⁵ Media Islam selayaknya juga menampung aspirasi umat, selain sebagai penyalur informasi.

B. Jurnalistik Online

Istilah jurnalistik secara etimologi berasal dari bahasa Perancis *journ* atau *journal* yang berarti catatan atau laporan harian.⁵⁶ Catatan harian pada dasarnya dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti proses mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkannya. Jurnalistik dapat dimaknai sebagai perihal tentang pemberitaan dan kewartawanan, karena itu orang yang bekerja untuk jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan.⁵⁷ Sementara itu, definisi jurnalistik terminologi menurut Dja'far H. Assegaff dalam buku Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, menerangkan jurnalistik merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada khalayak (massa) melalui saluran media, baik media

⁵⁵Ibrahim, *Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog*, 477.

⁵⁶Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 15.

⁵⁷Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 17.

cetak maupun elektronik.⁵⁸ Tokoh lain yaitu Haris Sumadiria menyimpulkan jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.⁵⁹

Ada term lain yang sering disamakan dengan jurnalistik yaitu pers. Pers berasal dari bahasa Belanda *pers* yang artinya menekan atau mengepres. Pers dalam bahasa Inggris disebut *press* yang berarti mencetak. Pers berarti publikasi atau pemberitahuan secara tercetak. Akan tetapi, pada perkembangannya pengertian itu meluas meliputi segala bentuk media, baik cetak maupun elektronik, hal ini dipengaruhi karena akibat kemajuan teknologi komunikasi.⁶⁰ Unsur perantara ini kemudian menjadi poin pembeda dari jurnalistik, pers identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan media (perantara) sedang jurnalistik lebih kepada sebuah proses kegiatan yaitu kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat dan menyebarkan berita melalui media berkala.⁶¹ Meskipun demikian, jurnalistik dan pers memiliki pengertian yang sangat terkait.

⁵⁸Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 1.

⁵⁹AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 3.

⁶⁰Asep Saeful Muhatdi, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Logos, 1999), 25-26.

⁶¹AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, 1.

Jurnalistik merupakan aktivitas yang dijalankan wartawan atau jurnalis untuk mengumpulkan fakta dan menyajikannya sebagai berita yang dihadirkan pada hadapan khalayak. Pengertian ini juga berlaku pada jurnalistik online, karena perbedaan antara jurnalistik online dengan jurnalistik lainnya yaitu media cetak dan penyiaran terletak pada pemanfaatan medianya. Jurnalistik online adalah segala aktivitas jurnalistik yang menggunakan media online. Online atau internet menghubungkan antara jurnalis yang berkedudukan sebagai pengirim berbagai pesan dengan khalayak yang berposisi sebagai penerima pesan. Jurnalistik tidak berubah maknanya hanya karena berganti atau mengalami perpindahan media dari cetak ke online.⁶²

Jurnalistik online (*online Journalism*), disebut juga *cyber journalism*, jurnalistik internet, dan jurnalistik web (*web journalism*) merupakan generasi baru setelah jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak) dan jurnalistik penyiaran. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Jurnalistik dapat diartikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa.⁶³ Berita yang muncul tidak dipublikasikan beberapa menit, jam, hari, atau minggu, tetapi begitu peristiwa terjadi dan diproses langsung diunggah ke dalam situs web media online. Inilah yang menyebabkan jurnalistik online menjadi

⁶²Lukmantoro, dkk, *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*, 1.

⁶³Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, 11.

berbeda dengan jurnalistik di media lain.⁶⁴ Jurnalistik ini dilangsungkan dengan perantara media online, yang memiliki keunggulan kecepatan dalam pemberitaan.

Fungsi Jurnalistik menurut F. Fraser Bond antara lain: *Pertama, to inform* (untuk menginformasikan), jurnalistik merupakan sarana untuk penyampaian informasi berupa fakta dan peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan manusia dan patut diketahui publik. *Kedua, to interpret* (untuk menginterpretasikan) jurnalistik merupakan sarana untuk memberikan tafsiran atau interpretasi terhadap fakta dan peristiwa yang terjadi sehingga publik dapat memahami dampak dan konsekuensi dari berita yang disajikan. *Ketiga, to guide* (untuk mengarahkan) jurnalistik merupakan acuan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk dalam menyikapi suatu fakta dan peristiwa yang disajikan dalam berita sehingga dapat menjadi pedoman bagi publik dalam memberi pendapat atau dalam mengambil keputusan. *Keempat, to entertain* (untuk menghibur) jurnalistik merupakan sarana yang bersifat menghibur, yang menyegarkan dan menyenangkan pembacanya dengan menyajikan berita atau informasi yang ringan dan rileks sesuai dengan kebutuhan gaya hidup manusia.⁶⁵

Perbedaan antara jurnalistik online dan konvensional memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan yang menonjol antara lain sebagai berikut:

⁶⁴Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, 115.

⁶⁵Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 20.

a. Model komunikasi yang berlangsung

Tata tutur informasi dalam jurnalistik online disajikan secara non linier untuk mengakomodasi kebebasan penggunanya dalam mengakses informasi. Pengguna dapat menikmati publikasi online mulai dari kisah terakhir lalu melompat ke kisah sebelumnya, bahkan bisa dimulai dari kisah yang pernah dipublikasikan sekian tahun sebelumnya. Jurnalistik online memungkinkan feedback dari khalayak bisa diperoleh secara langsung. Sedangkan jurnalistik konvensional, tata tutur informasi disajikan secara linier kepada para penggunanya. Pengguna media konvensional tidak bisa melakukan lompatan dalam mengakses informasi. Pengguna media konvensional harus mengikuti urutan informasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit/ redaktur tersebut. Sifatnya yang linier, penyelenggara jurnalistik konvensional tidak dapat memperoleh feedback secara langsung.

b. Tampilan akhir produk

Perlengkapan (device) dan preferensi dalam jurnalistik online yang diatur dan dimiliki oleh penggunanya banyak menentukan tampilan akhir produk. Hal ini menyebabkan tampilan produk akhir jurnalistik online berbeda-beda menurut masing-masing penggunanya. Sedangkan jurnalistik konvensional, device lebih banyak

ditentukan oleh rancangan dan bahan yang disediakan oleh penyelenggara jurnalistik. Khalayak menerima segala tampilan yang disajikan oleh penyelenggara jurnalistik.

c. Kepraktisan dan Kenyaman bagi Pengguna

Pembaca atau khalayak dalam mengakses produk/ berita jurnalistik online membutuhkan perangkat komputer atau pesawat seluler yang harus terkoneksi dengan internet. Berita tidak dapat diakses tanpa perangkat media dan tidak tersambung internet. Berbeda dengan media konvensional, khalayak dapat membaca produk jurnalistik cetak seperti koran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.⁶⁶

C. Framing dan Konstruksi dalam Pemberitaan

1. Berita

Berita dari segi etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *vrit*, ada pula yang menyebutnya *vritta* (kejadian atau yang telah terjadi),⁶⁷ dalam bahasa Inggris disebut *news*.⁶⁸ berasal dari bahasa Latin, *novum*, *nova* artinya baru. Dalam Islam term berita disebut *al-naba'*, *al-khabar* dan *al-hadits* semuanya berpadanan

⁶⁶ Indah Suryawati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 121-122.

⁶⁷ Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 45.

⁶⁸ Sam Abede Pareno, *Manajemen Berita Antara Idealisme dan Terapan*, (Surabaya: Papyrus, 2003), 5.

dengan makna pemberitaan.⁶⁹ Pers Timur berbeda sistemnya dengan Pers Barat. Pers Timur tidak memandang berita sebagai komoditi, berita bukan barang dagangan. Berita adalah suatu proses, proses yang ditentukan arahnya.⁷⁰

Menurut *The New Grolier Webster International Dictionary* berita adalah (1) *current information about something that has taken place, or about something not known before*, (2) *news is information as presented by a news media such as papers, radio, or television*, (3) *news is anything or anyone regarded by a news media as a subject worthy of treatment*. Definisi lainnya Mitchell V. Charnley mendefinisikan berita, *news is the timely report of facts or opinion that hold interest or importance, or both, for a considerable number of people*.⁷¹ David Randall mendefinisikan berita, *news is fresh, unpublished, unusual, and generally interesting. Up to the point, as the word itself implies, news contains much that is new, informing people about something that has just happened, but it ain't necessarily so*.⁷²

⁶⁹Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*, (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 124.

⁷⁰Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.32

⁷¹Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, 39.

⁷²Tony Harcup, *Journalism Principles and Practice: Second Edition*, (London: Sage Publications, 2009), 41.

Definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa, berita merupakan informasi terkini tentang sesuatu yang terjadi di suatu tempat, atau tentang sesuatu hal yang belum diketahui sebelumnya. Berita adalah informasi yang disajikan oleh media pemberitaan seperti koran, radio, maupun televisi. Berita yaitu segala hal atau sesuatu yang berharga oleh media berita sebagai subjek bernilai dari reportase.

Sementara Dja'far H. Assegaff menyebutkan berita dalam arti jurnalistik adalah laporan tentang fakta atau ide termasa, yang dipilih oleh staf redaksi untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca.⁷³ Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Unsur terpenting dari aktivitas media baik cetak, elektronik maupun online adalah berita. Semua informasi yang tertulis atau ditayangkan pada media tidak semuanya disebut sebagai berita. Iklan bukanlah berita, opini para pakar atau ahli juga tidak termasuk berita. Berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa atau fakta yang dilaporkan melalui media massa. Laporan yang berisikan informasi yang aktual atau baru saja terjadi, bersifat penting dan menarik perhatian untuk diketahui oleh publik, yang merupakan hasil kerja jurnalistik wartawan, bukan opini atau pendapat wartawan.⁷⁴

⁷³Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 42.

⁷⁴Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69.

Graeme Burton dalam bukunya *Media dan Budaya Populer* menjelaskan John Hartley (1982) menaruh perhatian terhadap berita sebagai teks dan sebagai makna. Hartley berargumen operasi-operasi berita dan cara-cara memahami produk-produk berita tetap harus memerhatikan gambarannya yang lebih besar. Berita memiliki makna hanya dalam hubungannya dengan institusi-institusi yang lain dan wacana-wacana yang beroperasi pada saat yang sama. Hartley juga menyadari bahwa terdapat dimensi-dimensi yang secara spesifik bersifat sosiologis untuk mengonstruksi suatu kritik terhadap berita, organisasi sosial berupa institusi-institusi berita atau fungsi sosial berita.⁷⁵

Dua konsep hubungan berita dengan media secara umum, tetapi kini diterapkan kepada berita secara khusus. *Pertama*, berita sebagai komoditas, materi berita memang merupakan komoditas karena hal tersebut dibeli dan dijual melalui kantor-kantor berita, terdapat harga untuk cerita-cerita berita. Para wartawan dibayar atas cerita-cerita yang tidak mereka ungkapkan dan yang digunakan. Hubungan-hubungan sosial menjadi komoditas karena mereka memiliki harga. Informasi pasar tentang kelompok-kelompok sosial dan pendapatan mereka yang tersisa (*disposable income*) juga dibeli dan dijual terdapat harga untuk hubungan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial. Ide

⁷⁵ Graeme Burton, *Media dan Budaya Populer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1999), 105

tentang komoditas dan pengaruh pasar, meliputi semua aspek. *Kedua*, berita dan ideologi, jika media sebagai institusi mengomunikasikan ideologi kepada para audiennya, maka berita sebagai operasi khusus dalam media adalah pembawa yang ampuh terhadap ideologi. Hal ini karena berita diduga termasuk ke dalam sesuatu yang disebut sebagai fakta, sebagai lawan dari fiksi. Hal tersebut disebabkan pokok persoalan berita adalah aktivitas politik, peristiwa-peristiwa ekonomi, dan perilaku sosial.⁷⁶

Produksi berita merupakan proses kolaborasi di mana tim dipersatukan oleh otoritas editor, oleh pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai dan oleh suatu pemahaman terhadap peran-peran dalam tim. Proses pembuatan berita merupakan proses yang mengalir dari kontak pertama dengan sumber berita menuju waktu ketika berita tayang di halaman atau layar. Ada tiga tahapan yaitu pengumpulan dan pemilihan, pengeditan (pemilihan lebih lanjut) dan pengkonstruksian. Proses selektif pengumpulan dan penyuntingan berita secara fundamental ditentukan oleh asumsi-asumsi pembuatan berita, tentang pokok persoalan dan perlakuan mana yang berharga dan mana yang tidak. Nilai ini dapat diungkapkan menurut kepentingannya bagi

⁷⁶ Graeme Burton, *Media dan Budaya Populer*, 106

masyarakat, tetapi nilai tersebut dapat dilihat sebagai tolak ukur kepentingan ideologis.⁷⁷

Jenis-jenis berita menurut Haris Sumadiria ada tiga jenis berita dalam aktivitas jurnalistik yaitu:

- a. Berita elementary, berita ini dibedakan menjadi tiga jenis terdiri atas:
 1. *Straight news*, merupakan berita langsung, yaitu berita yang berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa, biasanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat dan memiliki nilai objektivitas fakta. Berita dapat ditulis dengan memenuhi unsur 5W+1H (*what, who, when, where, why, + how*).⁷⁸
 2. *Dept news report*, merupakan laporan berita mendalam, yaitu berita berwujud laporan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta sebelum/ sesudah kejadian yang mempengaruhinya. Berita ini memerlukan kolaborasi fakta-fakta lain yang terkait, yang bukan opini atau pendapat wartawan.
 3. *Comprehensive news*, merupakan berita menyeluruh, yaitu berita tentang suatu peristiwa dengan sajian fakta-fakta secara menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek yang

⁷⁷Graeme Burton, *Media dan Budaya Populer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1999), 110-111.

⁷⁸Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 47

mempengaruhi, biasanya, biasanya menyajikan gabungan fakta-fakta yang dikemas dalam satu keutuhan informasi sehingga pembaca dapat memahami makna lanjutan dari berita tersebut.

b. Berita *intermediate* dibagi menjadi dua jenis berita yaitu

1. *Interpretative news report*, merupakan laporan berita interpretatif, yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa yang bersifat kontroversial, wartawan memberikan analisis dan interpretasi dalam penulisannya tentang peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi.
2. *Feature story report*, merupakan laporan berita khas, yaitu berita yang menyajikan informasi dan fakta yang menarik perhatian pembaca dengan gaya penulisan yang berbeda. Berita dikemas menarik dan ringan berdasar sudut pandang atau pengalaman nyata dengan gaya penulisan yang lebih sederhana.⁷⁹

c. Berita *Advance*, jenis ini terdiri dari tiga berita, antara lain:

1. *Depth reporting*, merupakan pelaporan mendalam, yaitu laporan jurnalistik tentang suatu peristiwa/ masalah aktual yang disajikan secara lebih mendalam, tajam, lengkap, dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap tentang suatu peristiwa yang terjadi.

⁷⁹Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 48.

2. *Investigative report*, merupakan pelaporan penyelidikan, yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa/ masalah yang kontroversial, seperti berita interpretatif. Wartawan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap fakta yang ada sehingga memperoleh fakta-fakta baru yang bersifat khusus dan bernilai tinggi.
3. *Editorial news*, berita editorial/ tajuk, yaitu berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap suatu peristiwa yang aktual dan layak. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga opini menafsirkan fakta-fakta sehingga mempengaruhi opini publik.⁸⁰

Prinsip-prinsip jurnalistik terhadap berita tidak mungkin berubah. Berita sebagai produk utama dalam jurnalistik tetap menjadi acuan utama dalam jurnalistik online. Setiap berita memang berasal dari fakta, akan tetapi tetap merujuk pada nilai-nilai berita apapun media pemberitaannya. Meskipun berita bersumber dari fakta, namun tidak setiap fakta layak dan bisa diberitakan. Kelayakan yang menunjukkan kriteria fakta atau peristiwa yang bisa diolah sebagai berita, itulah yang dinamakan nilai-nilai berita.⁸¹

Suatu peristiwa layak diberitakan atau tidak, dapat diperiksa dengan menilai sifat-sifatnya. Cara menilainya dengan menganalisis berita tidak lepas dari unsur *consequencies, human*

⁸⁰Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 49.

⁸¹Lukmanto, dkk, *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*, 3.

interest, prominence, proximity, dan timeliness.⁸²Uraian mengenai nilai-nilai berita tersebut dikontekstualisasikan dengan jurnalistik online. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa online sebagai media untuk menyajikan berbagai pemberitaan tidak bisa keluar dari aturan-aturan dasar jurnalistik yang telah ada. Paparan mengenai nilai-nilai berita itu adalah sebagai berikut:

a. *Consequencies* berarti dampak atau akibat.

Berita-berita yang disajikan media online memiliki nilai yang tinggi apabila fakta atau peristiwa yang dihadirkan di dalamnya mempunyai relevansi dengan kehidupan khalayak.

b. *Timeliness* memiliki arti kebaruan atau aktualitas, artinya suatu peristiwa adalah kejadian yang baru saja terjadi. Nilai berita *timeliness* dapat juga diberikan pemaknaan sebagai semua informasi yang membantu khalayak dalam mengatur kehidupan mereka.⁸³ Informasi semacam ini sangat tepat jika ditampilkan dalam media online.

c. *Proximity* bermakna sebagai kedekatan.

Peristiwa yang terjadi dekat dengan tempat tinggal para pembaca. Semakin dekat suatu kejadian dengan khalayak, maka semakin bernilai tinggi nilai beritanya. Proksimitas atau kedekatan tidak hanya dapat dimaknai secara geografis-fisik saja, namun juga dapat dimaknai secara kultural.

⁸²Ahmad Y Samantho, *Jurnalistik Islami*, 112

⁸³Lukmantoro, dkk, *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*, 4.

- d. *Prominence* yaitu melibatkan tokoh terkemuka, orang penting atau orang terkenal.
- e. *Human interest* merupakan menarik dari sudut kepentingan kemanusiaan.⁸⁴

Pemberitaan di media online tidak luput dari sumber berita. Sumber berita merupakan orang atau pihak yang ikut memberi kontribusi dalam pemberian bahan maupun penyusunan suatu berita. Sekalipun bersifat melengkapi, sumber berita berperan penting dalam menciptakan berita yang objektif dan bertanggung jawab. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sumber berita. Pertama, orang yang memiliki hubungan langsung dengan berita. Kedua, memiliki otoritas terhadap masalah yang diberitakan. Ketiga, memiliki kompetensi dalam memberi informasi yang terkait dengan berita.⁸⁵

Sumber berita jika ditinjau dari segi isi berita dapat digolongkan ke dalam empat jenis sumber berita, yaitu:

- a. Sumber berita bahan yang tertulis/ tercetak (*paper trail*). Bentuknya dapat berupa berita pers, makalah atau dokumen lain.
- b. Sumber berita perangkat elektronik. Bentuknya bisa diperoleh dari internet, email, maupun televisi/ radio.
- c. Sumber berita orang (*people trail*). Orang yang dimaksud adalah orang yang menjadi narasumber utama, yang

⁸⁴Ahmad Y Samantho, *Jurnalistik Islami*, (Jakarta: Harakah, 2002), 113.

⁸⁵Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 52

memahami dan mengetahui betul tentang topik yang akan menjadi berita.

- d. Sumber berita-kantor berita (*news office trail*). Kantor berita biasanya dimiliki pemerintah yang menjadi pusat dokumentasi berita yang dipublikasikan secara nasional.⁸⁶

2. Pandangan Kontruksionis dalam Pemberitaan

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Pandangan konstruksionis, berita merupakan produk interaksi antara wartawan dan fakta. Wartawan dilanda oleh realitas dalam proses internalisasi. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Pada proses eksternalisasi wartawan turut berperan untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu⁸⁷

Pandangan konstruksionis dalam melihat media bukanlah saluran yang bebas, media juga subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita,

⁸⁶ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 53-54.

⁸⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 20.

tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Realitas yang dimuat dalam berita merupakan produk dari pembentukan realitas oleh media.⁸⁸

Semua proses konstruksi, mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan memberi andil realitas tersebut hadir di hadapan khalayak. Berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Berita bersifat subjektif, konstruksi wartawan dalam memaknai realitas yang secara strategis menghasilkan laporan berita. Praktik membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih penting dibandingkan pandangan lain. Hal ini dalam pendekatan konstruksionis dipandang sebagai praktik jurnalistik, mengarahkan pada peristiwa dikonstruksikan.⁸⁹

Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik, dalam rangka mempengaruhi khalayak, unsur keindahan dalam berita sangat diutamakan. Indah dalam arti ini dapat diminati dan nikmati. Selain dibentuk dalam berbagai jenis, berita dikemas dengan konstruksi tertentu. Keseluruhan bagian naskah berita terdiri dari tiga unsur, yaitu *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), dan *body* (kelengkapan atau penjelasan berita).⁹⁰

⁸⁸ Eriyanto, *Analisis Framing*, 23.

⁸⁹ Eriyanto, *Analisis Framing*, 28.

⁹⁰ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), 123

Headline merupakan intisari dari berita, dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakan. *Headline* dikelompokkan ke dalam empat jenis menurut kepentingan berita. *Pertama, banner headline* untuk berita yang sangat penting atau terpenting, headline dibuat gagah dan kuat, dalam arti hurufnya terbesar dan lebih tebal daripada headline lainnya. *Kedua, spread headline*, judul untuk berita penting, headline lebih kecil daripada *banner headline*. *Ketiga, secondary headline*, judul untuk berita yang kurang penting, headline ini lebih kecil dari *spread headline*. *Keempat, subordinated headline*, judul untuk berita yang dianggap tidak penting. Kehadirannya kadang-kadang dibutuhkan untuk menutup tempat kosong pada halaman yang bersangkutan.⁹¹

Lead merupakan lapoan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkan. Berdasarkan pada penekanan atau penonjolan salah satu unsur 5W+1H, lead dapat disusun menjadi enam bentuk. *Pertama, what lead*, apabila yang ditekankan dalam uraian lead mengenai macam atau bentuk kejadiannya. *Kedua, who lead*, apabila yang dijadikan pokok pembicaraan dalam uraian lead adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakannya. *Ketiga, when lead*, yaitu *lead* yang disusun untuk menonjolkan waktu peristiwa yang

⁹¹ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, 124

diberitakan itu terjadi. *Keempat, where lead*, ialah lead yang menonjolkan tempat di mana peristiwa yang diberitakan terjadi. *Kelima, why lead*, ialah lead lebih mementingkan sebab musabab terjadinya peristiwa yang diberitakannya. *Keenam, how lead*, yaitu *lead* yang mengawali tuturannya dengan menjelaskan bagaimana peristiwa yang diberitakan itu terjadi.⁹²

Body berita (tubuh berita atau kelengkapan berita) merupakan keterangan secara rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead berita. Adapun untuk bisa menarik perhatian khalayak, cara penyajian *body* berita dapat disusun menjadi empat jenis. *Pertama*, berbentuk piramida, berita disusun dalam bentuk untaian cerita yang dimulai dengan hal-hal yang kurang penting, kemudian meningkat lebih penting, dan diakhiri dengan hal terpenting. *Kedua*, berbentuk kronologis, berita tampaknya hampir sama dengan bentuk piramida, yang mendasari konstruksinya adalah rentetan jalannya peristiwa yang diberitakan, umumnya disuguhkan untuk *action news* atau reportase dari suatu peristiwa. *Ketiga*, bentuk piramida terbalik, berita ini diawali dengan hal yang terpenting, diikuti hal-hal yang penting dan diakhiri dengan hal kurang atau tidak penting. *Keempat*, berbentuk block paragraph, *body* berita ini semua bagian dari peristiwa yang diberitakan dianggap sama pentingnya.⁹³

⁹² Kustadi, 130-133.

⁹³ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), 139-145.

Proses terciptanya konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: tahap menyiapkan materi, tahap sebaran konstruksi, tahapan pembentukan konstruksi, dan tahap konfirmasi.

a. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.⁹⁴

b. Tahap sebaran konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real time*. Pilihan-pilihan wilayah sebaran adalah strategi lain dalam sebaran konstruksi media berdasarkan pada segmentsi. Pilihan-pilihan sumber informasi juga dapat dipilih berdasarkan pemetaan kekuasaan sosial sumber informasi itu di masyarakatnya. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepat-cepatnya dan setepatnya

⁹⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 203-206.

berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.⁹⁵

c. Pembentukan konstruksi realitas

Tahap ini setelah sebaran konstruksi, di mana pemberitaan telah sampai pada pembaca dan audien, yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung generik. Pertama, konstruksi pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat cenderung membenarkan apa saja yang tersaji di media sebagai sebuah realitas kebenaran. Kata lain, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. Kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap yang pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. Ketiga, menjadikan media massa sebagai pilihan konsumtif, dimana seseorang secara *habit* tergantung pada media massa.⁹⁶

d. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca/ audien memberi argumentasi dan akuntabilitas

⁹⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 207

⁹⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 208

terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pembaca/ audien, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Alasan-alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini adalah umpamanya: kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media, kedekatan dengan media massa adalah *life style* orang modern, media massa meskipun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses.⁹⁷

3. Wacana dan Ideologi Media Islam

Wacana berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *discourse* yang berarti komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide dan gagasan, konversi atau percakapan.⁹⁸ Wacana dalam pengertian umum sering dihubungkan dengan kosakata pembicaraan atau perdebatan atau perbincangan tentang suatu hal yang belum menjadi keputusan atau suatu yang belum pasti yang

⁹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 212.

⁹⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9.

lebih dekat konsep isu atau pendapat umum. Wacana dalam khazanah pengetahuan atau diskursus yang dalam bahasa Inggris *discourse*, diarahkan untuk menunjukkan sebuah ungkapan yang menggambarkan sebuah dunia atau makna atau imaji atau pengetahuan tertentu.⁹⁹

Wacana dalam perspektif konstruktivisme merupakan sebuah konstruksi realitas, sebagaimana pengertian konstruksi itu sendiri sebagai proses membangun atau membentuk makna. Proses komunikasi dalam pandangan konstruktivisme adalah membangun atau membentuk makna pesan kemudian mendistribusikan kepada pihak lain. Makna dari sebuah wacana merupakan hasil negosiasi antara teks dengan pihak peneliti sebagai *reader*. Kebebasan menafsirkan makna dilandasi oleh kecurigaan bahwa teks yang diproduksi dibangun untuk kepentingan kekuasaan, artinya dalam proses produksi tersebut ada penguasaan tertentu. Pada fase ini, kajian ideologi dalam perspektif konstruktivisme memfokuskan pada mengungkap ideologi yang direpresentasikan atau ideologi yang ditemukan dalam konteks-konteks tertentu baik situasi atau peristiwa di mana ideologi itu hadir.¹⁰⁰

Konsep ideologi membantu menjelaskan bagaimana bisa wartawan membuat liputan berita memihak satu pandangan,

⁹⁹ Udi Rusadi, *Kajian Media: isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 74.

¹⁰⁰ Udi Rusadi, *Kajian Media: Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*, 75.

menempatkan pandangan satu lebih menonjol dibandingkan pandangan kelompok lain dan sebagainya. Praktik-praktik yang menurut pendekatan positivistik dianggap sebagai tidak benar ini, dalam pendekatan konstruksionis dipandang sebagai praksis jurnalistik yang wajar dan alami. Perlu ditegaskan, praktik-praktik itu mencerminkan ideologi dari wartawan atau media tempat ia bekerja. Oleh karena itu, untuk mengerti praktik jurnalistik bukan dengan meneliti sumber bias, namun dengan mengarahkan penelitian pada aspek ideologi dibalik media yang membuat berita. Media di sini dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui satu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukanlah ranah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri.¹⁰¹

Realita media Islam didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun ada kepentingan lain yang dimiliki oleh pemilik media, seperti motif ekonomi maupun penyebaran paham yang menjadi landasan hidupnya. Pemberitaan di media Islam online dapat ditinjau dari ideologi media. Ideologi merupakan ilmu dan ajaran tentang ide, yaitu

¹⁰¹ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 53.

formulasi sistematik ilmiah seseorang atau sekelompok manusia, pada waktu tertentu, di tempat tertentu, mengenai tujuan yang akan dicapai, pedoman tentang cara-cara mencapai tujuan itu berdasarkan suatu asas teori ajaran tertentu. Ideologi Islam adalah ideologi yang berorientasi kepada Al Quran dan As Sunnah (hadits).¹⁰²

Representasi dari realitas melalui bahasa dan aspek-aspeknya merupakan ideologi dari ranah bahasa. Artinya ungkapan dalam bahasa akan menunjukkan ideologi tertentu. Ideologi menurut Grosberg, bukanlah merupakan karakteristik dari teks, tetapi terletak pada bagaimana teks itu ditempatkan dan disajikan. Hampir seluruh teks media apa pun bentuknya merupakan teks ideologis.¹⁰³ Tipologi media Islam di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu tradisional, modernis dan moderat.

Pertama, tradisional. Pemikiran tradisional menurut Zamakhsyari Dhofier ialah pikiran-pikiran keislaman yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran ulama ahli fiqh, hadis, tasawuf, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ketujuh hingga abad ketiga belas.¹⁰⁴ Kelompok ini ialah kelompok yang secara historis mendominasi seluruh pendekatan perkembangan tafsir al

¹⁰² Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 170-171.

¹⁰³ Udi Rusadi, *Kajian Media: Isu ideologis dalam perspektif, Teori dan Metode*, 88-89.

¹⁰⁴ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), 49.

Quran masa awal. Tafsir pada masa ini, hingga abad pertengahan, bahkan masih digunakan hingga sekarang, menggunakan pendekatan tekstual, literal, normatif, atau meminjam istilah Fazlur Rahman bersifat leksiografis. Pendekatan ini berimplikasi terhadap produk pemikiran skriptualis dan formalistik.¹⁰⁵ Ajaran ortodok atau konservatif atau fundamentalis dalam Islam umumnya menentang penerjemahan al Quran, bahkan dalam bahasa-bahasa yang dituturkan oleh umat Muslim sendiri. Sikap ini didukung alasan keagamaan yang sangat kuat meskipun, sampai batas-batas tertentu. Paham ini merasionalisasikan beberapa keberatan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sedikit berbeda, sebab al Quran pada dasarnya tidak dapat diterjemahkan, sama seperti karya besar dalam sastra yang juga tidak dapat diterjemahkan.¹⁰⁶

Kedua, modernis. Pengertian modernisasi ialah pengertian yang identik, atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi. Proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliah (rasional), dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di

¹⁰⁵ Hatta Abdul Malik, *Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam*, 18.

¹⁰⁶ H.A.R Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 4-5.

bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum objektif yang menguasai alam, ideal, dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentu dan harmonis.¹⁰⁷ Kelompok modernis berpandangan bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh penemuan-penemuan baru dan berpengaruh terhadap perkembangan budaya kontemporer, mengharuskan umat Islam untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama yang dianggap ortodoks, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang diyakini sebagai produk akal manusia. Implikasi dari pendekatan ini, tampak dalam produk pemikirannya yang kultural dan substansial.¹⁰⁸

Ketiga, moderat. Moderat dapat diartikan sebagai seimbang, istiqomah, adil, mudah, dan mengambil jalan pertengahan atau yang sedang-sedang. Cara beragama moderat secara internal melahirkan cara beragama yang bijak, tidak kaku, dan memandang kewajiban beragama sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan membahagiakan. Sementara secara eksternal melahirkan cara beragama terbuka, lapang, akomodatif, dan selalu mengutamakan titik temu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan maju, sehingga keberagamaan menjadi rahmat bagi kehidupan. Moderat muncul

¹⁰⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), 208

¹⁰⁸ Hatta Abdul Malik, *Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam*, 19.

karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya perintah setiap agama untuk memuliakan manusia. *Kedua*, kesadaran akan adanya kesatuan ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. *Ketiga*, adanya kesadaran akan kenyataan bahwa warga bangsa di dunia kebanyakan membangun kehidupan dan kebangsaan dengan kenyataan yang plural dan multikultural.¹⁰⁹ Berbeda dengan ekstremisme berkaitan dengan arus besar indoktrinasi paham keagamaan yang bernuansa kekerasan dan terorisme, dalam konteks keindonesiaan diperlukan paham moderat di era teknologi. Moderat merupakan paham keagamaan bersumber dari teks-teks keagamaan yang otoritatif, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan konteks dan lokalitas. Paham keagamaan yang mempunyai orientasi pada kemanusiaan dan moralitas.¹¹⁰

4. Framing

Framing adalah cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta-fakta. Hampir tidak dapat dihindari oleh jurnalis untuk melakukan ini dan dengan demikian memisahkannya dari objektivitas yang murni dan memperkenalkan beberapa bias (yang tidak disengaja). Ketika informasi dipasok kepada media berita oleh para sumber, maka

¹⁰⁹ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), 161-162.

¹¹⁰ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat*, (Jakarta: Kompas Media, 2010), 133

informasi ini kemudian muncul dengan kerangka yang terbentuk yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni objektif. Entman membedakan antara pemisahan yang disengaja, bias konten di mana realitas berita sepertinya mendukung satu sisi alih-alih yang lain dalam situasi konflik dan bias pembuatan keputusan, di mana motivasi dan pola pikir jurnalistik tidak sengaja memiliki pengaruh.¹¹¹

Framing merupakan sebuah strategi bagaimana realitas dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media.¹¹² Frame ialah prinsip dari seleksi, penekanan dan presentasi dari realitas. Adapun Robert Entman, memaknai framing adalah alat seleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjolkan sebuah definisi permasalahan tertentu, baik penafsiran, evaluasi moral, maupun rekomendasi jalan keluar atas masalah yang dipaparkan. Sementara W.A Gamson dan A. Modigliani, mendefinisikan analisis framing adalah analisis yang melihat wacana sebagai konstruksi realitas sosial dalam memaknai realitas. Hal yang senada diungkapkan oleh Frank D. Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Dengan framing realitas yang begitu rumit dan kompleks

¹¹¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Edisi 6-Buku 2*, (Jakarta: salemba Humanika, 2011), 124.

¹¹²Eriyanto, *Analisis Framing*, 66.

disederhanakan oleh media sehingga mudah dipahami, diingat dan realitas tersebut lebih bermakna dan dimengerti.¹¹³

Analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Ketika sesuatu diletakkan dalam frame, maka ada bagian yang terbuang ada bagian yang terlihat. Jika media massa pada umumnya menggunakan framing untuk membelokkan masalah sebenarnya kepada persoalan lain sehingga berbeda maknanya, maka teknik framing juga dapat digunakan media untuk menciptakan konten dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan dampak negatif.¹¹⁴

Framing dalam pandangan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.¹¹⁵ Framing dalam teks komunikasi dari jaringan komunikator profesional yang terlibat dalam pemingkakan, didefinisikan sebagai memilih beberapa aspek dari realitas dan konstruksi dalam pesan, menyoroti hubungan dengan cara yang mempromosikan interpretasi tertentu. Penggunaan strategi framing oleh komunikator atau media berusaha untuk menggunakan kekuatan

¹¹³Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia : Analisis isi pemberitaan harian Kompas dan Republika*, (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 98-99

¹¹⁴Apriadi Tamburaka, *Literasi media*, 131-132.

¹¹⁵Eriyanto, *Analisis Framing*, 252.

dengan mendorong khalayak sasaran untuk menerima interpretasi yang menguntungkan kepentingan mereka atau tujuan.¹¹⁶

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita-kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna, dan memaknai peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.¹¹⁷

Skema Framing Pan dan Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unity yang Diamati
Sintaksis	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan,

¹¹⁶Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch, *The Handbook of Journalism Studies*, (London: Routledge, 2009), 176.

¹¹⁷Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 175

		penutup.
Skrip	2.Kelengkapan berita	5W + 1H
Tematik	3.Detail 4.Koherensi 5.Bentuk Kalimat 6.Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat
Retoris	7.Leksikon 8.Grafis 9.Metafora	Kata, idiom, gambar, grafik

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dengan struktur tersebut. Wartawan akan memaknai semua strategi wacana untuk meyakinkan khalayak pembaca bahwa berita yang ditulis adalah benar. Struktur framing Pan dan Kosicki dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, sintaksis. Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan bagian berita headline, lead, latar informasi, sumber, penutup dalam satu-kesatuan teks berita secara keseluruhan, sehingga membentuk skema menjadi pedoman bagaimana fakta

hendak disusun. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak ke mana berita tersebut di bawa. *Headline* digunakan untuk menunjukkan konstruksi suatu isu, seringkali dengan menekankan makna tertentu lewat pemakaian tanda tanya untuk menunjukkan sebuah perubahan dan tanda kutip untuk menunjukkan adanya jarak perbedaan. *Lead* yang baik umumnya memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Latar informasi merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Pengutipan sumber berita dalam penulisan dimaksudkan untuk membangun objektivitas-prinsip keseimbangan dan tidak memihak.¹¹⁸

Kedua, Skrip. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini karena banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan peristiwa sebelumnya dan berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari skrip ini adalah 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *how*) yaitu apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana terkait peristiwa yang terjadi atau ditulis. Segi cara bercerita ini dapat menjadi pertanda framing yang ingin ditampilkan. Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana

¹¹⁸ Eriyanto, *Analisis Framing*, 295-298

yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.¹¹⁹

Ketiga, Tematik, bagi Pan dan Kosicki berita mirip sebuah pengujian hipotesis, yaitu peristiwa diliput, sumber yang dikutip dan pernyataan ungkapan. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini, di antaranya adalah koherensi, pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Kalimat-kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Ada tiga macam koherensi, yaitu (a) Koherensi sebab-akibat. Proposisi atau kalimat satu dipandang akibat atau sebab dari proposisi lain. (b) Koherensi penjelas, proposisi atau kalimat dilihat sebagai penjelas proposisi lain. (c) Koherensi pembeda, proposisi atau kalimat satu dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi lain.¹²⁰

Keempat struktur retorik. Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Struktur retorik dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. Leksikon merupakan elemen terpenting dalam retorik, yaitu pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk

¹¹⁹ Eriyanto, *Analisis Framing*, 300

¹²⁰ Eriyanto, *Analisis Framing*, 301-303

menandai atau menggambarkan peristiwa. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada keadaan. Pilihan kata yang dipakai tidak semata-mata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta/ realitas. Selain menggunakan kata, penekanan pesan dalam berita itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis. Grafis dalam wacana berita, biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian caption, raster, grafik, gambar, tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.¹²¹

D. Penodaan Agama

Penodaan agama menurut Frans Magnis Suseno (dalam jurnal Keadilan Sosial, 2015) dapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama atau pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Sedangkan yang tidak merupakan penodaan agama adalah (1) berkeyakinan berbeda dengan ajaran suatu agama tidak merupakan penghinaan, melainkan merupakan implikasi keyakinan yang memang berbeda, (2) begitu pula jika kelompok dengan

¹²¹ Eriyanto, *Analisis Framing*, 304-306

keyakinan agama tertentu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran salah satu agama itu tidak merupakan penodaan atau penghinaan agama, (3) itu berlaku baik bagi kelompok beragama yang keyakinannya berimplikasi penolakan/ bagian dari keyakinan agama lain, misalnya implikasi keyakinan Kristiani terhadap ajaran agama Islam.¹²²

Abu Yamin Rahman, tokoh MUI menjelaskan yang dimaksud dengan penodaan agama ialah baik berupa aliran maupun agama baru, tapi jika menyangkut dengan agama-agama yang lain dan dalam bentuk itu merupakan perampasan, atau juga penodaan. Batasannya, selama agama lain yang sudah ada tersinggung, selama itu sudah disebut dengan batas penodaan. Penodaan bertujuan merusak, penodaan tidak memiliki refrensi, hal ini berbeda dengan kritikan yang memiliki dasar atau alasan baik dari kitab yang lain maupun kitab agama Islam.¹²³

Penistaan atau penghinaan terhadap Tuhan, dikenal dengan istilah *Blasphemy*(bahasa Inggris) atau *Goldslastering*(Bahasa Belanda). *Blasphemy* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *blasphemein*, yang merupakan paduan dari kata *blaptein*(to injure yang bermakna melukai atau merusak) dan *pheme*(reputasi), sehingga *blaspheimein* mengandung arti melukai reputasi atau nama baik. Sedangkan untuk

¹²²Siti Aminah dan Muhammad Khoirur Roziqin,” Pemantauan Kasus-Kasus Penodaan Agama di Indoensia Periode 2012-2014, *Jurnal Keadilan Sosial* Edisi 5 (2015), 26-27.

¹²³Muhammad Isnur, *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012), 133.

penghinaan terhadap agama dalam artian luas disebut dengan *defamation of religion*.

Blasphemy dalam arti luas, diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak boleh diserang (tabu). Bentuk umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Di beberapa negara tindakan tersebut dilarang oleh hukum. *Blasphemy* dilarang keras oleh tiga agama Ibrahim (Yahudi, Kristen dan Islam). *Blasphemy* dalam agama Yahudi, adalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kristen, alam Kitab Perjanjian baru dikatakan menista roh kudus adalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadap Trinitas juga digolongkan sebagai *blasphemy*. *Blasphemy* dalam Islam adalah menghina Tuhan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang diakui dalam Al Quran serta menghina Al Quran itu sendiri.¹²⁴

Penodaan agama di Indoensia dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.¹²⁵ Indonesia negara yang berdasarkan hukum. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang

¹²⁴Siti Aminah dan Muhammad Khoirur Roziqin, "Pemantauan Kasus-Kasus Penodaan Agama di Indoensia Periode 2012-2014", 29.

¹²⁵ Titik Suwariyati, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama Edisi IX*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 193.

pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama diatur dalam UU No.1/PNPS/1965.

UU No.1/PNPS/1965 merupakan undang-undang yang hanya memuat 5 pasal. Konsideran menimbang hanya 2 poin: (a) bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. (b) bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden. Demikian juga dengan konsideran mengingat, terdapat 4 poin yaitu: 1). pasal 29 UUD, 2). pasal IV Aturan Peralihan UUD, 3). Penetapan Presiden No 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34) dan, 4). pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960.

Sedangkan substansi penting dari UU No.1/PNPS/1965 terletak pada pasal I:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”¹²⁶

Pasal 156a KUHP sering disebut sebagai pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Pasal 156a

¹²⁶ Yayan Sopyan, “Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah Atas Putusan MK No. 140/Puu-vii/2009”, 203.

yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, meski demikian, karena agama tidak bisa bicara makan sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.¹²⁷

Kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama (Ahok) berawal saat kunjungan kerja dalam rangka panen ikan kerapu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pada saat kunjungan kerja tersebut, Ahok telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya

¹²⁷ Abu Rokhmad, *Dialektika Mazhab Syi'ah dan Fiqh Penguasa: Studi Analisis Putusan PN Sampang No.69/Pid.B/2012/PN.Spg tentang Tajul Muluk dan Fatwa MUI Jawa Timur tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013), 52.

akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Ahok memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur dengan mengaitkan surat Al Maidah ayat 51. Sambutan Ahok kepada masyarakat sebagai berikut:

“Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi gak usah pikiran ah...nanti kalau gak terpilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Al-Maidah 51.”¹²⁸

Perkataan atau pidato Ahok tersebut seolah-olah surat Al Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal Ahok sendiri yang mendudukan atau menempatkan surat Al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan Kepala daerah. Adapun surat Al Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Quran kitab suci agama Islam berbunyi,

¹²⁸ Putusan No. 1537/Pid.B/ 2016/ PN.Jkt Utr, halaman 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Surat Al Maidah ayat 51 berdasarkan terjemahan dari Departemen Kementerian Agama adalah “ Wahai orang-orang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin (mu), sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” Di mana terjemah dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya. Perbuatan Ahok yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al Quran sebagai kitab suci Agama Islam. Sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI pada 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan surat Al Maidah ayat 51 yang menyatakan larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai

pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran.¹²⁹

¹²⁹ Putusan No.1537/ Pid.B/ 2016/ PN Jkt Utr, halaman 5

BAB III

KONSTRUKSI PEMBERITAAN PENODAAN AGAMA KASUS AHOK DI JAKARTA PADA MEDIA ISLAM ONLINE

A. Profil Media Online

1. Republika.Co.id

Republika online hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Republika online merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Seiring dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, Republika online hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.¹³⁰

2. Nu. Or.Id

Nu online merupakan media online berafiliasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik secara formal maupun kultural. NU online didirikan pada tahun 2003, dengan manajemen yang baik hingga saat ini mampu bertahan. NU Online merupakan situs resmi organisasi *Islam Ahlussunnah wal Jama'ah* terbesar yang menyajikan berita dan beragam artikel dalam 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

¹³⁰ <https://www.republika.co.id/page/about>

Berbagai rubrik tersedia di NU Online, diantaranya Warga Nasional, warta Daerah, warta Nasional, Fragmen, Seni Budaya, Halaqah, Kolom, Pesantren, Tokoh, Buku dan Humor (ciri khas masyarakat). Sajian artikel yang berkaitan langsung dengan keislaman tertuang dalam rubrik Bahtsul Masail (mengupas permasalahan secara aktual dan sarana konsultasi umat Islam), Hikmah, Syari'ah, Ubudiyah, Taushiyah, Khutbah dan Buletin Jum'at.¹³¹

B. Konstruksi Berita di Republika.Co.Id

1. **Judul:**Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al Maidah 51 tak Dilanjutkan.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al Maidah 51 tak Dilanjutkan. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar:

¹³¹<http://www.muslimedianews.com/2015/02/top-20-website-islam-rujukan-terbaik.html#ixzz5LavAdgXk>

		kegaduhan terkait video Ahok. Kutipan: Pernyataan Ahok meminta maaf dan meminta untuk tidak melanjutkan kasus lagi.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok minta maaf, pelaku oleh Ahok kepada umat Islam, di Balai Kota, Senin 10 Oktober 2016, karena mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Perminta maafan secara terbuka kepada umat Islam atas pernyataan di Kepulauan Seribu.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan-pernyataan Ahok diselingi kebijakannya yang

		mendukung Islam.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Penggunaan kata dalam kutipan pernyataan Ahok, berusaha menegaskan bahwa tindak tanduknya tidak melecehkan Islam.

2. Judul: MUI Minta Polisi Tindak Aksi Penodaan Agama

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ketum MUI minta polisi tindak aksi penodaan agama. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Penodaan terhadap Al Quran. Sumber: Ketum MUI, pengamat kepolisian, Irjen Ari Dono Sukmanto. Penutup, Polisi harus bertindak independen.
Struktur	5W+1H	Penindakan terhadap

Skrip		penodaan agama. Ketum MUI. MUI dalam telaahnya melihat hal itu masuk dalam penodaan terhadap Al Quran. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan-pernyataan Ketum MUI, dan Bambang Widodo Umar. Penindakan tegas terhadap penodaan agama, himbauan agar masyarakat tidak main hakim sendiri, melainkan serahkan pada yang berwajib.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Penodaan dan penistaan agama.

3. Judul:Unjuk Rasa di Monas, HTI: tangkap Ahok!

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Unjuk Rasa di Monas, HTI: tangkap Ahok! . Menekankan unsur <i>what</i> .Latar: Penegakan hukum terhadap Ahok. Sumber: Perwakilan HTI, Khairul Gunawan dan Ahmad Khozinuddin. Penutup: harus ditangkap, minta maaf saja tidak tulus.
Struktur Skrip	5W+1H	Massa HTI menuntut penegakkan hukum dengan menangkap Ahok dipenjarakan. Tokoh: Massa HTI. Pada 13 Oktober 2016 unjuk rasa di Monas. Karena Ahok menodai agama. Dengan

		menyuaran hukum Ahok dan memperjuangkan negara khilafah untuk menghancurkan orang zalim.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan-pernyataan perwakilan massa HTI. Selain itu menjabarkan seruan menangkap Ahok karena menodai Al Quran, selain itu sempat menyuarakan negara khilafah.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata blak-blakan: terang-terangan, jelas. Ahok secara terang-terang menodai Al Quran.

4. Judul:Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51

Perangkat Framing	Unit Pengama	Hasil pengamatan
--------------------------	---------------------	-------------------------

	tan	
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pemeriksaan terkait dugaan penodaan agama. Sumber: Ahok, Kasus pulau Seribu, soal surat Al Maidah. Penutup: Polri bertindak cepat untuk memberi ketenangan kepada masyarakat.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok datangi Bareskrim. Pelaku Ahok, di Bareskrim Polri Gambir Jakarta Pusat, Senin 24 Oktober pukul

		10.17. Pemeriksaan terkait surat Al Maidah. Ahok datang dan langsung didampingi oleh orang Bareskrim Polri.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini menceritakan kedatangan Ahok ke Bareskrim, sebelumnya bertemu dengan Presiden RI, selain itu diselingi pendapat pengamat hukum pidana .
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kasus pulau seribu, merupakan kata ganti dalam penyebutan kasus dugaan penodaan agama.

5. Judul:Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap
Keagamaan MUI

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap Keagamaan MUI. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar:Pernyataan sikap keagamaan MUI disalah pahami sebagai fatwa MUI. Sumber: Ketum MUI, Penutup: umat islam yang mengikuti demonstrasi wajib menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.
Struktur Skrip	5W+1H	Klarifikasi sikap keagamaan MUI, oleh KH Ma'ruf Amin dan KH. Ahmad Ishomuddin.Di Gedung PBNU Jakarta Pusat, pada Rabu 26 oktober 2016. KH

		Ishomuddin mengklarifikasi merujuk pernyataan Ketum MUI.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini menjabarkan klarifikasi sikap keagamaan MUI, dan melakukan pelurusan masalah.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata klarifikasi, menunjukkan <i>counter attack</i> atas persoalan kasus Ahok, dan mengindikasikan MUI masih berjalan dalam ranahnya.

6. Judul:Gelar Perkara kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi
Ahli

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Gelar Perkara kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli. Menekankan unsur

		<p><i>what</i>. Latar:</p> <p>Membedah kasus Ahok . sumber: Kepala Divisi Humas Polri.</p> <p>Penutup:pernyataan Ahok mengundang kontroversi publik.</p>
<p>Struktur Skrip</p>	5W+1H	<p>Gelar perkara kasus Ahok. Pihak terlibat Kepala Divisi Humas Polri. Di Jakarta, Selasa 1 November 2016. Gelar Perkara tahap awal akan menentukan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Irjen Boy meyakinkan bahwa polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin.</p>
<p>Struktur Tematik</p>	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	<p>Artikel ini menceritakan pernyataan-pernyataan</p>

		<p>Irjen Boy.</p> <p>Menjabarkan bahwa kasus Ahok tidak bisa penyelidikan terburu-buru, terlebih momennya Pilkada.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	<p>Kata hati-hati dalam penanganan kasus Ahok, menunjukkan kepolisian tidak ingin ceroboh, terlebih kasus ini sensitif dan disorot oleh berbagai pihak dan masyarakat.</p>

7. Judul:Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	<p>Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok.</p> <p>Menekankan unsur</p>

		<p><i>what</i>. Latar: Ahok tidak ditahan. Sumber: Jokowi, Wiranto, Ketum MUI. Penutup: Pemerintah ingin masyarakat memahami proses hukum dan bersikap tenang.</p>
<p>Struktur Skrip</p>	<p>5W+1H</p>	<p>Presiden tidak intervensi kasus Ahok. Tokoh terkait, Jokowi. Di Istana Merdeka, saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, karena kasus Ahok memang sudah diproses oleh Polri. Presiden menyatakan dan memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses itu.</p>

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan Presiden, Ketum MUI dan Wiranto. Selain memberikan penegasan, meminta masyarakat juga memahami proses hukum Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata intervensi, dalam konteks ini presiden tidak ikut campur dalam kasus Ahok.

8. Judul:Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah. Tidak tepat tuntutan para pendemo. Menekankan unsur <i>why</i> .

		Latar: demo 212 Sumber kapolri. Penutup: Unjuk rasa akan digelar di Jakarta Pusat, Istana Presiden, monas dan daerah sekitar Jakarta.
Struktur Skrip	5W+1H	Tuntutan Pendemo penjarakan Ahok Salah. Tokoh: Kapolri. Di lapangan Monas, Rabu 2 November 2016. Salah karena tidak tepat tuntutan pendemo, kasus Ahok adalah yudikatif, sedangkan presiden lembaga eksekutif. Beberapa ormas Islam berencana mengerahkan massa untuk unjuk rasa menuntut adanya tindakan hukum.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan-pernyataan Kapolri dan

		KadivhumasPolri. Menjabarkan tuntutan masa pendemo tidaklah tepat jika mengarah pada presiden.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata memenjarakan, merupakan upaya menuntut adanya tindakan hukum terhadap Ahok.

9. Judul:Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat. Menekankan unsur <i>what</i> . Sumber: Jusuf Kalla. Penutup: Unjuk rasa dilakukan sejumlah ormas terkait kasus Ahok.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat. Tokoh terkait: Jusuf Kalla. Di Jakarta, pada Jumat 4 November 2016. Adanya massa pendemo yang berdialog dengan wapres. Proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam

		waktu dua pekan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel memuat pernyataan Wapres, menjabarkan pertemuan antara wapres didampingi staf dengan perwakilan pengunjuk rasa.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata Unjuk rasa, memberikan penekanan lebih halus daripada demonstrasi.

10. Judul:Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November. Buya mengapresiasi karena unjuk rasa berjalan tertib. Menekankan unsur <i>why</i> . Latar: Aksi Bela Islam. Sumber: Buya Syafii.

		Penutup: Massa demonstrasi menuntut penuntasan kasus Ahok, dan akhirnya membubarkan diri secara bertahap.
Struktur Skrip	5W+1H	Apresiasi Buya Syafii pada Aksi Bela Islam. Tokoh terkait: Buya Syafii. Di Jakarta, pada Jumat malam 4 November 2016. Karena unjuk rasa berjalan tertib. Buya meminta penghinaan dan penistaan itu benar-benar dikaji dan harus bersikap adil.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan Buya Syafii. Menceritakan agar kasus Ahok benar-benar dikaji, dipelajari betul-betul dan bersikap adil kepada siapa saja.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Istilah dipelajari betul-betul, merupakan <i>statement</i>

		<p>untuk menangani kasus Ahok hendaknya benar-benar teliti dan hati-hati, agar bisa menghasilkan keputusan yang adil.</p>
--	--	---

11. Judul:GNPF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi Lanjutan

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	GNPF-MUI belum pastikan ada aksi lanjutan. Menekankan unsur <i>why</i> . Latar: Aksi Bela Islam. Sumber: Bachtiar Nasir. Penutup: akan membahas aksi selanjutnya, apabila ada indikasi meringankan Ahok.
Struktur Skrip	5W+1H	Konfirmasi aksi lanjutan 411. Tokoh: Ustaz Bachtiar Nasir. Pada 7 November, di

		Jakarta. Sebab, masih mencermati situasi tiga hingga empat hari mendatang terkait kasus Ahok. Menegaskan isu di medsos terkait aksi lanjutan 25 November bukan resmi dari GNPF.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan-pernyataan Bachtiar Nasir, memberi penjelasan terkait aksi lanjutan 411, serta melakukan pengawasan terhadap kasus Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata, sekadar sandiwara: settingan atau buatan, gelar perkara kasus Ahok disinyalir buatan

		untuk melindungi Ahok dari hukum.
--	--	--------------------------------------

12. Judul:Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Digelar

Transparan

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Digelar Transparan. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: proses hukum Ahok. Sumber: Jokowi. Penutup: Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk juga saksi yang diajukan terlapor.

Struktur Skrip	5W+1H	<p>Pemeriksaan Ahok digelar transparan.</p> <p>Tokoh: Jokowi. Di Jakarta Utara, usai meninjau ruas jalan tol di Wilayah Kalimantan.</p> <p>Hal ini untuk menyakinkan publik bahwa pemerintah bersikap profesional dalam kasus Ahok.</p> <p>Jokowi meminta Kapolri agar pemeriksaannya terbuka.</p>
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	<p>Artikel ini menceritakan pernyataan Jokowi, memerintahkan Kapolri agar terbuka dalam pemeriksaan kasus Ahok jika memungkinkan ada aturan yang membolehkan.</p>

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Istilah syak wasangka, menunjukkan kecurigaan atau ketidakpercayaan secara halus.
-------------------------	---------------------	---

13. Judul:Ahok disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya. Judul ada indikasi praktik clickbait karena ada kata tunjuk guna menarik pembaca. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pemeriksaan kedua kasus Ahok. Sumber: Kombes Pol Rikwanto. Penutup: target penyelesaian kasus seperti perintah

		Wapres Jusuf Kalla.
Struktur Scrip	5W+1H	Ahok menjalani pemeriksaan. Tokoh: Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Di Mabes Polri, pada Senin 7 November 2016. Terkait pernyataannya saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Penyidik mencecar Ahok selama kurang lebih sembilan jam.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan Kombes Pol Rikwanto, menjelaskan pemeriksaan kepada Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata mencecar, memiliki kecenderungan lebih kasar daripada menginterogasi. Hal ini diberlakukan kepada Ahok, karena dianggap sebagai pihak yang bersalah atau pantas.
-------------------------	---------------------	---

14. Judul: Ahok Diperiksa 9 jam

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok Diperiksa 9 jam. Ahok menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus penodaan agama. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pemeriksaan lanjutan. Sumber: Ahok, Sirra Prayuna,

		Rikwanto dan Zainut Tauhid.
Struktur Skrip	5W+1H	Pemeriksaan Ahok. Tokoh: Ahok. Di Bareskrim Mabes Polri, pada Senin 7 November 2011. Karena melanjutkan pemeriksaan Ahok pada 24/10. Penyidik memberikan 22 pertanyaan. Kepada Ahok.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat penjelasan berbagai tokoh seperti Ahok, Sirra Prayuna, Rikwanto dan Zainut Tauhid. Menjelaskan kronologis pemeriksaan lanjutan kasus Ahok.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kalimat Ahok tidak bersalah dalam urusan pendukung, merupakan ungkapan pembelaan terhadap Ahok.
-------------------------	---------------------	---

15. Judul:Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Aksi damai 2 Desember. Sumber: Tito Karnavian, Juru Bicara FPI. Penutup: Habib Rizieq menambahkan 2 Desember bertepatan dengan Jumat Kubro dinilai sebagai saat yang

		tepat untuk berdoa bersama.
Struktur Skrip	5W+1H	Aksi damai 2 Desember. Tokoh: Kapolri, Ormas. Di Jakarta, pada 2 Desember. Karena menuntut penahanan Ahok. Kapolri mempersilakan aksi massa asal damai dan tidak mengganggu ketertiban.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan Kapolri dan pihak ormas yang mengikuti aksi massa. Kapolri mempersilakan aksi damai tapi menghimbau dan memberi rambu-rambu lokasi.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Istilah Aksi damai, merupakan kata lain dari

		demonstrasi, maknanya lebih halus, dan menghilangkan kesan anarkis.
--	--	---

16. Judul:Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pasca pelimpahan tahap dua berkas perkara. Sumber: Ahok. Penutup: Meski memenuhi panggilan penyidik, Ahok tetap menjalankan tugas blusukan.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok Mohon Doa dalam proses hukum. Tokoh: Ahok. Di kejaksaan Agung RI, jakarta pada

		Kamis 1 Desember 2016. Proses pemeriksaan telah selesai. Ahok selalu kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel memuat pernyataan Ahok, dan menceritakan proses penyelidikan Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Blusukan, merupakan kata ganti menjalankan tugas dalam melakukan kunjungan pada warga.

17. Judul:Kapolri: Apa yang Kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri: Apa yang Kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Aksi Bela

		Islam jilid tiga. Sumber: Kapolri. Penutup: Rencananya kasus penodaan agama akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Struktur Skrip	5W+1H	Upaya Kepolisian RI menegakkan hukum. Tokoh: Kapolri. Di lapangan Silang Monas, pada Jumat 2 Desember 2016. Karena sudah maksimal menetapkan Ahok sebagai tersangka dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Kapolri meminta dukungan masyarakat dalam penegakkan kasus sesuai prosedur hukum.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel ini memuat pernyataan Kapolri, serta menceritakan kronologi penanganan

		kasus Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Aksi Bela Islam jilid tiga, merupakan istilah atau penamaan atas gerakan massa yang ketiga dari berbagai ormas maupun masyarakat dalam penuntutan hukum terhadap Ahok terkait dugaan penodaan agama.

18. Judul:Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Aksi 212. Sumber: Kapolri. Penutup:Sebagian massa mendatangi

		Monas dan Masjid Istiqlal sejak Kamis dari berbagai daerah sebagai tempat berkumpul dan bermalam.
Struktur Skrip	5W+1H	Kapolri mengajak berdoa bersama. Tokoh: Kapolri. Di Monas, pada 2 Desember 2016. Proses hukum Ahok terus berjalan. Kapolri meminta massa untuk berdoa bersama.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan-pernyataan Kapolri, mengajak berdoa bersama, mendukung proses hukum Ahok. Selain itu ditanggapi oleh massa aksi terkait proses hukum Ahok.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata buktikan-buktikan, merupakan ucapan dari massa aksi untuk Kapolri untuk merealisasikan janji dalam penanganan kasus Ahok berjalan dan dikawal.
-------------------------	---------------------	---

19. Judul:Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III. Latar: Aksi Bela Islam sebelumnya berjalan damai. Sumber: Plt Gubernur DKI Jakarta. Penutup: Tuntutan Ahok dipenjara.
Struktur Skrip	5W+1H	Kesiapan Pemprov DKI atas Aksi Bela Islam. Tokoh:

		<p>Sumarsono. Di Jakarta, isu pada tanggal 25 November 2016 . Karena Aksi Bela Islam yang lalu berlangsung damai, semua bisa saling menjaga. Soni menegaskan kesiapannya menyambut agar massa merasa nyaman dan menyampaikan aspirasi.</p>
<p>Struktur Tematik</p>	<p>Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat</p>	<p>Teks ini memuat pernyataan Sumarsono terkait kesiapan Pemprov DKI terkait Aksi Bela Islam, bukan menghadapi massa, melainkan menyambutnya.</p>
<p>Struktur Retoris</p>	<p>Kata, idiom, gambar</p>	<p>Kata aspirasi, menunjukkan bahwa</p>

		masyarakat juga memiliki harapan atau tujuan.
--	--	---

20. Judul:Ahok Divonis 2 tahun, hakim: Pidana tidak terkait Pilkada DKI

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok Divonis 2 tahun, hakim: Pidana tidak terkait Pilkada
Struktur Skrip	5W+1H	Vonis hakim terhadap Ahok, tidak terkait Pilkada. Menekankan unsur <i>why</i> . Tokoh: Hakim Ketua. Di Auditorium kementerian, Selasa 9 Mei 2017. Karena Ahok terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama. Dalam

		menentukan putusannya, hakim menimbang pada dua pertimbangan yaitu memberatkan dan meringankan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan majelis Hakim dalam menentukan putusannya terhadap kasus Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata murni, menunjukkan tidak bercampur dengan urusan lain.

C. Konstruksi Berita di Nu.or.id

1. Judul: Ahok Minta Maaf Kepada Umat

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
------------------------------	------------------------	-------------------------

Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok Minta Maaf Kepada Umat. Menekankan unsur <i>why</i> . Latar: Ucapan Ahok menimbulkan kegaduhan. Sumber: Ahok. Penutup: Urusan agama adalah pribadi.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok Minta Maaf. Pelaku: Ahok. Di Balai Kota pada hari Senin. Karena menyinggung perasaan umat Islam dan tidak ada maksud melecehkan Al Quran. Ahok menegaskan dia tidak ada maksud menyinggung umat Islam apalagi menistakan agama.

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Ahok terkait permintaan maaf, sembari menegaskan dia bukan anti Islam.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Bukan anti Islam, Ahok menegaskan tidak memusuhi Islam.

2. **Judul:**Sikapi Pernyataan Ahok, Ktun PBNU: Tak Boleh Emosional

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Sikapi Pernyataan Ahok, Ktun PBNU: Tak Boleh Emosional. Menekankan unsur <i>why</i> . Latar: Penyanyangan keluarnya pernyataan sikap dan rekomendasi terkait kasus Ahok.

		Sumber: KH. Said Aqil Siroj. Penutup: masalah diselesaikan dengan dialog.
Struktur Skrip	5W+1H	Sikapi Pernyataan Ahok. Ketum PBNU. Di Jakarta, pada Rabu (12/10). Karena adanya pernyataan sikap dan rekomendasi sejumlah pihak yang cenderung emosional. Semestinya disikapi dengan kepala dingin.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Ketum PBNU untuk menyikapi kasus Ahok, beserta memaafkan Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Ahok salah, menunjukkan dalam kasus ini dia berada pada posisi salah.

3. Judul:Waspada! Skenario Adu Domba di Jakarta!

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Waspada! Skenario Adu Domba di Jakarta! Latar: kekhawatiran terkait kasus Ahok. Sumber: Rumadi Ahmad. Penutup:Waspada! dengan skenario adu domba, soal keutuhan bangsa.
Struktur Skrip	5W+1H	Kewaspadaan adu domba. Tokoh:Lakpesdam PBNU. Di Jakarta, Kamis (13/10). Karena situasi kembali memanas, menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus Ahok. Ia memberi keterangan tertulis

		maupun memuat di akun facebooknya untuk mengingatkan dan waspada terkait keutuhan bangsa.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Lakpesdam PBNU, menjelaskan kekhawatiran dan menghimbau masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang benci Ahok dan juga benci NKRI dengan skenario adu domba.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Adu domba, tanda seru pada judul, hal ini menegaskan dan harus menjadi perhatian publik.

4. Judul:Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi Al Maidah 51

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi Al Maidah 51. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Kasus dugaan penistaan agama. Sumber: Ahok. Penutup: Ahok sudah menyampaikan klarifikasinya melalui akun instagram dan menganjurkan masyarakat melihat video tanpa dipotong.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok Klarifikasi Al Maidah 51. Tokoh: Ahok dan Brigjen Pol Agus Andrianto. Di Bareskrim Polri pada Senin. Supaya bisa memberikan klarifikasi kepada Polisi atas

		kasus di Pulau Seribu. Ahok mendatangi Bareskrim untuk berkoordinasi dan menjalankan pemeriksaan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Ahok dan Brigjen Pol Agus Andrianto terkait penyidikan terkait kasus Ahok soal surat Al Maidah.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Inisiatif sendiri, menandakan Ahok punya niat untuk menyelesaikan masalah.

5. Judul:Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Demo terkait Kasus Ahok. Sumber: Ketum MUI. Penutup: Sudah dimaafkan tetapi diproses hukum.
Struktur Skrip	5W+1H	MUI tidak dukung Demo terkait kasus Ahok. Tokoh: Ketum MUI. Di Gedung PBNU, Rabu (26/ 10). Karena MUI tidak mau terlibat. Ia menegaskan simbol-simbol MUI tidak boleh digunakan dalam demo.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar	Teks ini memuat pernyataan Ketum

	kalimat	MUI, bahwa sikap MUI tidak mendukung demo kasus Ahok, maupun tidak bisa melarang demo. Sembari menegaskan tidak ada kaitannya pula dengan pemanfaatan pendapat MUI untuk kepentingan Pilkada. Tidak ada perbedaan sikap antara NU dan MUI, memaafkan tapi dirposes hukum terkait Ahok.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Simbol-simbol MUI, merupakan atribut penanda/ identitas dari MUI.

6. Judul:Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Gelar Perkara kasus Ahok. Sumber: Kadiv Humas Polri. Penutup: Ahok kandidat calon Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan klarifikasi melalui akun instagram.
Struktur Skrip	5W+1H	Bareskrim Meminta keterangan saksi. Oleh Penyidik Bareskrim. Di Jakarta pada hari Selasa. Penanganan kasus Ahok sangat hati-hati. Dengan meminta keterangan 10 saksi.

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Kadiv Humas Irjen Boy, serta menjabarkan proses hukum Ahok sedang berjalan dan ditangani dengan hati-hati.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Hati-hati, menunjukkan ketelitian dan tidak sembarangan dalam menangani kasus Ahok.

7. Judul:PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar:

		<p>Demonstrasi besar 4 November.</p> <p>Sumber: Ketum PBNU. Penutup; Segera proses hukum supaya jelas.</p>
<p>Struktur Skrip</p>	5W+1H	<p>Imbauan PBNU Demo bermartabat dan proses hukum Ahok. Tokoh: Ketum PBNU. Di Istana Merdeka, Selasa pagi (1/11). Karena pemerintah dan para ulama sepakat menjaga solidaritas untuk mengawal dan menjaga NKRI. Dengan menghimbau demonstrasi yang beretika, serta</p>

		segera memproses hukum.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Ketum PBNU, menjabarkan sikap pemerintah dan para ulama terkait demo besar kasus Ahok, serta mendorong segera proses hukum.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Demonstrasi besar-besaran, menunjukkan unjuk rasa dengan pengikut yang banyak.

8. Judul:Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November

Perangkat	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
-----------	-----------------	------------------

Framing		
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Demo 411. Sumber: Kapolri. Penutup: beredar foto Jaisy Al fath menunjukkan gerakan anti Ahok ditunggangi oleh kelompok radikal.
Struktur Skrip	5W+1H	Agenda Khilafah tunggangi Demo 4 November. Tokoh: Kapolri, Yenny Wahid. Di Metro TV, Live Mata Najwa. Kapolri mengungkap Demo 411 ditumpangi oleh beberapa kepentingan. Harus mewaspadaai dan mengantisipasi.

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Kapolri dan yenny Wahid, mengungkapkan demo 411 terkait kasus Ahok di khawatirkan ada penungangan dan penyusupan yang mengganggu stabilitas negara. Selain itu teks ini diselingi ancaman dari suriah terkait kasus Ahok .
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Ditunggangi, menunjukkan aksi demo tidak murni fokus agama, melain ada kepentingan lain.

9. Judul:Wapres: Ahok Akan Diproses secara Tegas dan Cepat

Perangkat	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
-----------	-----------------	------------------

Framing		
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Wapres: Ahok akan Diproses secara Tegas dan Cepat. Menekankan unsur <i>what</i> . Sumber: Jusuf Kalla. Penutup: Unjuk rasa dilakukan sejumlah ormas terkait kasus Ahok.
Struktur Skrip	5W+1H	Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat. Tokoh terkait: Jusuf Kalla. Di Jakarta, pada Jumat 4 November 2016. Adanya massa pendemo yang berdialog dengan wapres. Proses hukum tersebut akan diselesaikan

		dalam waktu dua pekan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Artikel memuat pernyataan Wapres, menjabarkan pertemuan antara wapres didampingi staf dengan perwakilan pengunjuk rasa.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Kata Unjuk rasa, memberikan penekanan lebih halus daripada demonstrasi.

10. Judul:PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada Proses Hukum

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada

		<p>Proses Hukum.</p> <p>Menekankan unsur <i>what</i>. Latar: Aksi 411.</p> <p>Sumber: Ketum PBNU. Penutup: Pandangan Kiai Said, kekisruhan terkait Ahok tidak lepas dari politik.</p>
<p>Struktur</p> <p>Skrip</p>	5W+1H	<p>Apresiasi PBNU terkait Aksi 411 dan ajakan proses hukum.</p> <p>Tokoh: Ketum PBNU.</p> <p>Di Komplek Pesantren Kempek, Cirebon.</p> <p>Pada 4 November 2016. Mengapresiasi karena aksi berjalan relatif tertib dan damai. Dengan mengajak memaafkan Ahok dan menyerahkan pada hukum.</p>

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks memuat pernyataan Ketum PBNU, menjabarkan apresianya terhadap aksi demo yang damai, diselingi mengajak umat memaaf Ahok dan percaya pada proses hukum. Selain itu memaparkan pandangan bahwa kisruh terkait Ahok tidak lepas dari politik Pilkada.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Muslim Indonesia yang orisinil, menunjukkan umat Islam di Indonesia bisa hidup dalam sistem dan koridor demokrasi.

11. Judul: Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok

Perangkat	Unit	Hasil pengamatan
------------------	-------------	-------------------------

Framing	Pengamatan	
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pemeriksaan terhadap Ahok. Sumber: Kabareskrim Polri. Penutup: Mendengarkan keterangan 22 saksi ahli baik dari MUI, ahli hukum pidana, ahli bahasa dan ahli agama.
Struktur Skrip	5W+1H	Bareskrim pertajam dan dalam terkait kasus Ahok. Tokoh: Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Di Mabes Polri, pada hari Senin.

		Supaya tidak ada salah tafsir. Mengusut dan memeriksa para saksi, dan orang-orang yang melihat di TKP serta video, dari keterangan tersebut akan ditanyakankembali kepada para saksi ahli.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan pernyataan Kabereskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Menjabarkan penanganan kasus Ahok dengan pemeriksaan yang mendetail.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Pertajamkan, menunjukkan fokus dalam pemeriksaan kasus.

12. Judul:Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan
Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Digelar Terbuka. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: proses hukum Ahok. Sumber: Jokowi. Penutup: Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk juga saksi yang diajukan terlapor.
Struktur Skrip	5W+1H	Pemeriksaan Ahok digelar terbuka. Tokoh: Jokowi. Di Jakarta Timur, usai meninjau jalan tol Bekasi—Cawang-Kampung Melayu. Hal ini untuk menyakinkan publik

		<p>bahwa pemerintah bersikap profesional dalam kasus Ahok.</p> <p>Jokowi meminta Kapolri agar pemeriksaan dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan terbuka.</p>
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	<p>Artikel ini menceritakan pernyataan Jokowi, memerintahkan Kapolri agar terbuka dalam pemeriksaan kasus Ahok jika memungkinkan ada aturan yang membolehkan.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	<p>Istilah syak wasangka, menunjukkan kecurigaan atau ketidakpercayaan secara halus.</p>

13. Judul:Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Kasus Pidato Ahok terkait Al Maidah. Sumber: Kiai Said Aqil Siroj. Penutup: Menegaskan sikap Kebangsaan Nu adalah moderat, tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila.
Struktur Skrip	5W+1H	Pernyataan Ahok menyinggung umat Islam. Tokoh: Ketum PBNU. Di Gedung PBNU, pada Senin (7/11). Sebab Siapapun yang menyatakan seperti itu menyinggung Al Maidah seperti Ahok)

		pasti akan menyinggung umat Islam, soal menistakan atau tidak wewenang kepolisian. Pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi antar ulama dan umara.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Ketum PBNU, terkait pernyataan Ahok menyinggung umat Islam, bukan menistakan. Selain itu menyatakan pentingnya menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan pemerintah. Serta pemaparan sikap kebangsaan Nu.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Meyinggung perasaan umat, menunjukkan bahwa tidak

		menghakimi sendiri, karena soal menista atau tidak masuk kajian hukum.
--	--	--

14. Judul:Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Pemeriksaan kasus Ahok. Sumber: Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Ahok, Pengacara dan Kombes Pol Rikwanto. Penutup: Gelar Perkara terbuka dilaksanakan segera.
Struktur Skrip	5W+1H	Kabereskrim Lakukan pemeriksaan. Tokoh:

		Kabereskrim Polri, Ahok, pengacara, Kombes Pol Rikwanto. Di Mabes Polri, Senin (7/11). Karena terkait gelar perkara kasus Ahok. Pemeriksaan berjalan lancar.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Kabereskrim Polri, Ahok, Sirra Prayuna, Kombes Pol Rikwanto. Memaparkan pemeriksaan lebih detail, dilakukan selama 9 jam. Selain itu pemeriksaan terkait barang bukti. Serta rencana gelar perkara terbuka akan dilakukan secepatnya.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Lebih detail, menunjukkan lebih memperjelas dan

		mendalam penanganan kasus Ahok.
--	--	---------------------------------

15. Judul:Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Aksi Demo 212. Sumber: Kapolri. Penutup: kalau ada maksud menguasai DPR, maka itu melanggar hukum, ada pasal makar.
Struktur Skrip	5W+1H	Indikasi Agenda Makar dalam Demo 212. Tokoh: Kapolri. Di Kebayoran Baru, dalam jumpa pers Senin (21/11). Karena

		aksi itu tidak ada relevansinya sebab Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian akan melarang aksi tersebut.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks ini memuat pernyataan Kapolri Tito Karnivan, terkait aksi demo 212 tidak ada relevansinya dengan kasus Ahok yg sudah ditangani hukum. Selain itu mencium agenda makar, diduga ada tujuan berupaya menjatuhkan pemerintah. Serta aksi berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Makar, kata yang menunjukkan ada agenda tersembunyi dalam aksi demo 212, berupaya menjatuhkan pemerintah.
-------------------------	---------------------	---

16. Judul:Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: penegakkan hukum kasus Ahok. Sumber: Robikin Emhas. Penutup: Kebebasan dan kemandirian hakim dimaksudkan agar hakim dapat

		menemukan kebenaran dan keadilan hukum.
Struktur Skrip	5W+1H	Pemberian kesempatan kepada hakim menegakkan hukum kasus Ahok dengan adil. Tokoh: Robikin Emhas. Karena secara amandemen UUD 1945 Indoensia bukan hanya negara hukum, namun juga negara demokratis. Menyerahkan penuntasan perkara di tangan lembaga yudikatif tanpa intervensi. Di Jakarta, 1 Desember 2016.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar	Teks memuat pernyataan Robikin

	kalimat	Emhas, meminta masyarakat memberi kesempatan kepada para hakim yang akan menyidangkan kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu menjelaskan profesionalisme Polri dalam penyidikan kasus Ahok. Serta menegaskan proses peradilan tidak boleh dipengaruhi, apalagi diintervensi.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Campur tangan, makna konotatif, yang memiliki makna intervensi. Dalam kontek berita mandiri dan bebas dari intervensi.

17. Judul:Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Doa Bersama 2 Desember. Sumber: jamaah perempuan, pedagang. Penutup: Pedagang keliling memanfaatkan situasi untuk menggelar dagangannya.
Struktur Skrip	5W+1H	Doa bersama di penuh massa. Oleh massa sebagian besar berbaju putih. Di Monas Jakarta, Jumat (2/12). Terkait kasus Ahok, agar Ahok ditahan. Massa bergerak, berjalan kaki menuju Monas, dipandu oleh orator agar jamaah mengikuti komando.

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks mendiskripsikan kondisi Monas yang padat karena banyaknya massa yang hadir dalam doa bersama, terdapat kantor-kantor milik pemerintah maupun swasta ditutup. Selain itu penyediaan fasilitas umum untuk para jamaah yang diperlukan. Serta menceritakan momen tersebut digunakan oleh pedagang untuk meraup rezeki.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Menahan diri, menahan nafsu, dapat diartikan agar tidak bertindak gegabah atau buru-buru. Insting bisnis, naluri para pedagang untuk membuka usahanya karena banyak jamaah

		sebagai pangsa pasar.
--	--	-----------------------

18. Judul:Kapolri Minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Kapolri Minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Aksi Doa bersama 212. Sumber: Kapolri Tito Karnavian. Penutup: Sebagian massa sudah mendatangi Monas dan masjid Istiqlal sejak Kamis (1/12).
Struktur Skrip	5W+1H	Kapolri minta massa dukung proses hukum Ahok. Tokoh: Kapolri. Di Monas, dalam sambutan aksi doa bersama. Karena sudah

		maksimal menangani kasus Ahok. Kapolri meminta massa untuk berdoa bersama agar, mengajak umat beribadah dengan sungguh-sungguh, serta mendukung proses hukum Ahok.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks memuat pernyataan Kapolri, untuk mendukung proses hukum Ahok, dengan mengajak berdoa bersama dan beribadah sungguh-sungguh. Serta ada tanggapan dari massa terkait pernyataan Kalpori.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Buktikan-buktikan, konteks ini massa meminta pembuktian yang nyata dari

		Kapolri.
--	--	----------

19. Judul:Greg Fealy Ungkap Kecenderungan paham
Keagamaan karena Pengaruh Medsos

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Greg Fealy Ungkap Kecenderungan paham Keagamaan karena Pengaruh Medsos. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Ketidapkahaman masyarakat pada substansi kasus Ahok. Sumber: Greg Fealy. Penutup: Greg Fealy juga memaparkan pandangan terkait Peta Gerakan Islam Indonesia Kontemporer.
Struktur Skrip	5W+1H	Kecenderungan paham keagamaan karena pengaruh medsos. Tokoh: Greg Fealy. Dalam

		<p>kegiatan Tadarus Islam Nusantara, di Jakarta. Sebab arus informasi (medsos) tidak terbendung, tanpa cek dan konfirmasi masyarakat terpengaruh terhadap persoalan agama. Dengan mengikuti aksi 212 dan memberikan pertanyaan substansial kepada peserta aksi.</p>
<p>Struktur Tematik</p>	<p>Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat</p>	<p>Teks memuat pernyataan Greg Fealy, pemaparan terkait pengaruh arus informasi (medsos) terhadap masyarakat terkait persoalan keagamaan. Fenomena 212 tidak luput dari pengaruh medsos, karena masyarakat tahu dari medsos yang viral tanpa kroscek.</p>

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Tak terbandung, maksudnya tidak terkontrol. Arus informasi mempengaruhi pemahaman publik dan gerak keagamaan.
-------------------------	---------------------	---

20. Judul:Ahok Divonis Dua tahun, PBNU Hormati Proses Hukum

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil pengamatan
Struktur Sintaksis	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup	Ahok Divonis Dua tahun, PBNU Hormati Proses Hukum. Menekankan unsur <i>what</i> . Latar: Putusan Pengadilan kasus Ahok. Sumber: Robikin Emhas. Penutup: Menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap

		hukum itu sendiri.
Struktur Scrip	5W+1H	Vonis Kasus Ahok. Tokoh: Robikin Emhas. Vonis dua tahun penjara karena bersalah telah melakukan penodaan agama. Mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum, serta tidak mengeluarkan hujatan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat	Teks memuat vonis terkait proses hukum Ahok. Pernyataan Robikin Emhas siapapun harus tunduk kepada hukum, sesuai prinsip supremasi hukum. Menghormati proses hukum Ahok.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar	Tunduk dan patuh, harus menghormati putusan pengadilan sebagai negara hukum, harus menjalankan hukum yang berlaku.
-------------------------	---------------------	--

D. Perbandingan Konstruksi Berita Republika.co.Id dan Nu.Or.Id

1. Perspektif Pemerintah dan Ulama

Topik pemberitaan yang muncul di Media Republika.co.id yang berhubungan dengan Perspektif Pemerintah dan Ulama sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Publikasi	Judul Berita
1/11/ 2016 16: 04 WIB	Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok
4/ 11/ 2016 18:37 WIB	Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat
4/ 11/ 2016 20:16 WIB	Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November
7/ 11/ 2016 10:36 WIB	Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Transparan

10/12/ 2016 10:54 WIB	Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III
--------------------------	---

Sedangkan topik pemberitaan yang muncul di media NU.Or.Id yang terkait dengan Perspektif Pemerintah dan Ulama sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Publikasi	Judul Berita
4/ 11/ 2016 18: 44 WIB	Wapres: Ahok Akan Diproses secara Tegas dan Cepat
7/ 11/ 2016 12: 26 WIB	Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok
7/ 11/ 2016 16: 09 WIB	Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam

Republika.co.id memilih tema-tema terkait perspektif pemerintah dan ulama menghadirkan tokoh petinggi negara, pemerintah daerah dan tokoh agama. Konstruksi berita pada Republika memiliki bagan headline, lead dan body berita. Headline Republika.co.id mayoritas merupakan *banner headline*. Headline dibuat gagah dan kuat, dalam arti hurufnya terbesar dan lebih tebal. Lead berita lebih menekankan pada unsur *what*. *What* menekankan apa yang terjadi, apa yang

diberitakan, apa yang penting dari peristiwa. Penyusunan berita berbentuk piramida terbalik, menulis hal yang terpenting di awal paragraf berita diikuti dengan penjabaran atau keterangan terkait peristiwa yang diliput. Berita merupakan jenis *straight news* merupakan berita langsung, Berita dapat ditulis dengan memenuhi unsur 5W+1H (*what, who, when, where, why, + how*). Nilai berita memiliki *consequencies*, berita memiliki dampak atau akibat. *Timeliness* memiliki arti kebaruan atau aktualitas, terlihat dari waktu posting dan kejadian peristiwa. *Prominence* yaitu melibatkan tokoh terkemuka, orang penting atau orang terkenal. Berita memuat narasumber atau tokoh seperti Presiden, wakil presiden, dan tokoh agama yang terkenal. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id dalam peliputan berita adalah *people trail*, yaitu sumber orang yang berkaitan dengan perkara atau peristiwa.

Sementara itu, Konstruksi berita pada Nu.Or.Id memiliki bagan headline, lead dan body berita. *banner headline* dalam arti tampilan hurufnya besar dan lebih tebal. Lead berita lebih menekankan pada unsur *what*. *What* menekankan apa yang terjadi. Penyusunan berita berbentuk piramida terbalik. Berita merupakan jenis *straight news* merupakan berita langsung. Berita memenuhi unsur 5W+1H (*what, who, when, where, why, + how*). Sumber berita yang digunakan oleh Nu.Or.id adalah *people trail*, namun pemilihan

sumber ini Nu online cenderung menonjolkan tokoh pada lembaga NU.

Strategi yang dibangun oleh Republika.co.id dan Nu.or.id melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Struktur Sintaksis

Headline berita lebih menekankan penyorotan kasus Ahok oleh pemerintah digiring ke arah hukum, sebagai solusinya. Memunculkan tokoh seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memiliki kekuasaan dan dicurigai oleh publik bahwa melindungi Ahok dari jeratan hukum. Hal ini dibantah oleh Presiden dengan munculnya berita agar gelar perkara kasus Ahok dilaksanakan transparan. Diperkuat dengan berita yang meyakinkan bahwa Presiden tidak akan intervensi. Sedangkan Nu.Or.id menurunkan tiga berita dengan porsi dua pejabat pemerintah yaitu presiden dan satu tokoh agama terkemuka di Nahdlatul Ulama. Nu.Or.Id membangun berita dengan menekankan pemerintah menaruh perhatian pada kasus dugaan penodaan agama, namun menunjukkan sikap netral. Berita yang dikonstruksi media terlihat pada *“Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok”*. Judul tersebut menegaskan upaya pemerintah untuk menjaga kehormatan dan menarik kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga peduli terhadap aspirasi rakyat, dengan menghadirkan berita *“Wapres: Ahok*

Akan Diproses secara Tegas dan Cepat”. Berita tersebut memiliki gambaran bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat untuk mengadili Ahok. Tokoh Agama atau ulama yang dihadirkan NU.or.id merupakan ketua organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, yang tidak lain merupakan masih tokoh dalam dari media. Meski demikian, ulama tidak membenarkan ataupun menyalahkan Ahok telah menodai Islam. Pihaknya hanya menunjukkan bahwa pernyataan Ahok dalam pidato di kepulauan Seribu telah menyinggung umat Islam.

b. Struktur Skrip

Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama terkait Al Maidah 51, akan diproses hukum secara tepat dan cepat. Hal ini tidak lepas dari desakan massa yang menginginkan Ahok agar diproses hukum dengan adil tanpa intervensi dari pihak yang ingin melindungi Ahok dari jeratan hukum. Sebagian massa yang beraksi di Jakarta pada tanggal 4 November 2016, menuntut Ahok agar diadili ke pengadilan dan dipenjarakan. Apresiasi diberikan oleh Buya Syafii Ma'arif karena aksi unjuk rasa berjalan tertib. Buya meminta dugaan kasus penodaan agama itu benar-benar dikaji dan harus bersikap adil kepada semua pihak. Pengusutan kasus Ahok di ranah hukum menjadi perhatian Presiden RI. Presiden meminta Kepala Kepolisian RI untuk melakukan gelar kasus Ahok dilakukan terbuka agar syak

wasangka masyarakat tidaklah benar jika dialamat kepada pemerintah. Pemerintah dalam kasus Ahok mencoba profesional dan tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dipertegas Republika.co.id mengatakan,

“Presiden Joko Widodo memastikan tak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh pejabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Merdeka.”

Sejalan dengan Republika.co.id, Nu.or.id menghadirkan berita yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral dan profesional dalam kasus Ahok. Nu.Or.Id berupaya menjawab sikap skeptis masyarakat terhadap penanganan kasus Ahok oleh pemerintah. Dalam hal ini NU.Or.Id mengatakan:

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan instruksinya agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka, ditujukan untuk menghindari adanya "syak wasangka" atau prasangka buruk.”

Nu.Or.Id menghadirkan ulama netral dengan tidak memihak Ahok maupun massa yang menuntut Ahok. Kiai Said Aqil Siroj dihadirkan sebagai solusi untuk menangani kasus Ahok dilimpahkan kepada hukum. Hukum

merupakan peradilan yang diharapkan seadil-adilnya untuk menyelesaikan kasus dugaan penodaan agama.

c. Struktur Tematik

Ada dua tema yang dihadirkan masing-masing media. *Pertama*, sikap pemerintah terhadap kasus Ahok. *Kedua*, dukungan ulama terhadap kasus Ahok ditangani hukum. Kehadiran presiden dan wakil presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia, merepresentasikan bahwa sikap pemerintah tercermin dari apa yang dilakukan atau dikatakan oleh presiden dan wakil presiden. Sedangkan ulama yang dihadirkan sama-sama menaruh perhatian pada kasus Ahok, namun Nu.or.id menonjolkan sikap ketidakberpihakan.

d. Struktur Retoris

Penggunaan tak intervensi yang bermakna tidak mencampuri ranah hukum apabila Ahok ditangani oleh pihak yang berwajib. Kata transparan, bermakna kasus Ahok digelar secara terbuka.

2. Perspektif Hukum dan Politik

Topik pemberitaan yang muncul di Media Republika.co.id yang berhubungan dengan Perspektif Hukum dan politik sebagai berikut:

Tanggal & Waktu	Judul Berita
--------------------	--------------

Publikasi	
10/10/ 2016 10:12 WIB	Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 tak Dilanjutkan
24/10/ 2016 11:54 WIB	Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51
1/ 11/ 2016 13:14 WIB	Gelar Perkara kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli
3/ 11/ 2016 07:32 WIB	Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah
7/ 11/ 2016 18: 39 WIB	Ahok disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya
8/ 11/ 2016 13.00 WIB	Ahok Diperiksa 9 jam
1/ 12/ 2016 18:21 WIB	Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai
2/ 12/ 2016 10:14 WIB	Kapolri: Apa yang Kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal
2/ 12/ 2016 10:29 WIB	Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok
9/ 05/ 2016 12:05	Ahok Divonis 2 tahun, hakim: Pidana tidak terkait Pilkada DKI

Topik pemberitaan yang muncul di Media NU.Or.Id yang berhubungan dengan perspektif hukum dan politik sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Publikasi	Judul Berita
10/10/2016 11:14 WIB	Ahok Minta Maaf Kepada Umat
13/10/ 2016 16:30 WIB	Waspada! Skenario Adu Domba di Jakarta!
24/10/ 2016 14:05 WIB	Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi Al Maidah 51
1/ 11/ 2016 14: 11 WIB	Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok
3/ 11/ 2016 04.00 WIB	Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November
7/ 11/ 2016 11: 47 WIB	Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok
8/ 11/ 2016 11: 45 WIB	Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok
21/11/ 2016 17:27 WIB	Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember
1/ 12/ 2016 21:48 WIB	Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan

	Keadilan
2/ 12/ 2016 12:01 WIB	Kapolri Minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok
9/ 05/ 2017 12:30 WIB	Ahok Divonis Dua tahun, PBNU Hormati Proses Hukum

Republika.co.id menghadirkan topik berita dengan dua narasumber yang representatif, yaitu Ahok sebagai pihak yang tersandung hukum dan kepolisian yang menangani perkara. Sedangkan Nu.or.id menghadirkan berita lebih bervariasi tidak hanya hukum yang disorot, tapi juga agenda politik dalam wacana.

Republika.co.id dan Nu.or.id melakukan konstruksi berita sebagai berikut:

a. Struktur Sintaksis

Headline Republika.co.id memaparkan penanganan dugaan kasus penodaan agama oleh Ahok dari awal penyidikan, proses hukum sedang berjalan hingga vonis pengadilan bersalah. Sumber yang dihadirkan merupakan orang yang terkait langsung dengan masalah yaitu Ahok dan pihak kepolisian. Permintaan maaf Ahok agar tidak dilanjutkan, upaya dirinya untuk meredam kasus ke ranah hukum. Judul-judul Republika.co.id detail menyoroti proses hukum Ahok, dari kedatangan Ahok ke Bareskrim Polri hingga penyidikan untuk tindak lanjut kasus ke depan.

Pemeriksaan Ahok diwacanakan secara hati-hati terlihat dari pemilihan judul *Republika.co.id* menampilkan “*Gelar Perkara kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli*”, “*Ahok disuguhkan 22 pertanyaan, ini hasilnya.*” “*Ahok diperiksa 9 jam*” memperlihatkan kepolisian bertindak tegas dan serius dalam menangani kasus Ahok. Begitu pula *Republika.co.id* dalam menyoroti kinerja kepolisian, judul yang disajikan memperlihatkan pihaknya sudah maksimal dalam menangani kasus Ahok dan menetapkan sebagai tersangka. Topik yang mendukung maksimalnya kinerja kepolisian ditunjang dengan lead ajakan doa bersama kepada masyarakat,

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengikuti doa bersama dengan ribuan massa Aksi Bela Islam jilid tiga di lapangan silang Monas, Jumat (2/12). Tito meminta dukungan masyarakat agar upaya Polri dalam menegakkan kasus hukum tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum

Berbeda dengan *Nu.or.id* yang menampilkan tidak hanya dari segi persoalan hukum, ternyata wacana kasus Ahok tersisipi persoalan politik. Hal ini terlihat pada beberapa judul seperti “*Waspadai Skenario Adu Domba di Jakarta*”, “*Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November*” dan “*Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember*”. Judul-judul yang ditampilkan

Nu.co.id menekankan bahwa kasus Ahok bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, hal ini didukung dengan pernyataan penutup yaitu,

“Anasir-anasir kelompok radikal akan berkumpul dengan memanfaatkan persoalan Ahok menjadi pintu masuknya. Namun, yang dituju bukan soal Ahok, tapi lebih besar dari itu,” ungkapnya. Karena itu, tandas Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) ini, waspada dengan skenario adu domba yang sudah mulai terasa. Bukan soal Ahok dan Pilkada DKI, tapi ini soal keutuhan bangsa.

Nu.or.id juga menyoroti dalam bidang hukum, kasus Ahok yang dibawa ke ranah hukum menjadi perhatian media karena kasus penodaan agama ini menjadi citra lembaga hukum di Indonesia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini terlihat pada judul *”Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan”* Nu.or.id mewacanakan bahwa hukum di Indonesia masih mempunyai marwah, dan masyarakat harus menghormati hukum yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dengan berita yang menampilkan Kapolri mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum Ahok. Terkait penjatuhan vonis Ahok, Nu.or.id mengajak untuk menghormati keputusan hakim, bagi terdakwa Ahok maupun pihak yang menuntut, bisa menerima dan menjalankan dengan lapang.

b. Struktur Skrip

Republika.co.id menghadirkan berita-berita memiliki kelengkapan 5W+1H. Topik Republika.co.id menjelaskan dengan detail langkah demi langkah kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok terkait Al Maidah 51. Pemanggilan Ahok datang ke Bareskrim merupakan upaya awal untuk menggali keterangan lebih dalam. Ahok disuguhi 22 pertanyaan, Ahok diperiksa selama 9 jam, selain itu melibatkan saksi ahli yang mumpuni dibidangnya menunjukkan upaya pihak yang berwajib menindak hukum secara profesional tidak gegabah dan tidak asal. Hal ini terlihat upaya Republika.co.id menghadirkan skrip sebagai berikut,

Analisis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, ada 22 pertanyaan yang ditanyakan penyidik pada pemeriksaan kedua Ahok pada hari ini. Sehingga jika digabungkan dari pemeriksaan sebelumnya, total ada 40 pertanyaan penyidik kepada Ahok."Ada beberapa kata yang memang terucap di situ, lalu disunting seseorang dan dijadikan viral, yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama, dan menjadi masalah bagi umat Islam, jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap dan komprehensif," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/11).

Pernyataan tersebut menggambarkan pihak kepolisian melaksanakan tugas dengan hati-hati dan komprehensif. Komitmen untuk menindak hukum secara maksimal

dihadirkan oleh Republika karena kasus ini dipayungi oleh hukum, dan sudah seharusnya ditangani secara maksimal tanpa berat sebelah pihak.

Nu.or.id menceritakan kasus Ahok pada khalayak tidak hanya dari segi hukum, namun adanya kepentingan agenda lain oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Ahok, tidak menyukai tatanan pemerintahan di Indonesia dan berpotensi mengancam keutuhan bangsa.

Nu.or.id memuat kepentingan itu dalam aspek politik khilafah, agenda tersebut dipertegas dengan pernyataan Nu.or.id

Hal ini dijelaskan oleh Kapolri karena isu penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berkembang ke arah yang lebih dari sekadar melakukan demo menuntut Ahok. Padahal Kepolisian saat ini sedang memproses kasus Ahok tersebut. “Kalau saya lihat, demo ini terpicu oleh beberapa hal, pertama kelompok yang memang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Basuki Tjahaja Purnama; kedua, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama; dan ketiga, agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah,” ungkap Kapolri, Rabu (2/11).

Selain itu, Nu.or.id menyoroti di ranah hukum pada kasus Ahok. Penanganan kasus dugaan penodaan agama dilakukan dengan maksimal, hal ini senada dengan Republika. Nu.or.id meliput dari awal penyidikan, proses

berjalan hingga vonis hukuman untuk Ahok selama dua tahun. Dalam pemberitaannya Nu mewacanakan bahwa kepolisian sudah sangat baik dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka, dan melakukan penyidikan sesuai target jadwal yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu selama dua pekan. Proses peradilan Nu memberikan porsi lebih sedikit daripada Republika, hal ini karena Nu melihat ada agenda lain dibalik kasus Ahok. Terkait vonis Ahok Nu.or.id menegaskan dengan menghadirkan sumber dari lembaganya yaitu,

Terkait proses hukum tersebut, Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas berkomentar, sebagai negara hukum, siapa pun harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Untuk itu, apa pun putusan hakim, katanya, harus dihormati.

Bagi Nu.or.id kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Hal ini ditekankan karena pentingnya menghormati hukum yang berlaku.

c. Struktur Tematik

Tema yang dihadirkan pada kedua media ada persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum dan politik. Republika mengekpos kasus Ahok di ranah hukum dengan memberitakan runtutan prosesnya. Sedangkan

Nu.or.id mewacanakan dua ranah yaitu proses hukum Ahok dan politisasi kasus Ahok.

d. Struktur Retoris

Kata yang ditekankan adalah yang terkait dengan hukum. Seperti vonis, yang bermakna putusan hakim dalam sidang kasus penodaan agama yang menyatakan Ahok bersalah dan dituntut dua tahun penjara. Hal ini memperjelas kasus yang berakhir dengan bersalahnya Ahok dalam perkara penodaan agama. Selain itu kata khilafah atau negara Islam yang merupakan agenda yang ditekankan oleh NU.or.id.

3. Perspektif Sosial Keagamaan

Topik pemberitaan yang muncul di Media Republika.co.id yang berhubungan dengan Perspektif sosial keagamaan sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Publikasi	Judul Berita
12/10/ 2016 14:00 WIB	MUI Minta Polisi Tindak Aksi Penodaan Agama
13/10/ 2016 15:14 WIB	Unjuk Rasa di Monas, HTI: Tangkap Ahok.

26/10/ 2016 17:32 WIB	Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap Keagamaan MUI
7/ 11/ 2016 12.20WIB	GNPF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi Lanjutan
21/11/ 2016 15:42 WIB	Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum

Topik pemberitaan yang muncul di Media NU.Or.Id yang berhubungan dengan perspektif sosial keagamaan sebagai berikut:

Tanggal & Waktu Publikasi	Judul Berita
12/10/ 2016 12:02 WIB	Sikapi Pernyataan Ahok, Ketum PBNU: Tak Boleh Emosional
26/10/ 2016 19:52 WIB	Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok
1/ 11/ 2016 15: 38 WIB	PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok
4/ 11/ 2016 20:03 WIB	PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada Proses Hukum
2/12/ 2016 10: 10 WIB	Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat

10/12/ 2016 09:30 WIB	Greg Fealy Ungkap Kecenderungan paham Keagamaan karena Pengaruh Medsos
--------------------------	--

Republika.co.id menghadirkan topik aksi gerakan massa oleh organisasi masyarakat. Selain itu klarifikasi dari tokoh ormas terkait kasus penodaan agama oleh Ahok. Nu.or.id menghadirkan topik gerakan massa keagamaan yang disoroti oleh tokoh ormas. Kedua media menghadirkan wacana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Struktur Sintaksis

Republika.co.id menyajikan headline berita dengan menonjolkan narasumber dari ormas Islam seperti MUI, HTI dan GNPf-MUI, selain itu Kapolri menyoroti aksi gerakan massa. MUI lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membina dan mengayomi seluruh muslim di Indonesia. HTI dan GNPf-MUI merupakan organisasi yang mengklaim organisasinya berideologi Islam, tujuan HTI ingin membentuk negara Islam. Gerakan aksi massa yang dipelopori oleh HTI dan GNPf-MUI dimuat oleh Republika.co.id yang menyuarakan dengan keras untuk menangkap dan mengadili Ahok karena telah menodai Islam. Hal ini diungkapkan oleh Republika pada headline “*Unjuk Rasa di*

Monas, HTI: Tangkap Ahok.” Selain itu, headline “GNPF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi Lanjutan” menegaskan bahwa GNPF mengawal kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Lain halnya dengan MUI, sebagai lembaga yang menjadi rujukan muslim Indonesia Republika menghadirkan headline “Kiai Ma’ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok”. Nu.or.id berbeda dengan Republika.co.id. yang menonjolkan narasumber dari pihak NU, MUI, dan Associate Profesor Australian National University (ANU) Greg Fealy. Headline Nu.or.id menghadirkan kubu yang ingin meredam massa yang emosional. Terlihat pada judul “Sikapi Pernyataan Ahok, Ketum PBNU: Tak Boleh Emosional” dan juga mengapresiasi jalannya unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam dan sebagian umat Islam yang demo di Jakarta dengan tertib dan damai. Selain itu Nu.or.id mengungkapkan pengaruh media sosial terhadap kecenderungan paham keagamaan dalam melakukan aksi massa.

b. Struktur Skrip

Republika.co.id membuat wacana aksi gerakan massa oleh ormas Islam yang cenderung untuk mengadili Ahok di ranah hukum. Hal ini diperjelas dengan muatan berita sebagai berikut,

Sekelompok massa aksi itu terus meneriakkan 'tangkap Ahok'. Mereka menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengobati rasa sakit yang dihadapi umat Islam. Apalagi, ke depannya dikhawatirkan Ahok akan melakukan hal yang sama lagi. "Tangkap dan hukum Ahok! Karena secara blak-blakan telah menodai Alquran. Kami menuntut agar ditangkap dan menghukum penghina Alquran, Takbir!," ujarnya.

Kelompok HTI dalam memandang kasus ini tidak kenal kata toleransi, dan tegas harus dihukum karena telah melakukan penodaan terhadap Al Quran. Selain itu kelompok ini menyinggung negara khilafah, hal ini tercermin dari isi berita sebagai berikut,

Kami merasa tersakiti dengan Ahok. Karena itu perlu disampaikan kepada saudara Ahok agar secara jantan dirinya menyerahkan diri kepada penegak hukum, sebagai bentuk permintaan maaf," kata perwakilan anggota HTI dari kalangan pelajar, Khairul Gunawan di tempat yang sama. Menurutnya, saat ini umat Islam tidak boleh tinggal diam dengan pelecehan ayat Alquran yang dilakukan Ahok. Ia bahkan sempat menyuarakan negara khilafah. "Kita menuntut Ahok agar mendapat hukuman dan kedua kita berjuang untuk negara khilafah yang akan menghancurkan orang zalim," katanya.

Pandangan fundamentalis, menonjolkan simbol-simbol distinktif Islam adalah suatu keharusan. Sebutan negara Islam atau pun Islam sebagai dasar negara adalah

sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.¹³² Sementara GNPF-MUI bertekad untuk mengawal kasus Ahok sampai tuntas. Tidak ada toleransi dalam menghukum Ahok karena telah menodai Al Quran, jika ada keringanan terhadap Ahok, maka pihaknya akan terus melakukan aksi massa menuntut Ahok supaya diadili dan dipenjara.

Berbeda dengan Nu.Or.id, wacana yang dirangkai merupakan apresiasi terhadap gerakan massa karena berlangsung tertib dan damai. Hal ini menunjukkan perhatian memang sepatutnya sebagai muslim Indonesia harus demikian. Tidak anarkis dalam menyikapi persoalan, dan dibawa ke ranah hukum serta menghormati proses hukum. Hal ini tersaji dalam pesan sebagai berikut,

Menurut dia, demonstrasi yang akan digelar tersebut adalah hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. “Tapi demonstrasi yang beretika, tidak anarkis, tidak merusak; demonstrasi yang bermartabat, itu indikasi masyarakat yang sudah maju dan dewasa,” jelasnya. Ia menambahkan, PBNU sepakat untuk segera memproses hukum yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika ada penistaan agama dilakukannya. “Segera ada proses hukum supaya jelas. Kalau ada diproses kan berangkat dari nol, saksi diundang, fakta-fakta dikumpulkan. Nanti penyidik akan menyimpulkan ada tidak penistaan agama, kalau ada seperti apa sanksinya, kalau tidak ada bagaimana,

¹³²Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta, Paramadina: 1999), 308

jangan dibiarkan tergantung seperti ini. Nanti tidak akan habis-habis, demo, protes,” tegasnya.

c. Struktur Tematik

Republika.co.id dan Nu.or.id mengemas tema pemberitaan secara berbeda dalam perspektif sosial keagamaan. Republika.co.id menghadirkan tema aksi massa atau gerakan massa oleh ormas Islam untuk menuntut Ahok ke jalur hukum. Sedangkan Nu.Or.id memandang aksi gerakan massa sebagai proses demokrasi.

d. Struktur Retoris

Republika menekankan aksi bela Islam sebagai aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi umat Islam dalam menuntut Ahok diadili. Sedangkan Nu.Or.Id menekankan aksi gerakan massa sebagai demonstrasi sebagai hak warga negara.

BAB IV
KECENDERUNGAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN
PENODAAN AGAMA KASUS AHOK DI JAKARTA

A. Analisis Framing Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id

1. Frame Republika.co.id dan Nu.or.id Perspektif Pemerintah dan Ulama
 - a. Berita Republika.co.id ada lima judul antara lain:
 - 1) Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok, 1 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id bernada netral dan tidak ada intervensi. Hal ini didukung dengan lead berita yang menyatakan:

Presiden Joko Widodo memastikan tak intervensi terhadap proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh pejabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Istana Merdeka.

Hal ini terlihat pemakaian sumber yang dipakai oleh media adalah Presiden RI tidak lain orang nomor satu di Indonesia yang memiliki kekuasaan. Selain itu sumber pendukung berita yaitu Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin yang

dinilai representatif bagi Republika.co.id. Pernyataan penutup dalam tema ini kutipan dari Wiranto” Ada proses yang tidak serta-merta. Kita ingin masyarakat memahami ini dan bersikap tenang.”

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Penegasan Presiden tidak intervensi kasus Ahok, (who) Presiden RI, Wiranto dan Ma'ruf Amin, (when) Selasa, 1 November 2016, (where) Istana Merdeka, (why) agar tidak menambah kekisruhan, diselesaikan secara profesional oleh penegak hukum. (How) Presiden menyampaikan tidak akan intervensi proses hukum Ahok saat melakukan pertemuan dengan para ulama.

Unit Analisis Tematik yaitu cara wartawan menulis fakta, penulisan berita dari awal sampai akhir, wartawan memberi tekanan terhadap presiden Joko Widodo bahwa ia tidak akan melakukan intervensi pada kasus Ahok dalam proses hukum, dan kasus ini sudah diproses oleh Polri.

Unit analisis Retoris yaitu cara wartawan menekankan fakta. Teks berita menekankan pada kata Presiden memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum Ahok. Gambar berita menunjukkan Presiden Joko Widodo sedang berbicara, foto diambil dari Reuters/Darren Whiteside.

- 2) Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat, 4 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id bernada netral dan tegas. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat. Didukung dengan pernyataan Wapres “ Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa. Saudara Ahok akan dilaksanakan proses hukum yang tegas dan cepat.” Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Selain itu terlihat pula anggota DPR dari Komisi III DPR, yakni Asrul Sani dan Abu Bakar Al Habsyi. Unjuk rasa 4 November yang dilakukan sejumlah ormas terkait dengan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Penegasan Wakil Presiden soal proses hukum Ahok akan ditindak tegas dan cepat, (who) Wakil Presiden Jusuf Kalla , (when) Jumat, 4 November 2016, (where) Jakarta, (why) Karena menanggapi aspirasi perwakilan dari para pengunjung rasa terkait kasus hukum Ahok. (How) Proses hukum Ahok akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap wakil presiden Jusuf Kalla bahwa kasus Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat.

Lebih lanjut wapres menargetkan dua pekan untuk menyelesaikan proses hukum Ahok.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata wakil Presiden bahwa Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat. Gambar berita menunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang berbicara di atas mimbar, namun terdapat keterangan pada mimbar Anugerah Hari Puisi Indonesia 2016, Foto: Republika/Yasin Habibi. Hal ini menunjukkan foto kurang mendukung pemberitaan terkait kasus Ahok.

3) Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November, 4 November 2016

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id bernada mendukung pada aksi bela Islam. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan

“Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga malam ini. Menurut Buya Syafii, unjuk rasa yang berpusat di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta, itu berlangsung tertib.”

Latar informasi yang dipakai oleh Republika.co.id adalah aksi bela Islam, menuntut keadilan dalam kasus Ahok terkait penodaan Al Quran. Sumber dalam berita ini adalah Buya Syafii, selaku ulama. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Usai waktu salat maghrib, massa

aksi demonstrasi yang menuntut penuntasan kasus dugaan agama oleh Ahok, jumat (4/11), akhirnya membubarkan diri secara bertahap.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Apresiasi Buya Syafii pada Aksi 4 November, (who) Buya Syafii Maarif, (when) Jumat, 4 November 2016, (where) Jakarta, (why) Karena menurut Buya aksi unjuk rasa itu berlangsung tertib, (how) Buya meminta penghinaan dan penistaan kasus Ahok benar-benar dikaji.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap Buya Syafii Ma'arif memberi apresiasi terkait aksi bela Islam yang berlangsung tertib. Penghinaan dan penistaan yang dilakukan oleh Ahok agar benar-benar dikaji.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Buya Syafii Ma'arif "Pelajari betul-betul" menunjukkan dalam menangani kasus Ahok harus benar-benar dikaji dan tidak gegabah. Kata "Kita harus bersikap adil" menunjukkan proses hukum diharapkan memberikan keadilan tanpa keberpihakan. Gambar: foto menunjukkan Buya Syafii Maarif sedang berbicara, foto diambil oleh reporter Republika.

4) Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Transparan, 7 November 2016

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id bernada netral dan tegas. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Presiden Joko Widodo meminta Polri agar melakukan proses pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan. Ahok akan diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri pada Senin (7/11) terkait kasus dugaan penistaan agama. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id yaitu Presiden RI, dan Kapolri Tito Karnavian. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Bareskrim Mabes Polri sejauh ini telah memanggil 22 orang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk saksi ahli yang diajukan terlapor. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan judul berita, upaya melakukan transparansi dalam kasus Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Presiden meminta pemeriksaan terhadap Ahok secara transparan, (who) Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Jakarta Timur, (why) agar tidak ada syak wasangka, (how) Presiden memanggil Kapolri untuk meminta Polri melakukan proses hukum terhadap Ahok secara terbuka.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap presiden Joko Widodo bahwa kasus Ahok akan diproses secara transparan. Kepolisian melakukan proses hukum Ahok secara terbuka. Hal ini demi meyakinkan publik bahwa pemerintah bersikap profesional dalam hal penegakkan hukum.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Presiden bahwa pemeriksaan terhadap Ahok secara transparan. Hal ini menunjukkan kasus Ahok ditangani secara terbuka untuk publik. Gambar: Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan LV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2016 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/11). Foto diambil dari Antara. Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, meskipun gambar memperlihatkan Presiden Joko Widodo sedang berbicara di atas mimbar berlogo Garuda.

- 5) Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III, 10 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id cenderung memihak massa bela Islam. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan,

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengungkapkan Pemprov DKI siap menyambut aksi bela Islam, yang isunya akan

digelar pada 25 November 2016. Sebab, berkaca dari sebelumnya, aksi yang berlangsung berjalan damai, semua bisa saling menjaga sehingga Jakarta tetap aman.

Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id Plt. Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, hal ini terkait pelaksanaan aksi massa bertempat di Jakarta, dan merupakan pemimpin sementara setelah Ahok non-aktif. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi 4 N yang dirasa belum menemukan ujung pangkal. Tuntutannya masih sama, yakni meminta Ahok dipenjara karena dianggap telah menistakan Al Quran. Hal ini menunjukkan seolah keberpihakan untuk menuntut keadilan terhadap kasus Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (who) Plt. Gubernur DKI Jakarta, Sumarsosno (when) Kamis, 10 November 2016, (where) Jakarta Selatan, (what) Kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut Aksi Bela Islam jilid III, (why) agar massa aksi merasa nyaman dalam menyampaikan aspirasi, (How) melayani demonstran dalam menyampaikan aspirasi.

Unit Analisis Tematik yaitu kesiapan Pemprov DKI menyambut Aksi Bela Islam Jilid III, dan pelayanan

kepada demonstran terkait aksi lanjutan 4 November. Wartawan menggunakan koherensi penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Plt. Sumarsono “Pemerintah Provinsi DKI siap” Hal ini menegaskan kesiapannya untuk menyambut aksi massa dalam menyampaikan aspirasi. Gambar: aksi massa demo Ahok. Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, meskipun gambar memperlihatkan aksi demonstrasi tapi kurang akurat terkait isi berita yang ditulis. Foto diambil dari lapangan oleh Republika.

b. Berita Nu.or.id ada tiga judul antara lain:

- 1) Wapres: Ahok akan Diproses secara Tegas dan Cepat, 4 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id bernada tegas dan netral. Hal ini diperkuat dengan lead, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyatakan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) akan diproses tegas dan cepat. Didukung dengan pernyataan Wapres “ Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa. Saudara Ahok akan dilaksanakan proses hukum yang tegas dan cepat.” Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Selain itu terlihat pula anggota DPR dari Komisi III DPR, yakni Asrul Sani dan Abu Bakar Al Habsyi. Unjuk rasa 4 November yang dilakukan sejumlah

ormas terkait dengan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Unit analisis Skrip, bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Penegasan Wakil Presiden soal proses hukum Ahok akan ditindak tegas dan cepat, (who) Wakil Presiden Jusuf Kalla , (when) Jumat, 4 November 2016, (where) Jakarta, (why) Karena menanggapi aspirasi perwakilan dari para pengunjung rasa terkait kasus hukum Ahok. (How) Proses hukum Ahok akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap wakil presiden Jusuf Kalla bahwa kasus Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat. Lebih lanjut wapres menargetkan dua pekan untuk menyelesaikan proses hukum Ahok. Wartawan menggunakan koherensi penjelas dalam pemberitaan.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata wakil Presiden bahwa Ahok akan diproses hukum dengan tegas dan cepat. Gambar berita menunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang berbicara menggunakan alat pengeras suara, Ilustrasi: Ist, Hal ini menunjukkan foto kurang mendukung pemberitaan, meskipun gambar Jusuf Kalla yang ditampilkan namun bukan saat waktu kejadian dalam berita.

- 2) Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok, 7 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id bernada netral dan tegas. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Presiden Joko Widodo menyatakan instruksinya agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Ahok dilakukan secara terbuka, ditujukan untuk menghindari adanya syak wasangka. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Presiden RI, dan Kapolri Tito Karnavian. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk saksi ahli yang diajukan terlapor. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan judul berita, upaya melakukan keterbukaan kepada publik.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Presiden meminta pemeriksaan terhadap Ahok secara terbuka, (who) Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Jakarta Timur, (why) agar tidak ada syak wasangka, (how) Presiden memanggil Kapolri untuk meminta Polri melakukan proses hukum terhadap Ahok secara terbuka.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap presiden Joko Widodo bahwa kasus Ahok akan diproses secara terbuka. Kepolisian melakukan

proses hukum Ahok secara terbuka. Hal ini demi meyakinkan publik bahwa pemerintah bersikap profesional dalam hal penegakkan hukum. Wartawan menggunakan koherensi sebab-akibat.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Presiden bahwa pemeriksaan terhadap Ahok secara terbuka. Hal ini menunjukkan kasus Ahok ditangani secara terbuka untuk publik. Gambar: Presiden Joko Widodo sedang pidato serta melakukan gerakan tangan menunjuk. Foto: ilustrasi. Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, meskipun gambar memperlihatkan Presiden Joko Widodo, namun tidak sesuai keadaan dalam berita.

- 3) Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam, 7 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id berusaha tidak menghakimi terkait dugaan penodaan agama oleh Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berpendapat pernyataan Gubernur DKI Jakarta Non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok menyinggung perasaan umat Islam, bukan menistakan. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Di hadapan pengurus INTI, Kiai Said menegaskan sikap kebangsaan NU adalah

Moderat. Diminta atau tidak NU tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila. Hal ini menunjukkan Nu lebih bersikap netral tidak berpihak, dan tetap ingin menjaga perdamaian untuk kesatuan bangsa Indonesia.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Pernyataan Ahok menyinggung umat Islam, (who) Ketua Umum PBNU, Kiai Aqil Siroj, (when) Senin, 7 November 2016, (where) di gedung PBNU, (why) ia tidak mempermasalahkan agama, tapi ucapan Ahok yang tidak santun, (how) Kiai Said menyatakan ucapan Ahok menyinggung umat Islam, soal menista atau tidak serahkan pada pihak kepolisian.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan terhadap pernyataan Kiai Aqil Siroj. Pernyataan Ahok menyinggung umat Islam, bukan menistakan. Hal ini didasarkan asumsi bahwa yang berhak memutuskan Ahok bersalah atau tidak adalah di ranah hukum.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Kiai Said Aqil Siroj yaitu Ahok menyinggung perasaan umat Islam, bukan menistakan. Kalimat, ia tidak mempermasalahkan agama, tapi ucapannya. Wartawan dalam menulis teks berita ini menggunakan koherensi pembeda. Hal ini menunjukkan untuk tidak main hakim sendiri dalam kasus Ahok. Gambar: Kiai Aqil Siroj sedang berbicara dengan mimik muka serius sambil

menggerakan tangan ke depan. Hal ini menunjukkan gambar mendukung pemberitaan pada tema ini.

2. Frame Republika.co.id dan Nu.or.id Perspektif Hukum dan Politik

a. Berita Republika.co.id ada sepuluh judul, antara lain:

- 1) Minta maaf, Ahok Minta Kasus Al Maidah 51 tak dilanjutkan, 10 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan permintaan maaf Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada semua umat Islam terkait video berjudul “Ahok:Anda dibohongi Al Quran Surat Al Maidah 51”. Ia juga meminta kasus tersebut tak dilanjutkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Ahok mengaku bersalah dan minta maaf kepada umat Islam, serta permohonan untuk tidak memperpanjang masalah terkait Al Maidah 51. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan sumber yang terkait langsung dengan kasus dugaan penodaan agama. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Sebelumnya, Ahok mengucapkan maaf secara terbuka kepada umat Islam karena pernyataan saat berkunjung di Kepulauan Seribu.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok Minta Maaf dan memohon kasus Al Maidah 51 tidak dilanjutkan, (who)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, (when) Senin, 10 Oktober 2016, (where) Balai Kota, (why) karena mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara, (How) Ahok minta maaf terbuka dan tidak akan menyinggung lagi urusan agama.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan pada permintaan maaf Ahok kepada umat Islam. Ahok meminta kasus tidak dilanjutkan. Ahok mengklaim tindakannya tidak melecehkan umat Islam. Wartawan menggunakan koherensi penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok “Saya minta maaf untuk gaduh ini” Hal ini menegaskan keseriusan Ahok untuk meminta maaf karena telah membuat kegaduhan. Gambar: Ahok sedang pidato di Kepulauan Seribu. Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, meskipun gambar memperlihatkan aksi Ahok tapi kurang akurat terkait isi berita yang ditulis. Foto diambil dari youtube

- 2) Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51, 24 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan Ahok Kooperatif. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) datang ke Bareskrim Polri dan langsung didampingi oleh orang Bareskrim Polri. Sumber yang

digunakan oleh Republika.co.id adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan sumber yang terkait langsung dengan kasus dugaan penodaan agama, dan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Bareskrim Polri harus bertindak cepat memeriksa Gubernur DKI Jakarta (Ahok) atas kasus dugaan pelecehan Al Quran. Hal ini menunjukkan berita kontra terhadap Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok datang ke Bareskrim Polri, (who) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar., (when) Senin, 24 Oktober 2016, (where) Bareskrim Polri, (why) Klarifikasi kasus pulau Seribu soal Al Maidah 51, (How) Ahok mendatangi Bareskrim dan memberikan komentar soal surat Al Maidah 51 sebelum masuk lift.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan pada Kedatangan Ahok di Bareskrim dalam penyidikan dugaan penodaan agama. Bareskrim Polri harus bertindak cepat dalam kasus Ahok Wartawan menggunakan koherensi penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok “Kasus Pulau Seribu, soal Al Maidah 51” Hal ini menegaskan keseriusan kedatangan Ahok ke

Bareskrim upaya tindak lanjut terkait dugaan penodaan agama. Gambar: peserta aksi membentangkan poster di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada aksi demonstrasi umat Islam terkait pernyataan kontroversi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip salah satu ayat Alquran, Jumat (21/10). Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, tidak sesuai gambar dengan isi berita.

3) Gelar Perkara Kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli, 1 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan kasus Ahok diproses hukum. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok akan dilakukan usai penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Potongan video Ahok berbicara di hadapan warga kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena dirinya menyinggung adanya pihak yang melarang memilih pemimpin non-muslim berdasarkan isi dari surah Al Maidah 51.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Gelar perkara kasus Ahok, (who) Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy

Rafli Amar, (when) Selasa, 1 November 2016, (where) Jakarta, (why) Gelar perkara masih menunggu seluruh seluruh saksi ahli diminta keterangan, (How) Kepolisian sangat berhati-hati dalam menangani kasus Ahok, penyidikan tidak bisa diburu-buru.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin. Penyidik Polri telah memeriksa saksi pelapor. Penggunaan koherensi penjelas dalam berita ini.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Irjen Boy, polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin. Hal ini menegaskan keseriusan kepolisian menindak lanjut proses hukum Ahok secara profesional. Gambar: Sebuah petisi di change.org terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama (Ahok) soal Surah Al Maidah Ayat 51 yang menyinggung umat muslim. Gambar Ahok sedang pidato di Kepulauan Seribu. Hal ini menunjukkan gambar kurang mendukung pemberitaan pada tema ini, tidak sesuai gambar dengan isi berita.

- 4) Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah, 3 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh [Republika.co.id](https://republika.co.id) menekankan ketidaktepatan tuntutan pendemo kepada Presiden. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito

Karnavian menilai tuntutan pendemo yang mendesak Presiden untuk memenjarakan Ahok tidak tepat. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, selaku pihak pemroses hukum Ahok. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: unjuk rasa rencananya akan digelar di Jakarta Pusat.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Tuntutan penjarakan Ahok dinilai salah, (who) Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, (when) Rabu, 3 November 2016, (where) Jakarta, (why) pasalnya, presiden adalah pemimpin lembaga eksekutif, sedangkan kasus Ahok merupakan kewenangan yudikatif, (How) Tuntutan demonstran itu membuat presiden salah dalam intervensi teknis hukum.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin. Penyidik Polri telah memeriksa saksi pelapor. Penggunaan koherensi penjas dalam berita ini.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Kapolri, “Pak Presiden adalah pimpinan eksekutif bukan yudikatif” Kasus Ahok dalam teknis hukum dan domain dari yudikatif. Hal ini menegaskan ketidaksesuaian antara tuntutan dan jalur penanganan kasus Ahok. Gambar: Kapolri Tito Karnavian sedang

berdiri dan berbicara menggunakan alat pengeras suara mikrofon. Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Kapolri, meski demikian pengambilan gambar tidak sesuai waktu dan tempat dalam isi berita.

- 5) Ahok disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya. 7 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan proses hukum Ahok, namun bernada clickbait. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah memintai keterangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan kasus dugaan penistaan agama, selama kurang lebih sembilan jam penyidik mencecar Ahok terkait pernyataannya saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kombes Pol Rikwanto. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Pemeriksaan kedua Ahok disuguhkan 22 pertanyaan, (who) Kombes Pol Rikwanto, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Jakarta Selatan, (why) Menuntaskan pemeriksaan kepada Ahok sebagai saksi dalam kasus ini, (How) Penyidik mencecar Ahok terkait pernyataannya saat berkunjung di

Kepulauan Seribu, memeriksa secara lengkap dan komprehensif.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan polisi melakukan penyelidikan kasus Ahok. Kepolisian memeriksa sejumlah saksi berupaya menyelesaikan penyidikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepolisian mencecar Ahok dengan 22 pertanyaan, serta Kepolisian memeriksa hampir 25 saksi yang terdiri dari saksi pihak terlapor, pelapor, dan ahli. Penggunaan koherensi penjelas dalam berita ini.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata menuntaskan pemeriksaan Ahok. Hal ini menunjukkan Kepolisian bekerja cepat dan profesional dalam menangani kasus Ahok. Gambar: Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok keluar dari ruangan se usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11). Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Ahok dalam proses hukum. Pengambilan gambar sesuai dengan isi berita.

6) Ahok Diperiksa 9 Jam, 8 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan Ahok diproses hukum. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Sebagai

saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama. Ia diperiksa para penyidik selama sembilan jam. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna, Kombes Rikwanto, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Pendapat dan sikap keagamaan itu ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan harian setelah melalui kajian dari beberapa komisi dan putusannya ditandatangani langsung oleh Ketua MUI dan Sekjen MUI.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Pemeriksaan Ahok selama 9 jam, (who) Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna, Kombes Rikwanto, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Bareskrim Mabes Polri, (why) Menuntaskan pemeriksaan kepada Ahok sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama, (How) Penyidik memberikan 22 pertanyaan terhadap Ahok dan diperiksa selama 9 jam.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan polisi melakukan pemeriksaan terhadap Ahok selama 9 jam. Penyidik Bareskrim mendatangi Kantor MUI untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi Ketua MUI. Hal ini

berkaitan dengan lanjutan proses hukum Ahok dengan menuntaskan penyidikan dan mengklarifikasi pernyataan pendapat dan sikap keagamaan MUI terkait kasus dugaan penistaan agama.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok “Saya kira sudah jelas tadi sembilan jam diperiksa”. Lama waktu ditonjolkan menunjukkan ada banyak hal yang harus digali oleh penyidik, dan ingin mendapatkan data komprehensif. Gambar: Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok berjalan menuju kendaraannya se usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11). Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Ahok dalam proses hukum. Pengambilan gambar sesuai dengan isi berita.

- 7) Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai, 1 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan Ahok diproses hukum. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan,

Pertama kalinya tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka mulut pascapelimpahan tahap dua berkas perkara di Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, Ahok memilih bungkam sejak ditetapkan menjadi tersangka kasus penodaan agama pada (16/11) lalu oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan kliennya akan melaksanakan agenda selanjutnya, kembali melakukan blusukan. Hal ini menunjukkan meskipun proses hukum berjalan, tapi aktivitas Ahok sebagai calon gubernur DKI tetap berlanjut.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok meminta doa agar proses hukum selesai, (who) Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna, (when) Kamis, 1 Desember 2016, (where) Kejaksaan Agung RI, (why) Supaya proses hukum berjalan adil, terbuka, bisa selesai dari permasalahan penodaan agama dan Ahok bisa melayani warga Jakarta ke depan, (How) Ahok meminta doa proses hukum yang berlangsung dapat berjalan dengan adil dan terbuka, serta kooperatif memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan Ahok meminta doa agar proses hukum selesai. Ahok selama proses penyelidikan hingga penyidikan selalu kooperatif. Penggunaan koherensi dalam berita adalah sebab- akibat.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok “proses semua telah selesai”. Proses penyelidikan telah selesai terhadap Ahok, hal ini menunjukkan proses pelimpahan kasus dan tindak lanjut Kejaksaan Agung. Gambar: Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersiap memberikan keterangan usai pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Ahok dalam proses hukum. Pengambilan gambar sesuai dengan isi berita.

- 8) Kapolri: Apa yang kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal, 2 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan proses hukum Ahok oleh kepolisian sudah maksimal. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengikuti doa bersama dengan ribuan massa Aksi Bela Islam. Tito meminta dukungan masyarakat agar uaya Polri dalam menegakkan hukum sesuai prosedur. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Rencananya kasus penodaan agama ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan lokasi peristiwa awal mula kasus ini muncul.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Upaya kepolisian sudah maksimal terhadap Ahok, (who) Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian (Ahok), (when) Jumat, 2 Desember 2016, (where) lapangan Silang Monas, (why) proses hukum sudah selesai dan tersangkanya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, (How) Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (16/11), kemudian berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Agung RI.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan Kapolri Tito Karnavian upaya polri sudah maksimal terhadap Ahok. Kepolisian telah menyelesaikan proses hukum dan menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tito membandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang menjerat Ahok namun tidak bisa menjadi tersangka. Penggunaan koherensi dalam berita adalah pembeda.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Tito “apa yang kami lakukan sudah maksimal”. Proses penyelidikan telah selesai terhadap Ahok, dan menetapkan Ahok menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Gambar: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberi keterangan kepada wartawan di gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11). Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Kapolri Tito Karnavian di ranah hukum.

Pengambilan gambar meskipun menampilkan Kapolri, namun kurang sesuai dengan isi berita.

- 9) Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok, 2 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta massa Aksi 212 berdoa bersama mendukung proses hukum Ahok. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Acara doa bersama 2 Desember 2016 digelar di Monas mulai Jumat pagi dengan pembacaan zikir, shalawat, hingga solat Jumat berjamaah.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Kapolri meminta dukungan masyarakat luas terkait kasus Ahok, (who) Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian (Ahok), (when) Jumat, 2 Desember 2016, (where) Kawasan Monas, (why) agar proses hukum Ahok terus berjalan, (How) Kapolri meminta berdoa bersama-sama mengawal hukum Ahok.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan Kapolri Tito Karnavian meminta dukungan massa terkait proses hukum Ahok. Kapolri memberikan sambutannya, meminta

berdoa bersama-sama untuk proses hukum yang terus berjalan. Penggunaan koherensi dalam berita adalah Penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Tito “Saya sangat mohon dukungannya”. Upaya Kapolri untuk menghimbau massa agar mendukung proses hukum Ahok. Gambar: Sejumlah peserta aksi membawa poster saat long march menuju Monas untuk mengikuti aksi 212 atau 2 Desember di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (2/12). Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar aksi massa. Pengambilan gambar kurang sesuai dengan isi berita

- 10) Ahok Divonis 2 Tahun, Hakim: Pidana tidak terkait Pilkada DKI, 9 Mei 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan Ahok divonis bersalah dan hal itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Majelis hakim pada peradilan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan untuk memvonis Ahok dengan hukuman penjara selama dua tahun, hakim menyatakan Ahok terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Hakim ketua peradilan Ahok. Pernyataan penutup dalam teks berita ini:

Majelis hakim memutuskan untuk memidanakan Ahok dengan hukuman dua tahun penjara. Hal ini menunjukkan *supporting statement* sejalan dengan headline berita.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Hakim memvonis Ahok murni tindak pidana penodaan agama, (who) Hakim ketua peradilan kasus penodaan agama, (when) Selasa, 9 Mei 2017, (where) Auditorium Kementerian, (why) Ahok terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama dan kasus tidak terkait dengan Pilkada DKI, (How) dalam menentukan putusannya, hakim menimbang pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan hakim memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun. Kasus ini murni tindak pidana penodaan agama tidak terkait Pilkada DKI. Penggunaan koherensi dalam berita adalah Penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata hakim “ini bukan terkait pilkada, tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama”. Upaya hakim untuk memperjelas kasus Ahok, tidak dipengaruhi oleh isu Pilkada DKI. Gambar: Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama berbincang dengan kuasa hukumnya usai mendengarkan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). Dalam

sidang tersebut, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Hal ini menunjukkan upaya media mendukung berita dengan menghadirkan gambar Ahok dalam peradilan. Pengambilan gambar sesuai dengan isi berita.

b. Berita Nu.or.id ada sebelas judul, antara lain:

1) Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam, 10 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan permintaan maaf oleh Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang menyebut Al Quran Surat Al Maidah 51. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Ahok menyadari urusan agama adalah urusan pribadi yang tidak boleh dibicarakan di hadapan publik secara luas.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok meminta maaf atas ucapannya di Kepulauan Seribu, (who) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), (when) Senin, 10 Oktober 2016, (where) di Balai Kota DKI Jakarta, (why) karena menimbulkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam, (how) Ahok menegaskan dia tidak bermaksud menyinggung perasaan umat Islam apalagi menistakan agama.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan Ahok meminta maaf dan tidak ada maksud melecehkan Al Quran. Menjelaskan bahwa Ahok bukan anti Islam, dirinya berharap tidak ada warga yang salah menafsirkan Al Maidah 51.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada pernyataan Ahok, “yang pasti, saya sampaikan kepada umat Islam atau orang yang tersinggung, saya mohon maaf.” Ahok tidak ada maksud menyinggung perasaan umat Islam. Gambar: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang berbiacara di atas mimbar. Hal ini menunjukkan media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan Ahok sebagai tokoh yang terkait dalam berita.

- 2) Waspada! Skenario Adu Domba di Jakarta!, 13 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan ada agenda lain di balik kasus Ahok, berita menggunakan judul clickbait dengan bahasa bombastis. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, H Rumadi Ahmad mengungkapkan bahwa Pilkada berkembang ke arah cukup mengkhawatirkan. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Lakpesdam) PBNU, H Rumadi Ahmad. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: waspada dengan skenario adu domba yang sudah mulai terasa, bukan soal Ahok dan Pilkada, tapi keutuhan bangsa.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Kewaspadaan kasus Ahok yang ditunggangi kepentingan pihak lain. (who) Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, H Rumadi Ahmad, (when) Kamis, 13 Oktober 2016, (where) di Balai Kota DKI Jakarta, (why) karena pernyataan Ahok memicu kontroversi, tetapi juga respon sebagian kelompok sengaja memanfaatkan isu ini untuk tujuan-tujuan lain, (how) anasir-anasir kelompok radikal akan berkumpul dengan memanfaatkan persoalan Ahok menjadi pintu masuknya.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan pernyataan Rumadi, dugaan ada kelompok-kelompok yang mengambil untung dari kasus Ahok. Hal ini dilakukan dengan mengadu domba antara umat Islam dan non-Islam. Kelompok yang membenci Ahok dan tatanan NKRI yang dianggap sebagai sistem thagut.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada pernyataan Rumadi, “Anasir-anasir kelompok radikal akan berkumpul dan memanfaatkan persoalan Ahok” Hal ini menunjukkan dugaan adu domba akan diagendakan oleh kelompok anti NKRI. Gambar: Foto

Rumadi Ahmad sedang berbicara dengan menggunakan mikrofon. Hal ini menunjukkan media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Rumadi Ahmad sebagai tokoh atau sumber dalam berita.

- 3) Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi AL Maidah 51, 24 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Kantor Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan dirinya. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Ahok sudah menyampaikan klarifikasi melalui akun instagram miliknya dan menganjurkan masyarakat melihat langsung video versi utuh.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok memberikan klarifikasi kepada Polisi atas kasus di Pulau Seribu, (who) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), (when) Senin, 24 Oktober 2016, (where) Jakarta Pusat, (why) melaksanakan pemeriksaan terkait dugaan penodaan Al Quran, surah Al Maidah 51 (how) Ahok datang atas inisiatif sendiri, dia meminta waktu untuk diperiksa.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan kedatangan Ahok di Bareskrim Polri. Ahok mengklarifikasi soal kasus Al Maidah 51 di Pulau Seribu. Kepolisian menindaklanjuti kasus Ahok dan sudah meminta keterangan sembilan saksi.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok, “Saya pikir saya datang supaya bisa memberikan klarifikasi kepada polisi atas kasus di Pulau Seribu” Hal ini menunjukkan media menekankan kasus Pulau Seribu, menyamakan kasus dugaan penodaan agama. Gambar: Foto Ahok berbicara dengan gerakan tangan ke depan. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ahok sebagai tokoh atau sumber dalam berita.

- 4) Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok, 1 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilakukan setelah penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Ahok yang juga merupakan

kandidat calon Gubernur DKI Jakarta itu, sudah menyampaikan klarifikasinya melalui akun instagram.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli terkait kasus Ahok, (who) Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, (when) Selasa, 1 November 2016, (where) Jakarta, (why) pemeriksaan terkait kasus Ahok sangat hati-hati, terlebih momennya Pilkada. (how) Polisi menangani kasus Ahok seobyektif mungkin.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan kedatangan kepolisian menangani kasus Ahok dengan hati-hati. Polisi meminta keterangan 10 saksi ahli. Kepolisian meyakinkan penanganan kasus Ahok seobyektif mungkin.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok, “Gelar perkara masih menunggu seluruh saksi ahli dimintai keterangan”. Gelar perkara tahap awal ini akan menentukan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan media menekankan kasus Pulau Seribu, menyamakan kasus dugaan penodaan agama. Gambar: Foto Ahok duduk di ruang kerja gubernur. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ahok, namun terkait dalam pemberitaan belum akurat terkait sumber berita.

- 5) Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November. 3 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan ada agenda lain di balik Demo 4 November, yaitu agenda khilafah. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian demo 4 November 2016 ditumpangi oleh beberapa kepentingan, termasuk kelompok yang sudah lama mempunyai agenda mendirikan khilafah. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Yenny Wahid. Latar Informasi: Demonstrasi 4 November ditunggangi kepentingan khilafah.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) agenda khilafah tumpangi demonstrasi 4 November, (who) Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Yenny Wahid, (when) Rabu, 2 November 2016, (where) Jakarta, (why) demo terpicu beberapa hal antara lain kelompok yang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Ahok, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama, dan agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah. (how) demo pertama bendera yang menjadi simbol khilafah bahkan bendera ISIS bebas berkibar di tengah kerumunan ribuan pendemo.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan agenda khilafah menunggangi demo 4 November, hal ini di perkuat dengan pernyataan Kapolri bahwa ada agenda dari kelompok yang sudah lama ingin mendirikan khilafah, selain itu keterangan dari mantan Kepala BNPT adanya simbol khilafah pada demo sebelumnya.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Yenny Wahid “Harus mewaspadaai dan mengantisipasi karean yang kita khawatirkan adalah penunggangan-penunggang dan penyusupan-penyusupan” Hal ini menjelaskan agenda lain di balik demo 4 November adanya orang-orang yang ingin mengganggu stabilitas negara dengan menggunakan momentum ini. Gambar: Foto Kapolri Tito Karnavian berkunjung ke PBNU. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar narasumber, namun kurang sesuai antara gambar terhadap isi berita.

- 6) Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok, 7 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto terkait pemeriksaan terhadap Ahok, pihaknya mempertajam beberapa poin atas kasus dugaan penistaan agama. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Polri telah mendengarkan keterangan dari 22 orang saksi dalam pengusutan kasus Ahok..

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Bareskrim pertajam penyelidikan terkait kasus Ahok, (who) Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Mabes Polri Jakarta, (why) supaya tidak ada salah tafsir, (how) Kepolisian memeriksa 22 saksi, video barang bukti, dan mempertajam serta mendalami beberapa poin terkait masalah agama.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan Bareskrim melakukan penyidikan terkait kasus Ahok. Ada beberapa poin yang harus dipertajam dan dipahami atas kasus dugaan penistaan agama.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Komjen Ari “Ada beberapa poin yang harus kami pertajam dan dalami” Hal ini menunjukkan pihak kepolisian bekerja secara hati-hati dalam melakukan penyidikan kasus Ahok. Gambar: Foto Ahok sedang duduk (ilustrasi). Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ahok, menghadirkan sosok yang menjadi objek yang dibicarakan.

- 7) Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok, 8 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyatakan pemeriksaan kedua terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama lebih detail dari pemeriksaan sebelumnya. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto . Pernyataan penutup dalam teks berita ini: gelar perkara terbuka akan dilakukan setelah pemeriksaan sudah selesai dan bisa dikumpulkan berkas pemeriksaannya.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Kabareskrim lakukan pemeriksaan kedua lebih detail dari yang pertama, (who) Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, (when) Selasa, 8 November 2016, (where) Jakarta, (why) hal ini menyangkut proses hukum selanjutnya . (how) Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan Kabareskrim melakukan penyidikan lebih detail pada pemeriksaan kedua Ahok. Pihaknya menjelaskan

pemeriksaan selain Ahok, meliputi saksi dan barang bukti. Koherensi yang digunakan adalah penjelas.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata “Kami hanya tanya kegiatan dia apa lebih detail dari yang pertama”. Gambar: Foto Ahok sedang duduk. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar orang yang diperiksa dalam isi berita.

- 8) Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember, 21 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan agenda politik tunggangi demo 2 Desember. Hal ini diperkuat dengan lead rencana aksi bertajuk Bela Islam III tetap keukeuh akan dilaksanakan pada 2 Desember 2016 mendatang oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) terkait kasus Ahok. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Kapolri Tito Karnavian. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Kalau bermaksud menguasai DPR , maka itu melanggar hukum, kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah, itu ada pasal makar.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Kapolri mengindikasikan agenda makar dalam demo 2 Desember ,(who) Kapolri Tito Karnavian, (when) Senin, 21 November 2016 ,

(where) Mabes Polri, (why) sebab aksi demo 2 Desember punya tujuan terselubung, Polri menduga aksi ini berupaya menjatuhkan pemerintah. (how) aksi demo tersebut sudah tidak ada relevansinya karena Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka dan proses hukum sedang berjalan.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan Aksi 2 Desember mempunyai tujuan terselubung. Kapolri mencium agenda politik untuk menjatuhkan pemerintah. Agenda politik itu antaranya melakukan makar. Koherensi yang digunakan penjelas dalam berita.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Kapolri. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar. Kapolri menduga agenda demo 2 Desember disusupi kepentingan orang-orang yang berupaya menjatuhkan pemerintah. Kalau ada maksud menduduki dan menggulingkan pemerintah, ada pasal makar yang menjerat. Gambar: Foto Kapolri Tito Karnavian bersama Panglima TNI sedang berbincang ditengah kerumunan orang-orang. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar narasumber, namun tidak langsung mengambil dari lapangan melainkan mengambil sumber dari majalahperwira.com.

- 9) Perkara Penodaan Agama, beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan, 1 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan proses hukum kasus Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Ketua PBNU Robikin Emhas meminta masyarakat dan seluruh pihak yang ada untuk memberi kesempatan kepada para hakim yang akan menyidangkan kasus penodaan agama dengan tersangka Ahok untuk menegakkan hukum. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketua PBNU Robikin Emhas. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: kebebasan dan kemandirian hakim tersebut dimaksudkan untuk satu tujuan, yaitu agar hakim dapat menemukan kebenaran dan keadilan hukum.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Penegakan hukum perkara penodaan agama oleh hakim, (who) Ketua PBNU Robikin Emhas, (when) Kamis, 1 Desember 2016, (where) Jakarta, (why) penuntasan penanganan kasus penodaan agama dengan tersangka Ahok ada di tangan lembaga yudikatif, (how) hakim yang memeriksa dan mengadili dugaan penodaan agama ini harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun, sesuai prinsip *independent and imparsial judiciary*.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan penuntasan penanganan kasus penodaan agama

dengan tersangka Ahok ada di tangan yudikatif. Setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Semua pihak harus memberi kesempatan kepada para hakim yang mengadili perkara tersebut tidak boleh dipengaruhi, apalagi diintervensi oleh kepentingan siapa pun dan apa pun.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata penuntasan kasus Ahok di tangan yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa hakim yang berhak menangani penuntasan kasus Ahok di ranah pengadilan. Selain itu *statement* prinsip *independent and imparial judiciary*, menegaskan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili kasus penodaan agama dengan tersangka Ahok agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan hukum. Gambar: neraca gantung seimbang (ilustrasi), menyimbolkan prinsip peradilan tidak memihak. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar ilustrasi terkait peradilan.

- 10) Kapolri minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok. 2 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan imbauan Kapolri untuk proses hukum Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Kapolri Tito Karnavian meminta massa aksi Doa bersama 2 Desember mendukung proses hukum

Ahok atas kasus dugaan penistaan agama. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Kapolri Tito Karnavian. Latar informasi: aksi doa bersama oleh massa yang menuntut penegakkan hukum untuk Ahok atas kasus penodaan Al Quran di kepualauan Seribu.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Imbauan Kapolri kepada massa untuk dukung proses hukum Ahok, (who) Kapolri Tito Karnavian, (when) Jumat, 2 Desember, (where) Kawasan Monas Jakarta, (why) agar proses hukum Ahok terus berjalan, (how) kapolri memberi sambutan dan mengajak massa aksi untuk berdoa bersama untuk proses hukum Ahok.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan imbauan kapolri kepada massa yang mengikuti doa bersama 2 Desember untuk mendoakan proses hukum Ahok berjalan terus. Kapolri memberikan sambutan dalam acara doa bersama yang berlangsung di kawasan Monas. Kapolri juga mengajak seluruh umat Islam yang hadir beribadah dengan sungguh-sungguh.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Kapolri. “Apa yang kami lakukan sudah maksimal. Saya mohon dukungan dari saudara semua agar proses hukumnya berjalan.” Hal ini menekankan bahwa kerja kepolisian sudah maksimal dalam menangani kasus Ahok. Kapolri mengajak masyarakat untuk menghormati

proses hukum yang berlangsung, agar peradilan kasus penodaan agama berjalan lancar. Gambar: Foto Kapolri memberikan sambutan pada doa bersama di Monas. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Kapolri Tito Karnavian, hal ini sesuai dengan isi berita.

- 11) Ahok Divonis Dua Tahun, PBNU Hormati Proses Hukum. 9 Mei 2017.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan hasil sidang dengan vonis untuk Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima vonis dua tahun penjara dari Majelis Hakim setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas. Nu.or.id berupaya menghadirkan sosok yang mengerti hukum terkait perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: menurut Robikin Emhas, kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ahok divonis dua tahun penjara, (who) Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas, (when) Selasa, 9 Mei 2017, (where) Jakarta,

(why) Ahok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama. (how) majelis hakim memvonis Ahok dengan dua tahun penjara, usai pembacaan putusan Ahok bersama tim penasihat hukum bersepakat untuk mengajukan banding.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan, Ahok menerima vonis dua tahun oleh majelis hakim. Terkait proses hukum semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan supremasi hukum, untuk itu apa pun putusan hakim harus dihormati.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ahok menerima vonis dua tahun penjara dan siapa pun harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini menekankan bahwa Ahok terbukti bersalah dalam kasus penodaan agama dan mendapat hukuman dari majelis hakim. Seluruh pihak harus memberi penghormatan yang sama baik kubu pro Ahok maupun kontra, sesuai prinsip supremasi hukum. Gambar: Foto Ahok sedang duduk di ruang sidang. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ahok yang sedang menjalankan proses peradilan.

3. Frame Republika.co.id dan Nu.or.id Perspektif Sosial Keagamaan
 - a. Berita Republika.co.id ada lima judul, antara lain:
 - 1) MUI Minta Polisi Tindak Aksi Penodaan Agama, 12 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan keberpihakan pada umat Islam. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataan resmi terkait komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai meresahkan masyarakat. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Irjen Ari Dono, serta Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Penutup dalam teks berita ini: Bambang meminta polisi serius menangani kasus tersebut dan harus bersikap independen. Hal ini menunjukkan *supporting statement* sejalan dengan headline berita.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) MUI menegaskan aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Quran dan ajaran Islam, (who) Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Irjen Ari Dono, serta Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, (when) Selasa, 11 Oktober 2016, (where) Jakarta, (why) agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum, (How) Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat,

proporsional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan MUI agar aparat penegak hukum menindak tegas orang yang melakukan penodaan agama. Penghinaan Al Quran dan menghina ulama memiliki konsekuensi hukum. Penggunaan koherensi dalam berita adalah Sebab-akibat.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata hakim “aparat wajib menindak tegas orang yang menghina ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. MUI mengharap keadilan dan cepat tanggap pihak kepolisian terhadap kasus penodaan agama, semua pihak wajib menjaga harmoni kehidupan beragama. Hal ini menunjukkan upaya media mendukung kasus Ahok untuk ditangani pihak berwajib karena ada konsekuensi hukum di Indonesia.

- 2) Unjuk Rasa di Monas, HTI: Tangkap Ahok. 13 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menekankan keberpihakan pada umat Islam. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, sejumlah massa aksi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, mereka menuntut agar penegak hukum menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang disebut telah menghina Al Quran dengan

mengutip surah Al Maidah ayat 51 di Pulau Seribu. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Perwakilan dari tim hukum HTI, Ahmad Khozinuddin. Penutup dalam teks berita ini: ada alasan kuat untuk menangkap Ahok karena dengan mulut besarnya dikhawatirkan akan menghina umat Islam lagi.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Aksi massa HTI menuntut Ahok, (who) Perwakilan dari tim hukum HTI, Ahmad Khozinuddin, (when) Kamis, 13 Oktober 2016, (where) Monas, Jakarta Pusat, (why) agar Kepolisian menangkap Ahok karena secara blak-blakan telah menodai Al Quran, (How) Aksi massa HTI berteriak tangkap dan hukum Ahok serta menyuarakan negara khilafah .

Unit Analisis Tematik yaitu penekanan aksi massa HTI menuntut tangkap dan hukum Ahok. Hal ini menyuarakan keadilan bagi umat Islam karena menilai Ahok telah melakukan penodaan Al Quran. Mengkritik sikap arogan Ahok yang selama ini menyakiti hati masyarakat serta menyerukan negara khilafah yang akan menghancurkan orang zalim. Penggunaan koherensi dalam berita adalah Sebab-akibat.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata hakim “Tangkap dan hukum Ahok”. Massa HTI menyeru keadilan agar kepolisian menindak tegas

kasus penodaan agama. Hal ini menunjukkan upaya media mendukung kasus Ahok untuk ditangani pihak berwajib karena ada konsekuensi hukum di Indonesia.

- 3) Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap Keagamaan MUI, 26 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id berupaya memperjelas sikap MUI terhadap kasus Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Rois Syuriah PBNU, KH Ahmad Ishomuddin melalui tulisan di laman facebook mengklarifikasi sikap keagamaan MUI dari Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin dan Ahmad Ishomuddin Rois Syuriah PBNU melalui akun facebook. Latar informasi terkait sikap keagamaan MUI terkait kasus penodaan agama oleh Ahok yang disalahpahami banyak orang.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) klarifikasi sikap keagamaan MUI, (who) Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin dan Ahmad Ishomuddin Rois Syuriah PBNU, (when) Rabu, 26 Oktober 2016, (where) Gedung PBNU Jakarta Pusat, (why) Pernyataan sikap keagamaan MUI yang di dunia maya banyak disalahpahami sebagai fatwa MUI, (How) memberikan klarifikasi yang disikapi MUI bukanlah persoalan tafsir Al Quran surat Al Maidah ayat

51, merupakan respon terhadap pernyataan Ahok di kepulauan Seribu dengan menjabarkan lima poin.

Unit Analisis Tematik yaitu klarifikasi KH Maruf Amin tentang sikap keagamaan MUI. Sikap keagamaan MUI disalahpahami sebagai fatwa. Hal ini menunjukkan koherensi penjas dalam penulisan berita.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata klarifikasi pernyataan sikap keagamaan MUI yang disalahpahami sebagai fatwa. MUI berupaya memperjelas lima poin terkait respon terhadap pernyataan keagamaan di kepulauan Seribu oleh Ahok. Gambar: KH. Ma'ruf Amin sedang berbicara. Hal ini menunjukkan media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar tokoh yang terkait dalam isi berita.

- 4) GNPFF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi lanjutan. 7 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menunjukkan belum ada kejelasan sikap GNPFF-MUI terkait aksi massa lanjutan. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir, menegaskan belum ada aksi lanjutan setelah Aksi damai Bela Islam II yang digelar jumat 4 November 2016. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir. Pernyataan penutup, pihaknya akan membahas rencana aksi selanjutnya secara besar-besaran apabila ada indikasi mengarah pada hal-hal meringankan Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) klarifikasi GNPF-MUI belum ada aksi massa lanjutan, (who) Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir, (when) Senin, 7 November 2016, (where) Jakarta, (why) karena masih mencermati situasi di tiga hingga empat hari mendatang. (How) memberikan klarifikasi sekaligus membantah adanya informasi yang beredar bahwa postingan Aksi bela Islam III 25 November dengan hashtag #LengserkanJokowi, jika Ahok bebas.

Unit Analisis Tematik yaitu klarifikasi Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir terkait aksi lanjutan. GNPF-MUI belum memastikan aksi bela Islam III. Hal ini menunjukkan koherensi penjelas dalam penulisan berita.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata klarifikasi Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir, info yang beredar di media sosial terkait aksi massa lanjutan bukanlah resmi dari GNPF-MUI. Media berupaya memperjelas selentingan-selentingan yang viral di dunia maya terkait Aksi Bela Islam jilid III dengan menghadirkan penjelasan Ketua GNPF-MUI dalam pemberitaan. Gambar: Ketua GNPF-MUI Ustaz Bachtiar

Nasir memegang kitab. Hal ini menunjukkan media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar tokoh Bachtiar Nasir yang terkait dalam isi berita.

- 5) Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum. 21 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Republika.co.id menunjukkan penegasan Kapolri untuk berdemonstrasi secara tertib. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mempersilakan keolmpok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) untuk melakukan aksi damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sumber yang digunakan oleh Republika.co.id adalah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan juru bicara FPI Munarwan. Latar informasi yang ditekankan Aksi Damai 212.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Himbauan Kapolri terkait aksi damai 212 tidak mengganggu ketertiban umum, (who) Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan juru bicara FPI Munarwan, (when) Senin, 21 November 2016, (where) Jakarta, (why) ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam aksi demonstrasi, di antaranya mengganggu kepentingan umum dengan menggelar aksi di jalan Protokol. (How) Kepolisian melarang pelaksanaan sholat Jumat di jalan umum, menghimbau

sholat di masjid Istiqlal, lapangan Banteng dan Lapangan Monas.

Unit Analisis Tematik yaitu Penegasan Kapolri agar aksi bela Islam 212 berjalan dengan tertib. Demonstrasi merupakan penyampaian pendapat di muka umum, namun juga tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini menunjukkan koherensi pembeda dalam penulisan berita.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada Kapolri meminta aksi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Upaya Kapolri untuk melayani hak warga berdemonstrasi dan upaya menjaga ketertiban serta keamanan kota Jakarta. Gambar: Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggelar jumpa pers usai video vonference dengan Kapolda dan Pandam seluruh Indonesia, Senin (21/11). Hal ini menunjukkan media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Kapolri terkait isi berita.

b. Berita Nu.or.id ada enam judul, antara lain:

- 1) Sikapi Pernyataan Ahok, Ketum PBNU: Tidak Boleh Emosional. 12 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id bernada tidak menghakimi dalam perkara kasus Ahok, namun upaya untuk menetralsir. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyayangkan keluarnya pernyataan

sikap dan rekomendasi sejumlah pihak perihal pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai cenderung emosional. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketum PBNU KH. Said Aqil Siroj. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: KH. Said Aqil Siroj tidak membela Ahok, kalau ada masalah selesaikan dengan dialog.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Ketua PBNU sikapi pernyataan Ahok, (who) Ketum PBNU KH. Said Aqil Siroj, (when) Rabu, 12 Oktober 2016, (where) Jakarta, (why) Ahok mengalami sabqul lisan (keseleo lidah) dan sudah meminta maaf di tengah publik. (how) semestinya sikapi pernyataan kontroversial itu dengan kepala dingin dan bijak.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan pada sikap Ketum PBNU untuk tidak emosional dalam menanggapi pernyataan Ahok. Umat Islam wajar tersinggung atas pernyataan Ahok, tetapi harus memaafkan.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada *statement* Ketum PBNU KH.Said Aqil Siroj, “kita sikapi pernyataan kontroversial Ahok dengan kepala dingin dan bijak.” Hal ini menekankan sikapi tanpa emosional, diselesaikan secara baik-baik, selesaikan dengan dialog, tidak perlu jalur formal dengan tuntutan

hukum. Gambar: Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj sedang berbicara memegang mikrofon/ alat pengeras suara. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ketum PBNU.

- 2) Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok. 26 Oktober 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan MUI tidak berpihak pada demo terkait kasus Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin menyatakan lembaga yang dipimpinnya tidak mendukung demo-demo terkait tuduhan penistaan agama oleh Ahok. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Ketum MUI menegaskan tidak ada perbedaan sikap antara NU dan MUI, sudah memaafkan tetapi diproses hukum.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Sikap MUI tidak mendukung demo Ahok, (who) Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin, (when) Rabu, 26 Oktober 2016, (where) gedung PBNU, (why) MUI menyerahkan ke polisi terkait kasus penodaan agama oleh Ahok. (how) simbol-simbol MUI tidak boleh digunakan dalam demo, tidak mendukung adanya demo-demo.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan cerita, MUI tidak mendukung adanya demo terkait Ahok. Kendati demikian juga tidak bisa mencegah karena demo dibolehkan UU. MUI mengimbau jangan berlaku anarkis. MUI juga menegaskan simbol-simbolnya tidak boleh digunakan dalam demo, karena tidak terkait demo-demo tersebut, sebagaimana tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan pendapat MUI untuk kepentingan pilkada.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ketum MUI, “Kita tidak mendukung adanya demo-demo”. Hal ini menekankan bahwa MUI tidak terlibat adanya demo-demo terkait kasus Ahok. Gambar: Ketum MUI KH. Ma’ruf Amin sedang duduk dan berbicara dengan menggunakan mikrofon/ alat pengeras suara. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar Ketum MUI, karena merupakan narasumber dari berita.

- 3) PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok. 1 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan Imbauan PBNU terkait kasus Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead Presiden dan ulama sepakat menjaga solidaritas untuk mengawal dan menjaga NKRI. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj. Pernyataan

penutup dalam teks berita ini: Segera ada proses hukum supaya jelas. Kalau ada diproses kan berangkat dari nol, saksi diundang, fakta-fakta dikumpulkan. Nanti penyidik akan menyimpulkan ada tidak penistaan agama.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) PBNU imbau demo bermartabat dan segera proses hukum Ahok, (who) Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, (when) Selasa, 1 November 2016, (where) Istana Merdeka, (why) demonstrasi yang akan digelar adalah hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi, tapi demonstrasi yang bermartabat, itu indikasi masyarakat yang sudah maju dan dewasa, (how) mengimbau demonstrasi yang beretika, tidak anarkis, tidak merusak, demonstrasi yang bermartabat, serta menindak secara hukum yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika ada penistaan agama dilakukannya.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan cerita, pertemuan pemerintah dan para ulama sepakat untuk menjaga solidaritas dan membahas demo terkait kasus dugaan penodaan agama. Hadir PBNU mengimbau untuk demo bermartabat, dan segera proses hukum Ahok apabila ada indikasi penodaan agama.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ketum PBNU, demonstrasi yang bermartabat dan segera ada proses hukum supaya jelas. Hal ini

menekankan demonstrasi tidak dilarang, namun demo yang beretika, dan tidak anarkis. Proses hukum merupakan solusi dari permasalahan kasus Ahok, untuk mengetahui kebenarannya. Gambar: Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj sedang duduk dan berbicara. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar narasumber.

- 4) PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada Proses Hukum. 4 November 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan PBNU apresiasi terhadap jalannya aksi demonstrasi. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan KH Said Aqil Siroj menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya pada demo 4 November, sebelumnya sempat dikhawatirkan bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: dalam pandangan Kiai Said, semua kekisruhan terkait Ahok ini tidak lepas dari politik pilkada.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) PBNU apresiasi aksi demo berjalan damai, (who) Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, (when) Jumat, 4 November 2016, (where) Cirebon, (why) aksi demo yang berjalan relatif tertib dan damai,

(how) menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya, serta meminta semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus ke aparat kepolisian.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan cerita, PBNU apresiasi aksi demo 4 November berjalan damai, dan mengajak masyarakat mempercayakan kasus Ahok pada proses hukum. PBNU bersyukur aksi demo berjalan dengan tertib dan damai, sebelumnya sempat dikhawatirkan bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal. Terkait tuntutan aksi massa, Ketum PBNU mengajak masyarakat untuk mempercayakan kasus Ahok ditangani oleh kepolisian.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Ketum PBNU, “ bersyukur dan mengapresiasi aksi yang berjalan dengan relatif tertib dan damai. Hal ini menekankan bahwa PBNU memberikan perhatian dan apresiasinya pada demo 4 November 2016.

- 5) Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat. 2 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan aksi massa doa bersama di kawasan Monas. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan doa bersama oleh massa yang menuntut hukum Ahok sangat padat, sejumlah perkantoran memilih tutup. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu warga (anonim). Latar informasi: aksi doa bersama atau aksi bela

Islam 212 yang menuntut penegakkan keadilan terkait kasus Ahok.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) aksi doa bersama di kawasan Monas, (who) warga, (when) Jumat, 2 Desember 2016, (where) Kawasan Monas, (why) aksi massa doa bersama sangat padat, (how) sejumlah perkantoran memilih tutup, dan sebagian pengusaha memilih untuk sementara menutup usahanya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan aksi doa bersama di kawasan Monas sangat padat, karena jumlah massa yang banyak tersebut sebagian kantor dan pengusaha memilih menutup usahanya.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata banyak massa yang berjalan menuju Monas, dan kawasan Monas dipenuhi dengan massa yang mayoritas berpakaian serba putih. Gambar: Foto aksi massa doa bersama yang padat volumenya di kawasan Monas. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar peristiwa.

- 6) Greg Fealy Ungkap Kecenderungan Paham Keagamaan karena Pengaruh Medsos. 10 Desember 2016.

Unit analisis Sintaksis dapat dilihat: Headline yang diambil oleh Nu.or.id menekankan kecenderungan paham

keagamaan di pengaruhi media sosial terkait kasus Ahok. Hal ini diperkuat dengan lead yang menyatakan arus informasi media sosial semakin tak terbendung, terbukti ketika seseorang mendapatkan sebuah informasi langsung dibagikan tanpa harus dikonfirmasi dan dicek kebenarannya, hal ini turut membentuk pemahaman soal agama. Nu.or.id mencoba menampilkan wacana pandangan dari sumber asing untuk mengkaji permasalahan terkait kasus Ahok. Sumber yang digunakan oleh Nu.or.id yaitu Associate Profesor Australian National University, Greg Fealy. Pernyataan penutup dalam teks berita ini: Greg meminta para peserta diskusi juga memberikan pandangannya.

Unit analisis Skrip, yaitu bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu: (what) Pandangan Greg Fealy ungkap kecenderungan paham keagamaan karena pengaruh media sosial, (who) Associate Profesor Australian National University, Greg Fealy, (when) Jumat, 9 Desember 2016, (where) Pascasarjana STAINU Jakarta, (why) Greg Fealy melakukan penelitian, menurut penelitiannya substansi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tidak dipahami oleh masyarakat, sebab masyarakat hanya mengetahuinya lewat media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter dan lain-lain yang viral dibagikan oleh sesama teman, (how) Greg Fealy mengikuti aksi 212 dengan turun ke lapangan dan

mencoba memberikan pertanyaan substansial kepada beberapa peserta aksi.

Unit Analisis Tematik yaitu wartawan memberi penekanan kecenderungan paham keagamaan karena pengaruh media sosial. Hal ini dijelaskan Greg Fealy pada penelitian yang dilakukannya, bahwa substansi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tidak dipahami oleh peserta aksi 212, mereka hanya mengetahui lewat media sosial yang viral dibagikan oleh sesama teman. Arus informasi melalui media sosial yang ramai tersebut, terbukti turut membentuk pemahamannya soal agama.

Unit analisis Retoris yaitu teks berita menekankan pada kata Greg Fealy, arus informasi di media sosial turut membentuk pemahaman seseorang soal agama. Hal ini ditegaskan oleh Nu.or.id dengan memaparkan penelitian yang dilakukan oleh Greg fealy terkait fenomena aksi 212, substansi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak dipahami oleh peserta aksi, mereka mengetahui informasi dari media sosial dan terpengaruh melakukan aksi gerakan massa dari informasi yang viral. Gambar: Greg Fealy dalam diskusi Tadarus Islam Nusantara sedang berbicara di hadapan para peserta. Media berupaya mendukung pemberitaan dengan menghadirkan gambar peristiwa dan narasumber berita.

B. Analisis Kecenderungan Republika.co.id dan Nu.or.id pada Pemberitaan Penodaan Agama Kasus Ahok.

1. Frame Media pada pemberitaan penodaan agama menurut pandangan pemerintah dan ulama.

Elemen	Republika.co.id	Nu.or.id
Frame	Pemerintah dan Ulama mendukung proses hukum Ahok.	Pemerintah dan Ulama pro dan kontra.
Sintaksis	Wawancara dengan pejabat tinggi negara, seperti Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi kasus Ahok, dan pro diproses hukum. Tokoh agama yaitu Buya Syafii Maarif yang ditonjolkan oleh Republika.co.id tampak mengapresiasi umat Islam dan mendukung proses hukum Ahok dengan	Tokoh pemerintah yang ditekankan adalah Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kedua pejabat tinggi negara ini mendukung penyelesaian kasus Ahok di jalur hukum. Tokoh ulama yang dihadirkan Nu.or.id adalah tokoh dari lembaga Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj yang paling menonjol

	sebaik-baiknya.	untuk diminta keterangan terkait kasus Ahok. Statement dalam berita ada dua nada, <i>pertama</i> , tidak mengklaim bahwa apa yang dilakukan Ahok adalah bukan penistaan dan baiknya diselesaikan dengan memaafkan dan berdialog. <i>Kedua</i> , mendukung proses hukum yang berjalan untuk penyelesaian kasus Ahok.
Skrip	Penekanan pada aspek legalitas. Kasus Ahok baik pendapat pemerintah maupun ulama untuk ditangani pihak yang berwenang.	Baik pendapat pemerintah dan para tokoh agama ditempatkan saling melengkapi, saling menanggapi. Pendapat dominan

		menyetujui ke arah hukum dan menghormati proses yang berjalan.
Tematik	Pernyataan Presiden RI tidak akan intervensi kasus Ahok. Pernyataan Wapres RI, Ahok akan diproses hukum tegas dan cepat. Dan Buya Syafii mengapresiasi Aksi demo serta kasus Ahok ditangani hukum seadil-adilnya.	Pernyataan Presiden RI gelar acara terbuka pada kasus Ahok. Pernyataan Wapres RI, Ahok akan diproses hukum tegas dan cepat. Pernyataan Kiai Said Aqil Siroj bahwa Ahok menyinggung Umat Islam.
Retoris	Pemberian label otoritas pemerintah dan tokoh agama untuk menyatakan komitmen profesionalisme dalam kasus Ahok.	Pemakaian tokoh petinggi negara dan tokoh agama dalam mendukung gagasan untuk penyelesaian kasus Ahok.

2. Frame Media pada pemberitaan penodaan agama dalam perspektif hukum dan politik.

Elemen	Republika.co.id	Nu.or.id
Frame	Kasus Ahok murni perkara hukum.	Kasus Ahok mengarah hukum dan agenda politik.
Sintaksis	Wawancara aparat penegak hukum, Kepala Kepolisian Tito Karnavian, Mabes Polri. Republika.co.id memunculkan tokoh sesuai kapasitas dalam menangani proses hukum Ahok, dan Ahok ditonjolkan sebagai tersangka.	Wawancara aparat penegak hukum, Kepala kepolisian Tito Karnavian dan Mabes Polri, ditonjolkan sebagai pihak yang berwenang menangani kasus Ahok. Selain itu, para tokoh tersebut mengutarakan penunggang agenda lain (politik) dalam kasus Ahok.
Skrip	Penekanan pada aspek legalitas hukum. Kasus penodaan agama oleh Ahok, perkara ini dapat diadili untuk	Pendapat para pakar yang digunakan memuat dua hal. Pertama, kasus Ahok dapat dipidanakan.

	menemukan solusinya.	Kedua, adanya agenda politik menunggangi kasus Ahok.
Tematik	Pernyataan Ahok meminta maaf pada umat Islam dan doa kasusnya selesai. Pernyataan Kapolri dalam menangani kasus Ahok dengan hati-hati dan maksimal dalam memproses hukum. Vonis Hakim terhadap Ahok tidak terkait Pilkada DKI Jakarta.	Ahok kooperatif dalam proses hukum. Kepolisian profesional dalam menangani kasus Ahok. Kapolri ungkap ada agenda khilafah dalam demo 4 Novemberr. Kapolri menduga ada agenda makar dalam demo 2 Desember. Vonis Ahok oleh pengadilan, dan menghormati hukum.
Retoris	Pemberian label otoritas pada kasus Ahok memberi bukti dan klaim yuridis	Pemakaian pernyataan otoritas pakar hukum untuk mendukung

	(terkait perkara penodaan agama).	gagasan dan penjelasan perkara Ahok di ranah hukum serta agenda politik.
--	-----------------------------------	--

3. Frame media pada pemberitaan penodaan agama dalam perspektif sosial keagamaan.

Elemen	Republika.co.id	Nu.or.id
Frame	Organisasi masyarakat dan gerakan aksi massa kontra Ahok	Ormas dan gerakan aksi massa tidak berpihak
Sintaksis	Wawancara tokoh-tokoh lembaga atau organisasi masyarakat yang menuntut hukum Ahok. Menempatkan MUI untuk menindak aksi penodaan agama, disusul dengan HTI, GNPF-MUI menuntut penjarakan	Pendapat para tokoh organisasi masyarakat ditempatkan saling melengkapi, argumentasi senada tidak mengklaim atau menghakimi Ahok, namun lebih ke arah imbauan untuk tidak main hakim sendiri,

	Ahok.	memberikan apresiasi pada umat Islam dan mempercayakan pada proses hukum.
Skrip	<p>Penekanan pada aspek hukum.</p> <p>Menyuarakan demonstrasi umat Islam yang merasa disakiti oleh pernyataan Ahok.</p> <p>Ahok jelas-jelas melakukan penodaan terhadap Al Quran dan harus dihukum.</p>	<p>Penekanan pada demonstrasi sebagai aksi massa menyalurkan aspirasi umat Islam dan menggiring opini untuk menghormati proses hukum.</p> <p>Pendapat para tokoh ormas ditempatkan sebagai pihak yang netral, memilih untuk tidak terlibat dalam kasus Ahok.</p>
Tematik	<p>Aksi Bela Islam menyuarakan membela agama.</p> <p>Organisasi</p>	<p>Organisasi masyarakat (PBNU) menyuarakan tidak</p>

	masyarakat (HTI, MUI, dan GNPF-MUI) menuntut hukum Ahok atas kasus penodaan terhadap Al Quran.	emosional dalam menanggapi kasus Ahok. Organisasi masyarakat tidak mendukung demo terkait kasus Ahok.
Retoris	Penekanan kepada tokoh Organisasi masyarakat keagamaan mengklaim kasus Ahok murni penodaan agama, dan harus ditindak tegas karena memiliki konsekuensi hukum.	Pemakaian klaim otoritas ormas untuk mendukung pendapat atau gagasan penanganan kasus Ahok secara damai dan percayakan pada proses hukum.

Republika.co.id sebagai media Islam online melakukan pengemasan berita tidak lepas dari ideologi medianya. Berdasarkan keseluruhan berita yang telah dianalisis, menekankan aspek agama dan hukum. Pemberitaan mendudukkan Ahok sebagai pihak yang bersalah karena telah menodai Al Quran terkait pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Di Indonesia kasus penodaan agama

dipayungi oleh hukum, sehingga hal ini menjadikan alasan apabila massa berunjuk rasa menuntut keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh Ahok.

Ahok dinilai telah menyakiti perasaan umat Islam. Pemberitaan terkait pihaknya meminta maaf, ditanggapi oleh berbagai pihak, seperti Lembaga atau organisasi keagamaan yaitu MUI, yang menghimbau masyarakat untuk memaafkan Ahok. Selain itu didukung pula oleh tokoh-tokoh Agama yang dimuat dalam berita, seperti Menteri Agama RI, Buya Syafii Ma'arif, KH. Aqil Siroj untuk memaafkan orang yang meminta maaf (Ahok). Meski demikian, kecenderungan ke ranah hukum terkait kasus Ahok sangat kuat. Hal ini tersaji dalam frame-frame berita yang menuntut Ahok diproses hukum dan dipenjarakan.

Aksi gerakan massa yang menuntut proses hukum kasus Ahok masif diberitakan. Terkait aksi bela Islam di Jakarta mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya tokoh-tokoh agama. Aksi unjuk rasa diwacanakan dengan aksi yang bermartabat membela agama. Aksi yang damai, mencerminkan muslim Indonesia, bahkan pemberitaan kesiapan Pemprov DKI untuk menyambut aksi jilid III pun diangkat. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap gerakan sosial untuk jihad melawan kebatilan yang dilakukan oleh Ahok, karena telah menodai kitab suci umat Islam.

Terkait Aksi Bela Islam di Jakarta kasus Ahok, tidak luput dari imbauan para tokoh agama. Ajakan agar demo dengan damai, tidak anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum

menunjukkan sisi lain, bahwa hal ini bisa dilihat sebagai nasehat maupun mencegah danantisipasi agar massa tidak melakukan perbuatan radikal. Selain itu sikap skeptis dibingkai terkait kasus ini bahwa Ahok kebal terhadap hukum, belum juga dipenjara. Framing berita umat Islam dibuat sakit hati terhadap sikap Ahok, dan kecewa terhadap penegak hukum.

Counter informasi, Republika.co.id memposting berita untuk menanggapi rumor yang beredar di masyarakat bahwa Ahok kebal hukum. Republika.co.id memframing berita bahwa Presiden memerintahkan gelaran kasus hukum Ahok secara terbuka, dan presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Ahok. Hal ini sebagai jawaban atas kekhawatiran dan prasangka terhadap profesionalisme pemerintah maupun lembaga hukum serta kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Putusan hakim yang memvonis Ahok dua tahun penjara, framing berita menunjukkan bahwa vonis tersebut murni kasus pidana. Hakim menegaskan tidak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Hal ini menekankan bahwa kasus Ahok adalah ranah hukum, bukan politik.

Sedangkan Nu.or.id sebagai media Islam online melakukan pengemasan berita tidak lepas dari ideologi medianya yaitu moderat. Berdasarkan keseluruhan berita yang telah dianalisis, menekankan aspek hukum, politik, dan agama. Pemberitaan mendudukkan Ahok sebagai pihak yang telah menyinggung perasaan umat Islam terkait surat Al Maidah ayat

51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Framing berita permintaan maaf oleh Ahok menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud melecehkan Al Quran, dan dirinya bukan anti Islam.

Pernyataan Ahok yang menyinggung perasaan umat Islam, hendaknya disikapi dengan kepala dingin, berdialog tanpa emosional. Framing berita ini menyikapi atas kasus Ahok yang diwacanakan dengan tokoh Ketum PBNU. Hal ini menekankan bahwa sikap memaafkan akan meminimalisir kegaduhan yang muncul atas video pidato ahok yang viral di jejaring sosial.

Kasus Ahok yang kembali memanas, mengkhawatirkan akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Untuk itu tokoh agama meminta untuk waspada akan hal adu domba yang bisa merusak dan memecah belah bangsa. Frame berita ini menekankan ada kepentingan pihak tertentu dalam menunggangi kasus Ahok.

Wacana hukum dalam frame pemberitaan kasus Ahok dimuat NU.or.id terkait proses penyidikan kepolisian. Ahok datang ke Bareskrim guna pemeriksaan terkait Al Maidah 51. Ahok bersikap kooperatif dengan kepolisian menunjukkan inisiatif diri bahwa warga taat hukum, serta hal itu dilakukan agar proses hukum segera selesai. Kepolisian berupaya bekerja sangat hati-hati dan dikaji secara teliti dalam menangani kasus Ahok. Hal ini memang sudah seharusnya sebagai lembaga kepolisian bekerja secara profesional, agar tidak menurunkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Upaya dilakukan dengan

mendatangkan Ahok untuk diinterogasi, mendengarkan para saksi ahli, memeriksa alat bukti dikroscek agar menghasilkan data yang akurat untuk diproses selanjutnya.

Profesionalisme pemerintah juga dikemas oleh NU.or.id, Wakil presiden meminta proses hukum Ahok dilakukan dengan cepat dan tegas, kepolisian diberi waktu dua pekan untuk mengurusnya. Selain itu, Presiden juga memerintahkan gelar perkara kasus Ahok dibuka dan transparan. Hal ini menekankan bahwa di ranah hukum, pemerintah tidak melakukan intervensi dan memercayakan kepada proses hukum.

Terkait sikap keagamaan MUI, frame berita menekankan persamaan MUI dengan NU. MUI mengajak masyarakat untuk memaafkan Ahok, karena sebagai umat Islam memang seharusnya memberi maaf kepada orang yang meminta maaf. Mengajak untuk tidak anarkis, dan tidak mendukung aksi demo. Di sisi lain, MUI juga tidak melarang masyarakat untuk berdemo terkait penyampaian aspirasi memang dilindungi oleh undang-undang. Frame aksi bela Islam di Jakarta, senada dengan MUI, NU mengimbau agar umat memaafkan Ahok, dan menghindari anarkistis. NU tidak mendukung adanya aksi demo, namun mengimbau masyarakat yang ikut untuk damai dan tertib. Frame apresiasi aksi massa bela Islam pun dimunculkan atas jalannya demo yang relatif tertib dan damai. Terkait pro dan kontra kasus Ahok, frame Nu.Or.Id memercayakan kepada proses hukum. Hal ini menjadi jalan tengah agar keadilan dapat ditegakkan, dan menghindarkan masyarakat main hakim sendiri.

Frame kepentingan politik, ditekankan pada pemberitaan adanya agenda yang menunggangi kasus Ahok, khususnya aksi bela Islam di Jakarta versi Kapolri. Kapolri mencium agenda makar pada aksi demo 212. Aksi massa ini dinilai tidak relevan dengan tuntutan para pendemo. Kepolisian sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menangani kasus Ahok sesuai target waktu, dan kasusnya masih berjalan diproses hukum. Selain itu, pada agenda ini diduga ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan.

Frame terkait vonis Ahok, Nu.or.id mengemas berita untuk menghormati hukum yang berjalan. Menghormati proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Meskipun Ahok dinyatakan bersalah dan dihukum selama dua tahun, masyarakat diimbau agar tidak mengeluarkan hujatan dan menghormati hukum yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan pihak yang terkait agar menjalankan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konstruksi berita Republika.co.id dan NU.or.id dibagi dalam tiga perspektif yaitu perspektif pemerintah dan ulama, perspektif hukum dan politik, serta perspektif sosial keagamaan. Republika mengonstruksi kasus Ahok merupakan kasus penodaan agama dan harus dihukum dengan adil. Kaum yang menyuarakan dengan tegas direpresentasikan oleh organisasi masyarakat yang berideologi fundamentalis. Umat Islam diposisikan sebagai kaum yang tersakiti oleh pernyataan Ahok yang diklaim menodaai Al Quran Surat Al Maidah 51, dan apa yang dilakukan Ahok tersebut memiliki konsekuensi hukum. Sedangkan NU.or.id mewacanakan kasus Ahok menyinggung perasaan umat Islam, hal ini diwakili oleh narasumber yang ditonjolkan dalam menyuarakan perdamaian, tidak memihak, serta diserahkan kepada hukum untuk penyelesaian perkara secara adil. NU.or.id merepresentasikannya dengan organisasi masyarakat yang menunjukkan pandangannya bersikap moderat.
2. Kecenderungan pemberitaan pada Republika.co.id dan NU.or.id dapat dilihat dari framing berita. Kedua media ada perbedaan dari sisi penekanan atau ideologi yang ditonjolkan. Republika.co.id menekankan dua aspek. *Pertama*, aspek agama, pernyataan kontroversi Ahok yang menyinggung Al Maidah 51 dinilai telah menodai Al Quran (kitab suci agama Islam) yang menjadi panutan umat muslim. *Kedua*, aspek hukum, penekanan kasus

Ahok dibawa ke ranah peradilan dan harus dihukum. Hal ini sesuai dengan isi pemberitaan bahwa Ahok mengikuti proses penyelidikan kepolisian, menjalani sidang hingga vonis Ahok oleh hakim. Selain itu suara massa dalam aksi unjuk rasa menuntut Ahok untuk dihukum, karena konsekuensi tindak pidana. Republika.co.id cenderung menggunakan sumber yang bervariasi dan representatif, seperti tokoh pejabat tinggi negara menampilkan Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan Kapolri Tito Karnavian. Republika.co.id menekankan sumber dari tokoh agama dan organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan atau pendapat terkait perkara penodaan agama oleh Ahok, seperti buya Syafii Ma'arif, KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum GNPF-MUI. Sedangkan NU.or.id dalam pemberitaan kasus Ahok di Jakarta cenderung menekankan pada tiga aspek yaitu hukum, agama, dan politik. Hal ini tersaji dalam berita yang diwacanakan dilihat dari judul, isi yang ditonjolkan serta sumber yang digunakan oleh Nu.or.id. *Pertama* aspek hukum, wacana cenderung mengangkat isu hukum sebagai penyelesaian problem. *Kedua*, aspek agama, wacana dikaitkan pada persoalan pernyataan Ahok yang menyinggung Al Quran dan umat Islam. *Ketiga*, aspek politik, wacana yang dibentuk dari pernyataan Kapolri sebagai pihak otoritas yang mengungkapkan adanya agenda politik yang menyusupi kasus Ahok. Nu.or.id menghadirkan sumber dalam

pemberitaan representatif seperti tokoh yang memiliki otoritas dalam menangani perkara maupun memperkuat gagasan. Tokoh yang ditekankan NU.or.id seperti Presiden RI Joko Widodo, wakil presiden Jusuf Kalla, dan Kapolri Tito Karnavian. Tokoh agama atau organisasi masyarakat keagamaan yang ditampilkan cenderung linier, yaitu masih satu bagian dalam organisasi NU, seperti KH. Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siroj dan Robikin Emhas

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai framing pemberitaan penodaan agama kasus Ahok di Jakarta, peneliti memberikan masukan:

1. Pegiat pers Republika.co.id dan NU.or.id yaitu wartawan dan keredaksian supaya memperhatikan lagi pembuatan berita dari segi pemilihan judul yang lebih menarik tanpa *missleading*, dan pemilihan narasumber yang lebih bervariasi.
2. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya program Magister KPI sudah saatnya tidak hanya mengenal, namun juga membekali, mengkaji dan mengembangkan terkait keilmuan komunikasi di era digital
3. Pembaca, agar lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi yang disajikan oleh media online, mengkroscek informasi serta mengkritisi maksud pesan yang disampaikan.

C. PENUTUP

Alhamdulillahirabbil'alamin peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul Analisis Framing Pemberitaan Penodaan Agama Kasus Ahok di Jakarta pada Media Islam Online Republika.Co.Id dan Nu.Or.Id. Peneliti menyadari karya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik maupun saran dari pembaca atas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: tiara Wacana, 2004.
- Al Munawar, Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press: 2003
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Barus, Sedia Willing, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Biagi, Shirley, *Media Impact: Pengantar Media Massa*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: kencana, 2006.
- Burton, Graeme, *Media dan Budaya Populer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1999)

- Effendy, Bahtiar dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indoensia*, Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2002.
- Gibb, H.A.R, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Harahap, Syahrin, *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada, 2011.
- Harcup, Tony, *Journalism Principles and Practice: Second Edition*, London: Sage Publications, 2009.
- Hermin Indah Wahyuni, *Komunikasi dan Dunia Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2010.
- Isnur, Muhammad, *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012.
- Iswandi Syahputra, *Jurnalisme Damai : Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*, Yogyakarta: P_Idea, 2006.
- Kasman, Suf, *Pers dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*, (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010),
- Kasman, Suf, *Jurnalisme Universal: menelusuri Prinsip-prinsip Da'wah Bi Al Qalam dalam Al Quran*, Jakarta: Teraju, 2004
- Kasman, Suf, *Pers dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*, Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

- Khadhar, Lathifah Ibrahim, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Kristanto Hartadi, Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lukmantoro, Triyono, dkk, *Jurnalistik Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia*, Semarang: AJI Semarang dan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, 2014.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang Masalah keimanan, kemanusiaan dan kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Maulani, ZA, dkk, *Terorisme dan Konspirasi Anti-Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Edisi 6 Buku 2*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Misrawi, Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Mufid, Muhammad, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantara*, Jakarta: Serambi, 2014.

- Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Musyafak, Najahan, *Konstruksi Radikalisme Di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Nasrullah, Rully, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, Zulkarimein, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pareno, Sam Abede, *Manajemen Berita Antara Idealisme dan Terapan*, (Surabaya: Papyrus, 2003).
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Rivers, William L dan Jensen, Jay W, *Media Massa & Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rokhmad, Abu, *Dialektika Mazhab Syi'ah dan Fiqh Penguasa: Studi Analisis Putusan PN Sampang No.69/Pid.B/2012/PN.Spg tentang Tajul Muluk dan Fatwa MUI Jawa Timur tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013).
- Romli, Asep Syamsul M., *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Rusadi, Udi, *Kajian Media: Isu ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Samantho, Ahmad Y, *Jurnalistik Islami*, Jakarta: Harakah, 2002.

Severin, Werner J dan James W.Tankard Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa Edisi ke 5*, Jakarta: Kencana, 2011.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1997.

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhandang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2004

Sumadiria, AS Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Suwariyati, Titik, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Syah, Sirikit, *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Tamburaka, Apriadi, *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wahl-Jorgensen, Karin& Thomasn Hanitzsch, *The Handbook of Journalism Studies*, London: Routledge, 2009

White, Aidan, *To Tell You The Truth: Ethical Journalism Initiative*, Brussels: International Federation of Journalists, 2008.

Yunus,Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sumber Jurnal

- Alghamdi, Emad A., "The Representation of Islam in Western Media: The Coverage of Norway Terrorist Attacks", *International Journal of Applied Linguistics & English Literature* Vol. 4 No. 3 (2015): 203, diakses 25 September 2017, doi: 10.7575/aiac.ijalel.v.4n.3p.198.
- Aminah, Siti dan Muhammad Khoirur Roziqin," Pemantauan Kasus-Kasus Penodaan Agama di Indoensia Periode 2012-2014, Jurnal Keadilan Sosial Edisi 5 (2015), 26-27.
- Benzehaf, Bouchaib, Covering Islam in Western Media: From Islamic to Islamophobic Discourses, *JELTL (Journal of English Language Teaching and Linguistics* Vol.2 (1), 2017
- Gamson, William A. et al, *Media Images and the Social Construction of Reality*, (Annual Review of Sociology, Vol. 18. 1992
- Hassan, Hassan, et al, "Framing Islam in News Reporting: A Comparative Content Analysis", *Asian Social Science*, Vol.13. No.10 (2017), doi: 10.5539/ass.v13n10p112.
- Jahedi, Maryam, et al, "Review of Studies on Media Portrayal of Islam, Muslim and Iran", *International Journal of Education and Research* Vol.2 No.12 (2014).
- Malik, Hatta Abdul, *Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs eramuslim.com dan Voa-islam.com*, Semarang: LP2M-IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Manaf, Aini Maznina A. and Nerawi Sedu, "Framing Islam-Related Issues During GE13: An Analysis of Malaysian Mainstream Newspapers", *Intellectual Discourse*, 23:1 (2015).
- Rusmulyadi, "Framing Media Islam Online terhadap Konflik Keagamaan di Indonesia", dalam Jurnal Komunikasi Islam Volume 03, Nomor 01, Juni 2013.

- Sari, Fitri Meliya, "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia", *Jurnal Interaksi Vol.3 No.2* (2014).
- Sopyan, Yayan, "Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah Atas Putusan MK No. 140/Puu-vii/2009)", *Jurnal Cita Hukum Vol.3 No.2 Desember* (2015), diakses pada 7 Agustus 2017, doi: 10.15408/jch.v2i2.2314.
- Suhartini, *Studi Keberagamaan dari Masa ke Masa*, (Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 2, No.1, April 2012).
- Wibawa, Annisa Aninditya, dkk, "Etika dan Prinsip Jurnanisme Media Siber Detik.com Mengenai Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir", *Jurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran Vol.1, No.1* (2012).
- Yousaf, Salman, "Representations of Pakistan: A Framing Analysis of Coverage in the U.S. and Chinese News Media Surrounding Operation Zarb-e-Azb", *International Journal of Communication* 9 (2015).
- Yusof, Sofia hayati, et al, "The Framing of International Media on Islam and Terrorism", *European Scientific Journal March* Vol.3 No.8 (2013), diakses 12 Desember 2016.
- Zakiyah, "Agama Dalam Konstruksi Media Massa: Studi Terhadap Framing Kompas dan Republika pada Berita Terorisme", *Analisa Journal of Social Science and Religion* Vol. 22 No. 01 (2015), diakses 12 Desember 2016.
- Putri, Ayu Nur Irwinesia, "Analisis Framing Berita Demonstrasi Mahasiswa Semarang Terkait Kenaikan Harga BBM pada TV Borobudur", *Jurnal The Messenger*, Volume IV, No.1, Juli (2012).

Sumber Lain

Budi Raharjo, “Menghitung Jumlah Peserta Aksi 212”, diakses 4 September 2017, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/12/05/ohou27415-menghitung-jumlah-peserta-aksi-212>.

Fathiyah Wardah, “Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia”, diakses 2 Juli 2017, <http://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>.

<http://www.kompas.com>, *Survei Wahid Foundation: Indonesia masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme*, edisi 1 Agustus 2016, diakses 12/5/2017.

<http://www.tempo.co>, *Soal Al Maidah 51, Ahok: Tak mungkin saya Menista Al Quran*, edisi 24 Oktober 2016, diakses 12/12/2016

<http://www.muslimedianews.com/2015/02/top-20-website-islam-rujukan-terbaik.html#ixzz5LPKmrQJj>

<https://kumparan.com/pranamyadewati/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-lebih-tinggi-dari-fatwa>.

Putusan No. 1537/Pid.B/ 2016/ PN.Jkt Utr, kasus Penodaan Agama oleh Ahok

Satrio Arismunandar, Media Islam atau Media Islami dan Perbedaannya, Makalah

Lampiran

A. Teks Berita Republika.Co.Id

1. Minta Maaf, Ahok Minta Kasus Al-Maidah 51 tak Dilanjutkan

Senin 10 October 2016 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf kepada semua umat Islam terkait video berjudul 'Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51'. Ia juga meminta kasus tersebut tak dilanjutkan lagi.

"Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya rasa komentar ini jangan dilanjutkan lagi karena tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak ada niat apapun saat itu, bahkan orang Pulau Seribu pun saat itu tertawa *kok*," kata Ahok di Balai Kota, Senin (10/10).

Menurut dia, dirinya tidak bermaksud melecehkan agama Islam. "Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam karena videonya seperti apa. Semua wartawan TV juga saat itu menayangkan, tapi *gak* ada yang bilang bahwa itu penistaan atau pelecehan. Saya juga bukan ahli Islam," katanya.

Ahok juga mengklaim tindakannya selama ini tidak melecehkan umat Islam. Ia mencontohkan beberapa kebijakannya yang mendukung Islam, seperti perizinan sekolah Islam yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk KJP Madrasah dan bangunan masjid. "Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada *gak* melecehkan Islam?"

"Makanya saya mengerti sekali, ini memang urusan pribadi, setiap orang punya hak yang sama. Urusan agama adalah urusan pribadi jangan dikeluarkan ke publik. Makanya saya juga tidak akan menyinggung lagi," katanya.

Sebelumnya, Ahok mengucapkan maaf secara terbuka kepada umat Islam karena pernyataan saat berkunjung di Kepulauan Seribu. "Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf."

2. MUI Minta Polisi Tindak Aksi Penodaan Agama

Rabu 12 Oktober 2016 14:00 WIB

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataan resmi terkait komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu yang dinilai meresahkan masyarakat.

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menegaskan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran Islam. "Aparat wajib menindak tegas orang yang menghina ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," ujar Ma'ruf di Jakarta, Selasa (11/10).

Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri dalam menanggapi kasus ini. KH Maruf Amin mengimbau agar masyarakat menyerahkan penangannya kepada aparat penegak hukum dan tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan

Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut," jelas Ma'ruf.

MUI, papar Ma'ruf, dalam telaahnya menilai pernyataan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Alquran surah al-Maidah ayat 51 adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Jika ada yang menyebut kandungan surah al-Maidah ayat 51 adalah kebohongan, MUI melihat hal itu masuk dalam penodaan terhadap Alquran.

"Berdasarkan telaah di atas, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan menghina Alquran dan atau menghina ulama sehingga memiliki konsekuensi hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Irjen Ari Dono Sukmanto menegaskan, laporan masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan terus diproses. Meskipun, Ahok sudah meminta maaf atas kegaduhan yang timbul pascamenyebarkan luasnya video perkataannya berkaitan dengan surah al-Maidah ayat 51. Ahok mengaku harus meminta maaf, meskipun dirinya tidak memiliki niatan untuk melecehkan agama Islam.

Ari Dono mengatakan, tidak sedikit yang melaporkan mantan bupati Belitung timur itu. Karena itu, meskipun Ahok sudah meminta maaf, laporan masyarakat tetap akan diproses. "Kalau ada laporannya, kita tentunya akan melaksanakan proses-proses penyelidikan seperti itu," ujar Ari Dono di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok memang berpotensi menimbulkan efek sosial yang meluas di Jakarta. Apalagi jika tidak ditangani secara profesional oleh polisi.

Namun, menurutnya, pengambilalihan kasus tersebut berlebihan. Penanganan kasus tersebut dinilai cukup oleh Polda Metro Jaya. "Menurut saya, terlalu berlebihan jika ditarik ke Bareskrim.

Cukup polda, back up dari Mabes," ujar Bambang saat dihubungi Republika, Selasa (11/10).

Kendati demikian, yang terpenting, Bambang meminta polisi serius menangani kasus tersebut. Polri harus bersikap independen. "Jangan sampai diintervensi oleh kekuatan politik tertentu," kata Bambang. rep: Ratna Ajeng Tejomukti, Mabruroh, Rahmat Fajar, **ed:** Hafidz Muftisany

3. Unjuk Rasa di Monas, HTI: Tangkap Ahok!

Kamis 13 October 2016 15:14 WIB

Rep: C39/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa aksi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar penegak hukum menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang disebut telah menghina Alquran dengan mengutip surah al-Maidah ayat 51 di Pulau Seribu beberapa waktu lalu.

"Bahwa gubernur DKI Jakarta, dengan seragamnya yang dibiayai rakyat, secara berani telah menghina Alquran. Tangkap Ahok!," teriak seorang orator dari salah satu perwakilan dari guru.

Sekelompok massa aksi itu terus meneriakkan 'tangkap Ahok'. Mereka menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengobati rasa sakit yang dihadapi umat Islam. Apalagi, ke depannya dikhawatirkan Ahok akan melakukan hal yang sama lagi.

"Tangkap dan hukum Ahok! Karena secara blak-blakan telah menodai Alquran. Kami menuntut agar ditangkap dan menghukum penghina Alquran, Takbir!," ujarnya.

Selain itu, mereka juga mengkritik sikap arogan Ahok yang selama ini selalu menyakiti hati masyarakat. Karena itu, massa aksi HTI se-Jabodetabek tersebut mengajak agar bersatu untuk memenjarakan Ahok.

"Kami merasa tersakiti dengan Ahok. Karena itu perlu disampaikan kepada saudara Ahok agar secara jantan dirinya menyerahkan diri kepada penegak hukum, sebagai bentuk permintaan maaf," kata perwakilan anggota HTI dari kalangan pelajar, Khairul Gunawan di tempat yang sama.

Menurutnya, saat ini umat Islam tidak boleh tinggal diam dengan pelecehan ayat Alquran yang dilakukan Ahok. Ia bahkan sempat menyuarakan negara khilafah. "Kita tuntutan Ahok agar mendapat hukuman dan kedua kita berjuang untuk negara khilafah yang akan menghancurkan orang zalim," katanya.

Sementara, perwakilan dari tim hukum HTI, Ahmad Khozinuddin mengatakan, secara hukum Ahok sudah dapat ditangkap oleh kepolisian dengan beberapa pasal yang dia sebutkan.

"Seperti pasal 156 ayat a tentang penodaan agama bahwa Ahok dapat ancaman lima tahun karena secara terang-terangan melakukan penodaan terhadap salah satu agama," ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan, dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP polisi juga diberikan wewenang untuk menangkap Ahok. Karena itu, kata dia, tidak ada alasan lagi polisi untuk membiarkan Ahok.

"Ada alasan kuat untuk menangkap Ahok karena dengan mulut besarnya dikhawatirkan akan menghina umat Islam lagi. Makanya harus ditangkap. Minta maaf *aja gak* tulus kan. Bukan terhadap penodaannya, tapi kegaduhannya," ucapnya.

4. Ahok Datangi Bareskrim Polri Soal Kasus Al Maidah 51

Senin 24 October 2016 11:54 WIB

Rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/ Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) datang ke Bareskrim Polri yang berlokasi di Gambir Jakarta Pusat. Ahok yang menggunakan baju batik coklat datang pada pukul 10.17 WIB dan langsung didampingi oleh orang Bareskrim Polri.

"Kasus pulau seribu, soal surat Al Maidah," kata Ahok sebelum masuk lift, Senin (24/10). Sebelumnya Ahok datang ke Istana Negara Republik Indonesia. Ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan Bareskrim Polri harus bertindak cepat memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan pelecehan Alquran, Ahad (23/10). Hal tersebut untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

5. Klarifikasi KH Ma'ruf Amin tentang Sikap Keagamaan MUI

Rabu 26 October 2016 17:32 WIB

Rep: Amri Amirullah/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rois Syuriah PBNU, KH.Ahmad Ishomuddin melalui tulisan di laman *Facebook*-nya, mengklarifikasi sikap keagamaan MUI dari Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin yang juga Rais Aam PBNU. Ishomuddin mengungkapkan, pada Rabu, (26/10) siang, ia bersama jajaran Syuriah PBNU mengikuti rapat Syuriah PBNU di Lantai IV Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Rais Aam, KH. Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI Pusat. "Dalam pengantar rapat tersebut beliau lebih dahulu mengklarifikasi tentang pernyataan sikap keagamaan MUI yang di dunia maya banyak disalahpahami sebagai fatwa MUI," ujarnya.

Ada beberapa poin pernyataan Kiai Ma'ruf sebagai klarifikasi terkait sikap keagamaan MUI. Pertama, pernyataan sikap keagamaan MUI itu adalah respon terhadap pernyataan keagamaan di Kepulauan Seribu oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar diproses melalui jalur hukum.

"Yang disikapi MUI bukanlah persoalan tafsir Alquran surat Al-Maidah ayat 51," tulisnya.

Kedua, MUI diisukan telah memasuki wilayah politik. Sebenarnya, isu itu tidak benar, karena Ahok lah yang telah memasuki wilayah agama yang bukan menjadi kewenangannya.

Ketiga, MUI dituduh telah melakukan kegaduhan, isu ini juga tidak benar. Dalam kasus ini, MUI hanya menganalisis agar masalah hukumnya diselesaikan pihak yang berwenang atau kepolisian, agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

Keempat, MUI tidak mendukung dan tidak menganjurkan umat Islam untuk terjun mengikuti demonstrasi pada tanggal 4 Nopember 2016 yang akan datang. Lambang MUI tidak boleh disalahgunakan untuk mendukung agar umat Islam turut dalam rencana demonstrasi tersebut.

Kelima, demikian pula bila ada anggota MUI ikut demonstrasi itu atas nama pribadi, tidak mewakili MUI. "Apabila ada sebagian umat Islam yang mengikuti demonstrasi itu, mereka wajib menjaga keamanan dan tidak bersikap anarkis demi menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI," tulis KH. Ahmad Ishomuddin merujuk pernyataan Kiai Ma'ruf.

6. Gelar Perkara Kasus Ahok Tunggu Periksa Saksi Ahli

Selasa 01 November 2016 13:14 WIB

Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan usai penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli.

"Gelar perkara masih menunggu seluruh saksi ahli diminta keterangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam acara 'Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama?' di Jakarta, Selasa (1/11).

Menurutnya gelar perkara tahap awal ini akan menentukan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. "Kami minta publik untuk bersabar. Kami sangat hati-hati (menangani kasus), terlebih ini momennya Pilkada. Enggak bisa (penyelidikan) diburu-buru," katanya.

Irjen Boy meyakinkan bahwa polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin. Menurutnya, terkait kasus Ahok, tercatat ada 11 laporan yang melaporkan Ahok di Bareskrim dan beberapa polda lainnya yakni Polda Metro Jaya, Polda Sulteng dan Polda Sumsel.

"Sebelas laporan tersebut sudah disatukan berkasnya dan dijadikan landasan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sejauh ini, kata dia, penyidik Polri telah memeriksa 15 saksi yakni beberapa saksi pelapor, penyebar video ke media sosial, staf gubernur dan lima orang saksi ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa. "Dari pelapor, masih kurang empat saksi lagi," katanya.

Selain itu, penyidik juga memintai keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Sementara video pidato Ahok yang direkam staf Pemprov DKI Jakarta juga telah dikantongi oleh penyidik.

"Jadi fakta (hukum) bukan dibuat oleh polisi. Polisi cuma mengumpulkan fakta-fakta hukum yang komprehensif, apa ini termasuk penodaan agama Islam atau tidak," katanya.

Selain Kadivhumas Polri, beberapa tokoh yang menjadi pembicara dalam acara tersebut yakni Jubir Ormas Front Pembela Islam (FPI) Munarman, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, anggota Kompolnas Andrea Poelungan dan politisi PDIP Erwin Moeslimin Singajuru.

Sebelumnya, potongan video Ahok berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena dirinya menyebutkan adanya pihak-pihak yang melarang untuk memilih pemimpin non-muslim dengan dasar isi dari surah Al Maidah ayat 51, sehingga pernyataannya tersebut mengundang kontroversi publik.

7. Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok

Selasa 01 November 2016 16:04 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Angga Indrawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memastikan tak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh pejabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Merdeka, Selasa (1/11).

"Presiden mengatakan bahwa ini memang sudah diproses oleh Polri dan beliau menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses itu," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11).

Ma'ruf sendiri menilai isu dugaan penistaan agama sudah melebar dan banyak dikaitkan pada hal lain yang sudah berada di luar konteks. Karenanya, agar tak menambah kekisruhan, kata dia, para ulama berharap kasus tersebut diselesaikan secara profesional oleh penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta masyarakat memahami bahwa proses hukum tidak bisa serta-merta. Polisi tidak dapat langsung melakukan penahanan pada Ahok seperti yang diinginkan para pendemo. Sebab, penahanan baru boleh dilakukan jika unsur pidananya terpenuhi.

"Ada proses yang tidak serta-merta. Kita ingin masyarakat memahami ini dan bersikap tenang," kata Wiranto.

8. Kapolri: Tuntutan Presiden Penjarakan Ahok Malah Salah

Kamis 03 November 2016 07:32 WIB

Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai tuntutan pendemo yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk memenjarakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok atas kasus yang menjerat mantan Bupati Belitung Timur itu, tidak tepat.

"Sebetulnya tuntutan agar Bapak Presiden menyampaikan pernyataan terbuka mendukung proses hukum (kasus Ahok) sudah disampaikan kemarin. Lalu demonstran juga mengajukan tuntutan kedua agar penjarakan Ahok. Kalau itu dilakukan, tidak mungkin," kata Kapolri, di sela-sela Apel Kesiapsiagaan Tahap

Kampanye Dalam Rangka Pilkada Serentak 2017, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (2/11).

Pasalnya, menurutnya, presiden adalah pimpinan lembaga eksekutif sedangkan penanganan kasus hukum Ahok merupakan kewenangan yudikatif. Jika presiden terlibat dalam penanganan kasus hukum maka hal tersebut merupakan bentuk intervensi yang tidak dibenarkan dalam Undang-undang.

"Pak Presiden adalah pimpinan eksekutif bukan yudikatif. Sementara (proses hukum kasus Ahok)?teknis hukum dan domain dari yudikatif. Jadi kalau ada yang menuntut presiden memenjarakan Ahok, itu membuat presiden salah dalam intervensi teknis hukum. Jadi sebetulnya tak perlu lagi demo ke Istana (Presiden)," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menyatakan mendukung penegakan hukum terhadap Ahok dan tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Ahok. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menerima kunjungan dari pengurus ormas dan lembaga Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama di Istana Kepresidenan, pada Selasa (2/11).

Bareskrim hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Basuki T. Purnama. Setidaknya 15 orang saksi telah dimintai keterangan dalam kasus tersebut, termasuk beberapa orang saksi ahli.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan gelar perkara kasus ini akan dilakukan bila Bareskrim telah memeriksa 10 saksi ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa.

Beberapa ormas Islam berencana mengerahkan massa dari berbagai daerah untuk mengadakan unjuk rasa menuntut adanya tindakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T

Purnama yang juga merupakan kandidat calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak 2017.

Unjuk rasa rencananya akan digelar di Jakarta Pusat di antaranya di Balai Kota, Istana Presiden, Monumen Nasional dan beberapa daerah lain di antaranya Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bekasi dan Tangerang, pada 4 November 2016.

9. Jusuf Kalla: Ahok akan Diproses Hukum dengan Tegas dan Cepat

Jumat 04 November 2016 18:37 WIB

Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat. "Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa. Saudara Ahok akan dilaksanakan proses hukum yang tegas dan cepat," kata Wapres di Jakarta, Jumat (4/11).

Hal itu disampaikan Wapres usai berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantor Wapres. Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Di antara beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang ditemui Wapres adalah KH Bachtiar Nashir (Arrahman Quranic Learning), Ustaz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), dan Ustaz Misbah (Front Pembela Islam). Sedangkan dari pihak pemerintah JK, didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Kepresidenan RI Johan Budi, Menteri Agama Lukman Saifuddin, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Selain itu terlihat pula anggota DPR dari Komisi III DPR, yakni Asrul Sani dan Abu Bakar Al Habsyi. Unjuk rasa 4 November yang dilakukan sejumlah ormas terkait dengan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

10. Buya Syafii Apresiasi Aksi 4 November

Jumat 04 November 2016 20:16 WIB

Rep: Hasanul Rizqa/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga malam ini. Menurut Buya Syafii, unjuk rasa yang berpusat di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, itu berlangsung tertib.

Seperti diketahui, gelombang pengunjuk rasa itu mendesak agar Basuki Tjahaja Purnama segera diadili. Ahok dilaporkan telah menghina kitab suci umat Islam, Alquran.

Pelecehan yang dilakukan Ahok mengemuka setelah rekaman pidatonya dalam sebuah kunjungan kerja di Kepulauan Seribu tersebar luas. Namun, Buya meminta penghinaan dan penistaan itu benar-benar dikaji. "Pelajari betul-betul," ujar Buya Syafii saat dihubungi, Jumat (4/11), malam.

Sejauh ini, proses hukum di kepolisian terkait kasus tersebut masih bergulir. Buya Syafii berharap, umat Islam bersabar. Dia ingin agar isu yang memecah-belah bangsa bisa dihindari. "Kita harus tetap bersikap adil," katanya.

Usai waktu shalat maghrib, massa aksi demonstrasi yang menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, Jumat (4/11), akhirnya membubarkan diri secara bertahap. Sebagian dari mereka mulai bergerak meninggalkan kawasan ring satu Jakarta yang tadinya menjadi titik pusat digelarnya aksi.

11. GNPF-MUI Belum Pastikan Ada Aksi Lanjutan

Senin 07 November 2016 12:20 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Damanhuri Zuhri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Ustaz Bachtiar Nasir, menegaskan belum ada aksi lanjutan setelah *Aksi Damai Bela Islam II* yang digelar Jumat 4 November lalu. Hal ini sekaligus membantah adanya informasi yang beredar bahwa ada postingan 'Aksi Bela Islam III 25 November 2016 dengan hashtag *#LengserkanJokowi*, jika Ahok bebas'.

"Terkait aksi lanjutan belum kita rapatkan, adapun info yang beredar mereka paling mendengar selentingan-selentingan. Tapi secara resmi GNPF-MUI belum ada (info), kapan dan tanggal berapanya," ungkap Ustaz Bachtiar Nasir kepada *Republika.co.id*, Senin (7/11).

Ustaz Bachtiar mengatakan, masih mencermati situasi di tiga hingga empat hari mendatang. Sedangkan mengenai gambar Aksi Bela Islam III yang beredar di media sosial, ia menegaskan itu keluar bukan dari GNPF-MUI. "Gambar itu bukan dari GNPF," ujarnya.

Terkait proses hukum Ahok, yang pemanggilan terlapor hari ini dan akan dilakukan gelar perkara secara terbuka, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, bisa jadi gelar perkara yang terbuka ini sekadar sandiwar. Sebab proses hukum yang sejak awal berjalan, ia mensinyalir, sangat jelas sekali untuk melindungi Ahok dari jeratan hukum.

"Kita lihat saja nanti, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menguntungkan dan meringankan Ahok. Dan mereka yang gelar perkara, mereka yang ajukan pertanyaan. Lihat saja nanti," ujar alumnus Universitas Islam Madinah ini menerangkan.

Bila kemudian indikasi dari gelar perkara tersebut, sudah mengarah pada hal-hal yang menguntungkan dan meringankan Ahok dari jeratan hukum, Ustaz Bachtiar menegaskan, baru pihaknya, GNPF-MUI, akan membahas rencana aksi selanjutnya, 'Aksi Bela Islam III', untuk menyerukan seluruh umat Islam berdemonstrasi secara besar-besaran kembali, begitu ujanya menambahkan.

12. Jokowi Minta Pemeriksaan Ahok Digelar Transparan

Senin 07 November 2016 10:36 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Polri agar melakukan proses pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan. Ahok akan diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri pada Senin (7/11) terkait kasus dugaan penistaan agama.

"Saya sudah perintahkan pada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum yang membolehkan atau tidak. Kalau boleh saya minta dibuka biar tidak ada syak wasangka," kata Presiden, usai meninjau ruas jalan tol baru di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur, Senin (7/11).

Sebelumnya, pada Sabtu (5/11), Presiden secara khusus memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk meminta Polri melakukan proses hukum terhadap Ahok secara terbuka. Hal ini demi meyakinkan publik bahwa pemerintah bersikap profesional dalam hal penegakan hukum.

"Saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan proses, menggulirkan proses penyelidikan. Ini dalam rangka untuk menangkap aspirasi publik yang berkembang," kata Tito.

Bareskrim Mabes Polri sejauh ini telah memanggil 22 orang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga telah meminta keterangan dari 10 saksi ahli, termasuk saksi ahli yang diajukan terlapor.

13. Ahok Disuguhkan 22 Pertanyaan, Ini Hasilnya

Senin 07 November 2016 18:39 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama terhadap Surah al-Maidah ayat 51. Selama kurang lebih sembilan jam penyidik mencecar Ahok terkait pernyataannya saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Analisis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, ada 22 pertanyaan yang ditanyakan penyidik pada pemeriksaan kedua Ahok pada hari ini. Sehingga jika digabungkan dari pemeriksaan sebelumnya, total ada 40 pertanyaan penyidik kepada Ahok.

"Ada beberapa kata yang memang terucap di situ, lalu disunting seseorang dan dijadikan viral, yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama, dan menjadi masalah bagi umat Islam, jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap dan komprehensif," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/11).

Menurut Rikwanto, penyidik hari ini juga menuntaskan pemeriksaan kepada Ahok sebagai saksi dalam kasus ini. "Sementara ini selesai sudah buat Pak Ahok, kemungkinan tidak lagi diperiksa Pak Ahok sampai gelar perkara," ujar Rikwanto.

Selanjutnya, pihaknya dalam pekan ini akan fokus memeriksa sejumlah saksi lain yang belum diperiksa berkaitan dengan kasus tersebut. Rikwanto menuturkan, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa hampir 25 orang saksi yang terdiri dari saksi pihak pelapor, terlapor, dan ahli.

"Minggu ini ada delapan orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah itu selesai, dan dikumpulkan, insya Allah minggu depan akan gelar perkara," katanya.

Selain itu, Rikwanto mengungkapkan, Bareskrim juga akan memanggil pengunggah cuplikan video pernyataan Ahok, Buni Yani, pada Kamis (10/11) mendatang. Buni Yani akan dimintai keterangan, sebagai saksi berkaitan dengan cuplikan video yang diunggahnya ke media sosial.

Adapun, selain memanggil Ahok, pada hari ini Bareskrim juga memintai keterangan empat saksi lain, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. "Hari ini dimintai keterangan juga dari MUI, Kemenag, Imam besar Masjid Istiqlal. Semua diperiksa di Bareskrim di kantor KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kecuali yang MUI ya," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto.

Menurutnya, pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi, sehingga gelar perkara bisa segera dilaksanakan pekan depan. Dengan begitu, target penyelesaian penyelidikan kasus dalam dua minggu seperti perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa terealisasi. "Mudah-mudahan, optimistis bisa, mohon doanya," ujar Rianto.

14. Ahok Diperiksa 9 Jam

Selasa 08 November 2016 13:00 WIB

JAKARTA - Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri

sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama, Senin (7/11). Ia diperiksa para penyidik selama sembilan jam.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik memberikan 22 pertanyaan terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua tersebut. Ahok keluar sekitar pukul 17.00 WIB disertai pendamping hukumnya.

Saat keluar, Ahok tidak mengeluarkan banyak komentar dan melimpahkan jawaban kepada para penyidik. "Saya kira sudah jelas tadi sembilan jam diperiksa. Kalau mau tahu yang lain, silakan tanya kepada para penyidik. Yang jelas, sekarang saya ingin pulang, soalnya lapar," ujar Ahok, di Bareskrim Mabes Polri, Senin (7/11).

Usai memberikan keterangan, Ahok langsung menuju mobil miliknya dan meninggalkan Mabes Polri. Puluhan pendukung Ahok yang mengenakan baju bermotif kotak-kotak terus berteriak "Ahok tidak bersalah" saat pria asal Belitung itu keluar dari gedung Bareskrim.

Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna, mengatakan, pemeriksaan Ahok kemarin berlangsung selama sembilan jam. Pemeriksaan tersebut melanjutkan pada pemeriksaan Ahok pada (24/10) lalu. "Jadi, total 40 pertanyaan setelah dua kali pemeriksaan," ujar Sirra.

Ahok dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama melalui komentar yang ia keluarkan dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Kepada warga, Ahok terekam menyatakan bahwa mereka dibohongi pihak-pihak tertentu dengan surah al-Maidah ayat 51. Ahok tak menjelaskan siapa pihak-pihak yang menurut dia menggunakan ayat itu untuk berbohong.

Pada Jumat (4/11) pekan lalu, ratusan ribu Muslim menggelar aksi damai menuntut proses hukum kasus itu diselesaikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menemui perwakilan peserta

aksi manjajikan proses hukum kasus Ahok akan diselesaikan dalam dua minggu.

Ahok tiba di Mabes Polri pukul 08.13 WIB, kemarin. Ia didampingi sejumlah politikus seperti Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji alias Ongen. Selain itu, datang juga politikus PDIP Merry Hotma, Charles Honoris, Junimart Girsang, dan Trimedy Panjaitan. Prasetyo mengatakan, dirinya datang untuk memberi dukungan moril kepada calon gubernur yang mereka sokong.

Sebagian dari para politikus yang datang kemarin mendampingi Ahok hingga ke ruang pemeriksaan. Sirra Prayuna mengatakan, Trimedy Panjaitan mendampingi sebagai ketua bidang hukum DPP PDIP, Junimart Girsang sebagai kepala Badan Bantuan Hukum PDIP, dan Ruhut Sitompul sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok.

Analisis Kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengiyakan, ada 22 pertanyaan yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ahok. "Sementara ini selesai sudah buat Pak Ahok. Kemungkinan tidak lagi diperiksa, Pak Ahok, sampai gelar perkara," ujar Rikwanto. Ia menuturkan, sejauh ini penyidik sudah memeriksa hampir 25 orang saksi yang terdiri dari saksi pihak pelapor, terlapor, dan ahli.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri juga mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin. Bareskrim datang untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.

"Ketua Umum MUI telah menjelaskan bahwa benar MUI telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara BTP (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada Republika, kemarin. Pada 11 Oktober,

MUI mengeluarkan sikap resmi bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tergolong menghina Alquran dan ulama.

Menurut Zainut, di antara yang diajukan penyidik yakni prosedur penetapan pendapat dan sikap keagamaan tersebut, substansinya, dan kedudukan hukumnya. "Pendapat dan sikap keagamaan derajat kedudukannya lebih tinggi," kata Zainut.

Pasalnya, pendapat dan sikap keagamaan itu ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian setelah melalui kajian dari beberapa komisi dan putusannya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. rep: Dian Fath Risalah, Fauziah Mursid Qommarria Rostanti **ed:** Fitriyan Zamzami

15. Kapolri: 2 Desember Jangan Ganggu Ketertiban Umum

Senin 21 November 2016 15:42 WIB

Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mempersilakan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk melakukan aksi damai di Jakarta pada 2 Desember 2016. Namun, Kapolri meminta, aksi itu tidak mengganggu ketertiban umum.

"Demonstrasi adalah penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusi warga. Silakan saja. Asal damai dan tidak mengganggu ketertiban umum," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Namun, dia menyebutkan, bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam aksi demonstrasi. Di antaranya melakukan aksi yang mengganggu kepentingan umum dengan menggelar aksi di jalan protokol.

Untuk itu pihaknya melarang rencana pelaksanaan shalat Jumat di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta pada 2 Desember. "Kalau mau shalat Jumat di (Mesjid) Istiqlal, Lapangan Banteng, Lapangan Monas, silakan. Tapi kalau di jalan protokol seperti di Jalan Thamrin, Bundaran HI hingga Jalan Sudirman, itu tidak boleh karena itu jalan umum mengganggu para pengguna jalan. Itu dipastikan dilarang," katanya.

Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) mengumumkan rencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016 untuk menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. "Karena Ahok tidak ditahan, maka GNPF MUI menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 dengan tema Bersatu dan Berdoa Untuk Negeri," kata juru bicara FPI Munarman.

Kendati demikian, GNPF MUI berjanji aksi massa 2 Desember akan berlangsung damai. Dalam aksi 2 Desember, GNPF MUI akan menggelar ibadah shalat Jumat, shalawat dan istighosah di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia. "Kegiatannya adalah shalat Jumat bersama di mana posisi imam di Bundaran HI," katanya.

Sementara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menambahkan tanggal 2 Desember bertepatan dengan Jumat Kubro dan awal Maulid Akbar karenanya dinilai sebagai saat yang tepat untuk berdoa bersama.

16. Ahok: Saya Mohon Doa Supaya Proses Hukum Selesai

Kamis 01 December 2016 18:21 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertama kalinya tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka

mulut pascapelimpahan tahap dua berkas perkara di Kejaksaan Agung RI, Kamis (1/12). Sebelumnya, Ahok memilih bungkam sejak ditetapkan menjadi tersangka kasus penodaan agama pada (16/11) lalu oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Selamat pagi. Terima kasih atas liputan yang saudara lakukan, proses semua telah selesai," ujar Ahok di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

Ahok meminta doa agar proses hukum yang berlangsung dapat berjalan dengan adil dan terbuka. Ahok juga selama proses penyelidikan hingga penyidikan selalu kooperatif memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

"Saya mohon doa supaya proses ini berjalan adil, terbuka, dan saya bisa selesai dari permasalahan ini. Jadi saya bisa menggunakan waktu saya untuk melayani warga Jakarta ke depan," ujarnya kemudian berlalu meninggalkan Kejaksaan Agung.

Kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan kliennya akan makan siang terlebih dahulu sebelum melaksanakan agenda selanjutnya, kembali melakukan *blusukan*.

17. Kapolri: Apa yang Kami Lakukan terhadap Ahok Sudah Maksimal

Jumat 02 Desember 2016 10:14 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikhah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengikuti doa bersama dengan ribuan massa Aksi Bela Islam jilid tiga di lapangan silang Monas, Jumat (2/12). Tito meminta dukungan masyarakat agar upaya Polri dalam menegakkan kasus hukum tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum.

"Mohon dukungan agar proses hukumnya bisa terus berjalan, mari kita doa bersama agar ini bisa terus berjalan. Insya Allah," ujar Tito di atas mimbar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Tito juga menjelaskan tersangka kasus penistaan agama tersebut sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Tito menyinggung apa yang diupayakan polisi sudah maksimal untuk dapat menetapkan Ahok sebagai tersangka dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang juga menyangkut Gubernur DKI non-aktif ini.

"Proses hukum sudah selesai dan tersangkanya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, berulang kali diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka," ujar Tito.

Ahok ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu (16/11). Kemudian berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap oleh kejaksaan Agung RI pada Kamis (1/12).

Rencananya kasus penodaan agama ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan lokasi peristiwa awal mula kasus ini muncul, yakni saat Ahok kunjungan ke pulau Pramuka di Kepulauan Seribu pada (27/9) lalu.

18. Kapolri Ajak Berdoa untuk Proses Hukum Ahok

Jumat 02 Desember 2016 10:29 WIB

Red: Angga Indrawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta massa aksi 212 berdoa bersama mendukung proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama. Kapolri meminta dukungan masyarakat luas. Massa yang memadati lapangan Monas serempak menyambut antusias doa Kapolri.

"Saya sangat mohon dukungannya," kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam assai doa bersama di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (2/12).

Kapolri meminta massa untuk doa bersama agar proses hukum Ahok terus berjalan. "Mari kita berdoa bersama-sama, semoga proses hukumnya terus berjalan, kami akan terus kawal," ucap Kapolri.

Di tengah-tengah sambutan tersebut, massa aksi doa bersama secara spontan mengucapkan "buktikan-buktikan!".

Acara doa bersama 2 Desember 2016 digelar di Monas mulai Jumat pagi dengan pembacaan zikir, shalawat, hingga diakhiri shalat Jumat berjamaah. Sebagian massa sudah mendatangi kawasan Monas pada Kamis (1/12) malam dan Jumat dini hari, sementara Masjid Istiqlal sudah dibanjiri massa sejak Kamis (1/12) malam dari berbagai daerah sebagai tempat berkumpul dan bermalam.

19. Pemprov DKI Siap Sambut Aksi Bela Islam Jilid III

Kamis 10 November 2016 10:54 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Damanhuri Zuhri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, Pemprov DKI siap menyambut aksi Bela Islam, yang isunya akan digelar pada 25 November 2016. Sebab, berkaca dari sebelumnya, aksi yang berlangsung berjalan damai, semua bisa saling menjaga, sehingga Jakarta tetap aman.

"Pemerintah Provinsi (DKI) siap," kata Sumarsono usai mengikuti Upacara Ziarah Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2016 di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan Kamis (10/11).

Pria yang akrab disapa Soni itu pun berharap, massa aksi dibangunkan kesadarannya, mengingat proses hukum terhadap Ahok, terkait dugaan penistaan agama terus berjalan.

Namun begitu, jika pun aksi tersebut tetap berjalan, Soni menegaskan kesiapannya. Bukan untuk menghadapi massa aksi, melainkan menyambutnya, agar mereka merasa nyaman dalam menyampaikan aspirasi.

"Ndak masalah. Kemarin juga kita siap betul. Kemarin kita nggak menghadapi demo tapi melayani demonstran supaya nyaman dalam menyampaikan aspirasi," ungkap Sumarsono menjelaskan.

Seperti diketahui, beredar kabar massa aksi bela islam ingin melanjutkan menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi 4 N yang dirasa belum menemukan ujung pangkal. Tuntutannya masih sama, yakni meminta Ahok dipenjara karena dianggap telah menistakan Alquran.

20. Ahok Divonis 2 Tahun, Hakim: Pidana tidak Terkait Pilkada DKI

Selasa 09 May 2017 12:05 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim pada peradilan kasus penodaan agama oleh Gubernur Pejabat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa (9/5) memutuskan untuk memvonis Ahok dengan hukuman penjara selama dua tahun. Hakim menyatakan Ahok terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Majelis hakim menyatakan, meski kejadian ini berdekatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta, kasus penodaan agama oleh Ahok ini tidak terkait dengan pilkada itu. Namun, hakim

menegaskan, kasus ini adalah murni tindak pidana berupa penodaan agama.

"Ini bukan terkait pilkada, tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama," kata hakim ketua membacakan pertimbangan hukum dalam putusan Ahok pada sidang di Auditorium Kementerian, Jalan Harsono Harsono RM, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Dalam menentukan putusannya, hakim menimbang pada dua pertimbangan. Dua pertimbangan itu adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang meringankan adalah kepatuhan dan kerja sama Ahok dalam menjalani proses peradilan.

Selain itu, Ahok juga berlaku sopan dalam menjalani proses peradilan. Lalu, Ahok juga belum pernah dihukum. Sementara, pertimbangan yang memberatkan adalah ketidakmauan Ahok untuk mengakui kesalahannya. Selain itu, Ahok juga terbukti mencederai umat Islam melalui perkataannya di Kepulauan Seribu, 27 November 2016 lalu.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ahok agar menjalankan hukuman penjara satu tahun dengan dua tahun masa percobaan. Namun, majelis hakim memutuskan untuk memidanakan Ahok dengan hukuman dua tahun penjara.

2. Teks Berita Nu.Or.Id

1. Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam

Senin, 10 Oktober 2016 11:14 [Nasional](#)

Jakarta, *NU Online*

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah tahun depan, meminta maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang menyebut Al-

Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Ahok mengakui ucapannya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam.

"Yang pasti, saya sampaikan kepada umat Islam atau orang yang tersinggung, saya mohon maaf," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Ahok menegaskan dia tidak bermaksud menyinggung perasaan umat Islam apalagi sampai menistakan agama.

"Tidak ada maksud saya melecehkan Al-Qur'an. Kalian bisa lihat suasananya seperti apa," katanya.

"Saya bukan anti-Islam. Saya sejak kecil, bisa dilihat --bukan untuk riya-- sekolah Islam kami bantu izin, sudah berapa kita bantu izin. Untuk madrasah, juga bantuan masjid. Bisa dilihat tindak-tanduk saya, apakah musuhin Islam atau melecehkan Al-Qur'an," katanya.

Ahok menjelaskan bahwa ia menyebutkan Surat Al Maidah ayat 51 dengan harapan tidak ada warga yang salah menafsirkan.

"Orang Pulau Seribu pun tidak ada satu pun yang tersinggung, kami tertawa-tawa kok. Niatnya waktu itu hanya ingin menunjukkan, sebetulnya saya enggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu bingung," katanya.

Namun dia akhirnya menyadari bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak boleh dibicarakan di hadapan publik secara luas.

"Makanya saya mengerti sekali. Ini memang urusan pribadi, tafsiran pribadi, semua orang punya hak yang sama. Urusan agama adalah pribadi jangan dikeluarkan di publik," kata dia. (Antara/Mukafi Niam)

2. Sikapi Pernyataan Ahok, Ketum PBNU: Tak Boleh Emosional!

Rabu, 12 Oktober 2016 12:02 Nasional

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kang Said) menyayangkan keluarnya pernyataan sikap dan rekomendasi sejumlah pihak perihal pernyataan kontroversial Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama, termasuk surat pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ia nilai cenderung emosional.

“Semestinya kita sikapi pernyataan kontroversial itu dengan kepala dingin dan bijak,” kata Kang Said di Jakarta, Rabu (12/10) pagi.

Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur ini mengatakan, siapapun bisa mengalami sabqul lisan, keseleo lidah. Tetapi kalau yang bersangkutan sudah meminta maaf di tengah publik dan menyatakan bahwa pernyataan itu tidak lahir dari kesengajaan dan tidak bermaksud melecehkan Al-Quran, kita harus memaafkannya.

“Kalau ia mengakui bahwa pernyataan itu tidak disengaja dan tidak direncanakan, ya kita terima. Kita hanya mengetahui lahiriahnya. Masak kita mau belah hatinya untuk mengetahui batinnya? Saya memaafkan,” kata Kang Said.

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini mengatakan, umat Islam wajar tersinggung atas pernyataan Ahok. Karena apalagi Jakarta yang terkenal dengan para kiai dan habaibnya dipimpin oleh seorang gubernur non-Muslim.

“Ahok salah. Kita tahu bicaranya meledak-ledak dan sulit terkontrol. Tetapi kita harus memaafkannya. Allah menerima kalau hamba-Nya yang berdosa bertobat,” jelas Kang Said.

Ia juga menyebut hadits Rasulullah SAW yang menyatakan

bahwa kita hanya memutuskan berdasarkan lahiriah, bukan batinnya.

Ia juga mengoreksi etika komunikasi Ahok. Menurutnya, siapapun harus santun dalam berkomunikasi. Kalau non-Muslim bersikap santun, pasti mendapat simpatik. Siapun di Indonesia ini harus menjaga lisan dan saling menghargai satu sama lain.

“Saya tidak bela Ahok. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan dialog. Tidak perlu jalur formal dengan tuntutan hukum,” tandas Kang Said. (Alhafiz K)

3. Waspadai Skenario Adu Domba di Jakarta!

Kamis, 13 Oktober 2016 16:30 [Nasional](#)

Jakarta, *NU Online*

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Rumadi Ahmad mengungkapkan bahwa Pilkada DKI Jakarta telah berkembang ke arah yang cukup mengkhawatirkan.

Menurutnya, bukan saja soal Cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pernyataannya di Kepulauan Seribu yang memicu kontroversi, tetapi juga respon sebagian kelompok yang sengaja memanfaatkan isu ini untuk tujuan-tujuan lain di luar Pilkada DKI.

Sebenarnya situasi pasca kontroversi pernyataan Ahok mengenai Surat al-Maidah 51 sudah mulai mereda setelah Ahok minta maaf secara terbuka atas ucapannya yang dianggap menyinggung umat Islam.

“Tokoh-tokoh agama ternama juga menanggapi positif permintaan maaf itu. Semua itu menjadikan situasi yang semula penuh ketegangan mulai mereda,” ujar Rumadi, Kamis (13/10) melalui keterangan tertulisnya kepada *NU Online*. Dia juga menulis pernyataannya ini di akun *Facebook* miliknya.

Tapi belakangan situasi kembali memanas, imbuhnya, terutama setelah MUI mengeluarkan pernyataan sikap yang pada intinya menyatakan Ahok telah melakukan penistaan agama. Situasi tambah semakin memanas karena sebuah stasiun TV swasta menggelar acara dialog secara live kurang lebih 4 jam, dengan tema “Setelah Ahok Minta Maaf”.

Berkembang juga berita, besok pagi, Jumat 14 Oktober 2016 akan ada aksi besar yang dimulai dari Masjid Istiqlal, dengan tema “Tangkap Ahok Penista Agama”. Situasi ini, ungkap Rumadi, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga Gereja Katedral yang letaknya di sebelah masjid Istiqlal merasa perlu membuat himbauan khusus kepada Jemaatnya agar besok hari itu tidak mendekat ke kawasan Katedral jika tidak ada keperluan mendesak.

“Saya menduga ada kelompok-kelompok yang mengambil untung dari situasi ini untuk merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan dengan mengadu domba antara umat Islam dan non-Islam, bahkan antar sesama umat Islam yang mempunyai haluan yang berbeda. Mereka akan menunggangi organisasi-organisasi keagamaan, untuk memuluskan agenda adu dombanya,” papar Dosen UIN Syarif Hidayatullah dan STAINU Jakarta ini.

Siapakah kelompok itu? Sebenarnya tidak terlalu sulit dikenali menurut Rumadi. Mereka bukan saja benci pada Ahok, tapi juga benci tatanan Negara ini, benci pada Pancasila, benci pada NKRI dan seterusnya yang dianggap sebagai sistem Negara thagut.

“Anasir-anasir kelompok radikal akan berkumpul dengan memanfaatkan persoalan Ahok menjadi pintu masuknya. Namun, yang dituju bukan soal Ahok, tapi lebih besar dari itu,” ungkapnya.

Karena itu, tandas Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) ini, waspada dengan skenario adu domba yang sudah mulai terasa. Bukan soal Ahok dan Pilkada DKI, tapi ini soal keutuhan bangsa. (Red: Fathoni)

4. Datangi Bareskrim, Ahok Klarifikasi Al-Maidah 51

Senin, 24 Oktober 2016 14:05 Nasional

Jakarta, NU Online

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Kantor Bareskrim Polri, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait kasus dugaan penistaan agama tertentu yang melibatkannya.

"Saya pikir saya datang supaya bisa memberikan klarifikasi kepada polisi atas kasus di Pulau Seribu. Yang soal surat Al Maidah," kata Gubernur Ahok, di Jakarta Pusat, Senin.

Ahok pun langsung bergegas masuk ke dalam kantor Bareskrim. "Nanti ya, nanti ya," katanya pada awak media.

Sementara Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan Bareskrim belum menjadwalkan pemeriksaan Ahok dalam kasus ini. "Dia (Ahok) datang atas inisiatif sendiri. Dia minta waktu untuk diperiksa," kata Brigjen Agus saat dikonfirmasi.

Sejauh ini polisi sudah meminta keterangan sembilan orang saksi termasuk penyebar video ke media sosial dan staf gubernur. Polisi juga telah menyambangi Kepulauan Seribu untuk meminta keterangan warga setempat soal video pidato Ahok.

Sebelumnya, potongan video Ahok berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena dirinya menyebutkan adanya pihak-pihak yang melarang untuk memilih pemimpin non-muslim dengan dasar isi dari surat Al Maidah ayat 51, sehingga pernyataannya tersebut mengundang kontroversi publik.

Ahok sudah menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram miliknya, @basukibtp dan menganjurkan masyarakat melihat langsung video versi utuh agar dapat menerima pernyataannya secara lengkap tanpa dipotong, terutama pada menit 23.40 hingga 25.35. (Antara/Mukafi Niam)

5. Kiai Ma'ruf: MUI Tidak Dukung Demo Terkait Ahok

Rabu, 26 Oktober 2016 19:52 Nasional

Jakarta, NU Online

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menyatakan lembaga yang dipimpinnya tidak mendukung demo-demo terkait tuduhan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok. Meskipun demikian, MUI juga tidak bisa melarang demo-demo tersebut karena dilindungi UU.

“Kita tidak mendukung adanya demo-demo, tetapi kita tidak bisa mencegah karena itu dibolehkan oleh UU. Paling MUI hanya menghimbau jangan berlaku anarkis, jangan sampai brutal, dengan akhlakul karimah, yang santun,” katanya kepada NU Online di gedung PBNU, Rabu (26/10).

Ia menegaskan simbol-simbol MUI tidak boleh digunakan dalam demo karena MUI sama sekali tidak terkait dengan demo-demo tersebut sebagaimana tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan pendapat MUI tersebut untuk kepentingan pilkada. “Saya bilang, orang MUI tidak terlibat, kalau ada orang MUI yang ikut di sana, saya nyatakan, tidak ada hubungannya dengan MUI.

Dikatakannya, keputusan yang dikeluarkan MUI adalah pendapat keagamaan MUI terhadap pernyataan Ahok, bukan tafsir Al-Maidah, yang setelah dikaji oleh komisi fatwa disimpulkan bahwa memang ada penghinaan terhadap Al-Qur'an atau ulama.

“MUI sudah selesai, sudah menyerahkan ke polisi. Sekarang bolanya ada di polisi. Ada ahli-ahli hukum. MUI tidak masuk ke

wilayah itu. Kedua, soal desakan, MUI tidak mendesak, tetapi ormas-ormas Islam,” ujarnya.

Kiai Ma'ruf yang juga rais aam PBNU juga menegaskan, tidak ada perbedaan sikap antara NU dan MUI. “Kiai Said sudah menyatakan juga, ‘ya sudah kita maafkan tetapi diproses hukum.’ Kalau begitu, kan sama. Ya sudah, itu saja yang diomongkan Kiai Said, jadi sikapnya NU. Karena tidak beda, proses hukum. (Mukafi Niam)

6. Bareskrim Mintai Keterangan 10 Saksi Terkait Kasus Ahok

Selasa, 01 November 2016 14:11 Nasional

Jakarta, NU Online

Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama akan dilakukan setelah penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli.

"Gelar perkara masih menunggu seluruh saksi ahli dimintai keterangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam acara Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama?" di Jakarta, Selasa.

Menurutnya gelar perkara tahap awal ini akan menentukan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Kami minta publik untuk bersabar. Kami sangat hati-hati (menangani kasus), terlebih ini momennya Pilkada. Enggak bisa (penyelidikan) diburu-buru," katanya.

Irjen Boy meyakinkan bahwa polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin.

Menurutnya, terkait kasus Ahok, tercatat ada 11 laporan yang melaporkan Ahok di Bareskrim dan beberapa polda yakni Polda Metro Jaya, Polda Sulteng dan Polda Sumsel.

"Sebelas laporan tersebut sudah disatukan berkasnya dan dijadikan landasan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sejauh ini, kata dia, penyidik Polri telah memeriksa 15 saksi yakni beberapa saksi pelapor, penyebar video ke media sosial, staf gubernur dan lima orang saksi ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa.

"Dari pelapor, masih kurang empat saksi lagi," katanya.

Selain itu, penyidik juga memintai keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

Sementara video pidato Ahok yang direkam staf Pemprov DKI Jakarta juga telah dikantongi oleh penyidik.

"Jadi fakta (hukum) bukan dibuat oleh polisi. Polisi cuma mengumpulkan fakta-fakta hukum yang komprehensif, apa ini termasuk penodaan agama Islam atau tidak," katanya.

Selain Kadivhumas Polri, beberapa tokoh yang menjadi pembicara dalam acara tersebut yakni Jubir Ormas Front Pembela Islam (FPI) Munarman, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, anggota Kopolnas Andrea Poelungan dan politisi PDIP Erwin Moeslimin Singajuru.

Sebelumnya, potongan video Ahok berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena dirinya menyebutkan adanya pihak-pihak yang melarang untuk memilih pemimpin non-Muslim dengan dasar isi dari surat Al Maidah ayat 51, sehingga pernyataannya tersebut mengundang kontroversi publik.

Ahok yang juga merupakan kandidat calon Gubernur DKI itu dalam Pilkada 2017 itu sudah menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram miliknya, @basukibtp dan menganjurkan masyarakat melihat langsung video versi utuh agar dapat menerima pernyataannya secara lengkap tanpa dipotong, terutama pada menit 23.40 hingga 25.35. (Antara/Mukafi Niam)

7. PBNU Imbau Demo Bermartabat dan Segera Proses Hukum Ahok

Selasa, 01 November 2016 15:38 Nasional

Jakarta,

NU

Online

Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan para ulama dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Pada kesempatan itu umaro (pemerintah) dan ulama sepakat menjaga soliditas untuk mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan luar dan dari dalam.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang hadir pada kesempatan tersebut Selasa pagi (1/11) di Istana Merdeka, Jakarta, juga membahas demonstrasi yang akan berlangsung 4 November.

8. PBNU Apresiasi Aksi Berjalan Damai dan Ajak Masyarakat Percayakan pada Proses Hukum

Jumat, 04 November 2016 20:03 Nasional

Cirebon, NU Online

Terkait aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berlangsung dengan relatif tertib dan damai, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Kiai Said sebelumnya sempat mengkhawatirkan kalau aksi 4 Nopember bisa ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal.

"Saya bersyukur dan mengapresiasi aksi yang berjalan dengan relatif tertib dan damai. Begitulah semestinya Muslim Indonesia, begitulah Muslim Indonesia yang orisinal," kata Kiai Said kepada NU Online, saat ditemui di kediamannya di komplek Pesantren Kempek, Cirebon. Kiai Said menambahkan bahwa aksi damai tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia bisa hidup dalam sistem dan koridor demokrasi, yang memberi ruang untuk menyatakan tuntutan dan berdemonstrasi.

Lebih jauh Kiai Said berpesan agar para pemimpin bisa menjaga lisan, sikap dan tindakan, sehingga hal seperti sekarang tidak

terjadi lagi. "Pemimpin harus menjadi teladan bagi warganya baik dalam ucapan, sikap atau tindakan," kata beliau.

Terkait tuntutan massa aksi terhadap Ahok, Kiai Said, yang sebelumnya mengajak umat Islam Indonesia untuk memaafkan Ahok, meminta semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus ke aparat kepolisian agar diproses secara hukum.

"Pak Ahok memang telah membuat tersinggung banyak orang Islam, tapi apakah sangkaan penistaan Qur'an benar atau tidak kita serahkan ke kepolisian untuk diteliti dan diselidiki lebih jauh. Dan kita semua nanti harus menghormati hasilnya."

Dalam pandangan Kiai Said, semua kekisruhan terkait Ahok ini tak lepas dari politik pilkada. Jika tidak ada pilkada mungkin tidak akan seperti ini. Kiai Said mengingatkan, keinginan menjadi presiden, gubernur, walikota atau bupati tak lain adalah untuk bisa memajukan bangsa dan negara, taraf hidup rakyat, tapi kalau dalam upaya mengejar tujuan itu ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang dipertaruhkan sebaiknya keinginan itu ditimbang lagi. "Kalau saya mundur," kata Ketua Umum PBNU 2015-2020 tersebut. (Savic Ali/)

9. Kapolri Sebut Agenda Khilafah Tunggangi Demo 4 November

Kamis, 03 November 2016 04:00 Nasional
Jakarta, NU Online

Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa demo 4 November 2016 mendatang ditumpangi oleh beberapa kepentingan. Termasuk kelompok yang sudah lama mempunyai agenda mendirikan khilafah.

Hal ini dijelaskan oleh Kapolri karena isu penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berkembang ke arah yang lebih dari sekadar melakukan demo menuntut Ahok. Padahal Kepolisian saat ini sedang memproses kasus Ahok tersebut.

“Kalau saya lihat, demo ini terpicu oleh beberapa hal, pertama kelompok yang memang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Basuki Tjahaja Purnama; kedua, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama; dan ketiga, agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah,” ungkap Kapolri, Rabu (2/11).

Pernyataan tersebut diungkapkan Jenderal Tito ketika menjadi salah satu narasumber di Program Live Mata Najwa di Metro TV bertema Menjaga Kebhinnekaan, Rabu (2/11) malam.

Penjelasan mantan Kepala BNPT tersebut bukan isapan jempol belaka. Karena saat demo pertama pada Jumat, 14 Oktober 2016 lalu, bendera yang menjadi simbol khilafah bahkan bendera ISIS bebas berkibar di tengah kerumunan ribuan pendemo.

Senada dengan Kapolri, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid yang hadir sebagai narasumber di Mata Najwa juga memaparkan bahwa sebagai hak konstitusional, masyarakat berhak melakukan aspirasi lewat demo. Hal itu dipersilakan asal dilakukan dengan tertib, masih dalam koridor hukum, tidak radikal dan tidak anarkis.

“Namun, kita harus mewaspadai dan mengantisipasi karena yang kita khawatirkan adalah penunggangan-penunggang dan penyusupan-penyusupan. Jadi memang ada orang-orang yang dari awal agendanya adalah mengganggu stabilitas negara menggunakan momentum ini,” ujar Putri kedua KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Lebih jauh menurut Yenny, jika memang kepentingan politik juga ada dalam agenda terselubung demo tersebut, jangan membawa-bawa sentimen agama ke dalam politik. Hal ini berlaku untuk siapapun karena kedua entitas tersebut jika dicampuradukkan bisa memunculkan tragedi dan konflik.

“Soal SARA jangan dibawa-bawa ke dalam urusan Pilkada. Kita sudah mengalami banyak konflik yang berujung tragedi, di Ambon, di Poso, dan lain sebagainya gara-gara soal SARA

dipakai untuk urusan politik. Sudah cukup bangsa ini, sudah cukup negara ini mengalami konflik,” tegas Yenny disambut tepuk tangan audiens.

Dalam program Mata Najwa tersebut, hadir pula sebagai narasumber Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ancaman dari Suriah

Sebelumnya, pada Diskusi Publik bertema Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Pligub DKI? pada Selasa, (1/11) di Kantor The Wahid Institute Jakarta, Pengamat Terorisme Sydney Jones mengatakan bahwa gerakan 4 November nanti memang berpotensi ditumpangi kelompok-kelompok garis keras.

Hal ini terbukti dari beredarnya foto kelompok Jaisy Al-Fath di Suriah yang bertuliskan 'Tangkap Ahok atau Peti Mati Ahok' menunjukkan memang gerakan anti Ahok di Indonesia telah ditunggangi oleh kelompok radikal. (Fathoni)

10. Wapres: Ahok Akan Diproses secara Tegas dan Cepat

Jumat, 04 November 2016 18:44 [Nasional](#)

Jakarta, NU Online

Wakil Presidem HM Jusuf Kalla mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat.

"Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa, saudara Ahok akan dilaksanakan proses hukum yang tegas dan cepat," kata Wapres di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wapres usai berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantor Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Di antara beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang ditemui Wapres adalah Ustadz Bachtiar Nashir (Arrahman Quranic Learning), Ustadz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), dan Ustadz Misbah (Front Pembela Islam).

Sedangkan dari pihak pemerintah Kalla didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Kepresidenan RI Johan Budi, Menteri Agama Lukman Saifuddin, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ada juga dari Komisi III DPR, yakni Asrul Sani dan Abu Bakar Al Habsyi.

Unjuk rasa 4 November yang dilakukan sejumlah ormas terkait dengan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. (Antara/Mukafi Niam)

11. Bareskrim Masih Pertajam Beberapa Poin Terkait Pernyataan Ahok

Senin, 07 November 2016 11:47 Nasional

Jakarta, NU Online

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan ada beberapa poin yang harus pihaknya pertajam dan dalami terkait pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Senin (7/11) atas kasus dugaan penistaan agama.

"Jadi, ada beberapa poin yang harus kami pertajamkan dan kami dalami. Apa sih sebenarnya konteksnya dia melakukan ucapan atau pernyataan seperti itu. Itu harus kami pertajam supaya nanti tidak ada salah tafsir," kata Komjen Ari di Mabes Polri Jakarta, Senin.

Sementara itu, terkait 22 orang saksi dalam pengusutan kasus Ahok yang telah diperiksa ia menyatakan bahwa pemeriksaan

itu berkaitan dengan peristiwanya seperti apa dan tentunya orang-orang yang berada di TKP.

"Dari berbagai sudut, ada yang di depan, samping, kanan, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan terhadap videonya secara forensik. Kemudian itu kami putarkan kembali kepada orang-orang yang melihat dan mendengar. Apakah sudah sesuai apa belum," katanya.

Dari keterangan-keterangan tersebut, kata dia, nanti akan kami tanyakan kembali kepada ahli-ahli seperti ahli bahasa dan ahli hukum pidana.

"Kemudian juga masalah agama. Itu yang kami perlu tajamkan. Sehingga apa yang disampaikan nanti terang-benderang. Bisa dilihat bahwa kami melaksanakan penegakan hukum sesuai aturan dan ketentuan yang ada," tuturnya.

Ahok sendiri menyambangi Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin sebagai terlapor atas kasus dugaan penistaan agama.

Berdasarkan pantauan Antara, Ahok yang memakai batik berwarna coklat lengan panjang datang pada pukul 08.15 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B 1330 EDM.

Namun, Ahok tidak memberikan pernyataan sedikit pun kepada awak media hanya melambaikan tangan dan langsung masuk ke dalam Gedung Rupatama Mabes Polri.

Pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya sebagai terlapor.

Hingga saat ini, Polri telah mendengarkan keterangan dari 22 orang saksi dalam pengusutan kasus Ahok.

Di antara 22 saksi tersebut, setidaknya ada 10 orang saksi ahli yang diperiksa berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),

para ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli agama.
(Antara/Mukafi Niam)

12. Hindari Prasangka Buruk, Presiden Perintahkan Gelar Perkara Terbuka Terhadap Ahok

Senin, 07 November 2016 12:26 Nasional

Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan instruksinya agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka, ditujukan untuk menghindari adanya "syak wasangka" atau prasangka buruk.

"Saya kemarin minta untuk dibuka biar tidak ada syak wasangka," kata Presiden Jokowi se usai meninjau kemajuan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, Senin.

Ia menyebutkan dirinya sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk membuka gelar perkara kasus itu.

"Tetapi memang harus dilihat apakah ketentuan hukum, UU membolehkan atau tidak," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka.

"Beliau (Presiden) memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Sabtu malam (5/11).

Tito mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden agar gelar perkara ini dibuka kepada publik.

"Presiden memerintahkan agar gelar perkara dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik," kata Tito.

Ia menambahkan dengan gelar perkara secara terbuka kepada publik dan live, maka publik dapat mengetahui kejernihan kasus itu.

Tito menambahkan, Senin (7/11) polisi secara resmi memanggil terlapor Basuki Tjahaja Purnama.

Kapolri juga menjelaskan tentang langkah yang cepat dan transparan yang dimaksud Presiden.

Langkah-langkah yang cepat ditegaskannya sebagaimana diketahui, sejak pelaporan 6 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2016 yang meliputi 11 laporan Polisi, Polri telah melakukan langkah-langkah meskipun ada aturan dalam tentang penundaan penyidikan kasus yang melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon tetapi proses tetap dilanjutkan.

"Namun saya sudah perintahkan sesuai dengan kewenangan diskresi yang ada pada saya. Saya perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan proses, menggulirkan proses penyelidikan. Ini dalam rangka untuk menangkap aspirasi publik yang berkembang," kata Tito.

Ia menyebutkan Bareskrim Polri sampai Sabtu (5/11) sudah mewawancarai 22 orang, di antaranya tiga saksi pelapor dan Basuki Tjahaja Purnama sendiri yang sedianya akan dipanggil tapi datang dengan kesadaran sendiri untuk memberikan keterangan.

Polisi juga telah meminta keterangan dari para saksi ahli dengan paling tidak 10 saksi ahli yang sudah didengar keterangannya termasuk saksi ahli yang diajukan pihak terlapor. (Antara/Mukafi Niam)

13. Kiai Said: Pernyataan Ahok Menyinggung Umat Islam

Senin, 07 November 2016 16:09 Nasional

Jakarta, NU Online

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berpendapat pernyataan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok menyinggung perasaan umat Islam, bukan menistakan.

“Siapa pun yang menyatakan seperti itu, meskipun Pak Haji, MUI, takmir masjid atau siapa saja, pasti akan menyinggung umat Islam, apalagi oleh orang lain. Tapi soal menista atau tidak kita serahkan kepada pihak kepolisian,” katanya saat menemui Perhimpunan INTI di Gedung PBNU, Senin (7/11).

Pengasuh pesantren Al-Tsaqofah ini menjelaskan, ia tidak mempermasalahkan agama, tapi ucapannya. Kalau hal tersebut dilakukan dengan santun dan bermartabat, tentu akan dihormati.

Pada kesempatan tersebut, Kiai Said juga menyatakan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi antar ulama dan umara (pemerintah). “Jangan sampai silaturahmi dengan ulama hanya pas kondisi genting saja,” tandasnya.

Ia mencontohkan yayasan Budha Suci yang dalam kondisi apapun, tetap saja menjalin silaturahmi dan membantu masyarakat tanpa diminta sehingga keberadaanya diapresiasi.

Banyak sekali hal yang bisa dikerjasamakan antara organisasi keagamaan seperti NU dan pemerintah seperti bidang kesehatan dan pendidikan. “NU selama ini tidak pernah menerima dana dari APBN, tetapi kita jalan terus membina masyarakat. Kalau ada dukungan, ini lebih baik,” tuturnya.

Di hadapan pengurus INTI, Kiai Said menegaskan sikap kebangsaan NU adalah moderat. Diminta atau tidak NU tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila. Dijelaskannya, tantangan kebangsaan ke depan semakin berat karena saat ini ada 4 persen penduduk Indonesia yang setara dengan 10 juta orang, menjadi pendukung ISIS. Data lain yang cukup memprihatinkan adalah

27 persen penduduk Indonesia tidak paham Pancasila. (Mukafi Niam)

14. Kabareskrim Lakukan Pemeriksaan Lebih Detail pada Ahok

Selasa, 08 November 2016 11:45 Nasional

Jakarta, NU Online

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan pemeriksaan kedua terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama pada Senin (7/11) di Mabes Polri lebih detil dari pemeriksaan sebelumnya.

"Kami hanya tanya kegiatan dia apa lebih detil dari yang pertama," kata Komjen Ari seusai menghadiri Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal pemeriksaan kedua Ahok yang lebih detil tersebut dan kesimpulan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sembilan jam itu.

"Tidak bisa disampaikan," kata Komjen Ari.

Sementara itu terkait gelar perkara terbuka yang direncanakan minggu depan, ia mengatakan pihaknya masih merumuskannya.

Soal barang bukti, Komjen Ari mengatakan ada beberapa dokumen yang diperiksa kepolisian termasuk video Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Buni Yani.

"Ada barang buktinya. Ada dokumen, ada kertas, ada video. Video itu justru yang kami periksa forensik," tuturnya.

Ahok sendiri enggan berkomentar terkait pemeriksaan dirinya di Mabes Polri atas kasus dugaan penistaan agama pada Senin (7/11) di Mabes Polri.

"Saya kira sudah jelas semua, kalau mau tahu yang lain tanya ke penyidik saya mau pulang sudah lapar," kata Ahok.

Sementara itu, Ketua Tim Pengacara Ahok, Sirra Prayuna menjelaskan pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan ditambah pemeriksaan terdahulu 18 pertanyaan sehingga jumlahnya 40 pertanyaan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut berjalan dengan lancar.

"Pak Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan," tuturnya.

Sedangkan Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan pihaknya akan menggelar gelar perkara terbuka terhadap Ahok minggu depan.

"Rencananya minggu depan dan kalau minggu ini rencananya akan memeriksa saksi-saksi yang belum kami periksa. Minggu ini ada delapan orang lagi termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa," kata Rikwanto.

Menurutnya, gelar perkara terbuka akan dilakukan setelah pemeriksaan sudah selesai dan bisa dikumpulkan berkas pemeriksaannya.

"Insya Allah minggu depan, namun harinya belum ditentukan untuk gelar perkara itu," ucap Rikwanto. (Antara/Mukafi Niam)

15. Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember Senin, 21 November 2016 17:27 Nasional

NuOnline

Rencana aksi bertajuk Bela Islam III tetap keukeuh akan dilaksanakan pada 2 Desember 2016 mendatang oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Informasi yang berhasil dihimpun NU Online, aksi tersebut rencananya akan dilakukan dalam bentuk gelar sajadah, Shalat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI Jakarta Pusat.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, aksi tersebut sudah tidak ada relevansinya karena Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan dan sudah memasuki tahap akhir penyidikan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mereka selama ini.

Sebab itu menurutnya, aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri berupaya menjatuhkan pemerintah. "Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah," ungkap Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).

"Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok, red) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar," katanya menambahkan.

Melarang aksi 2 Desember

Tito juga menyampaikan bahwa demonstrasi memang diatur dalam Undang-undang (UU), tetapi tidak bersifat absolut jika salah satunya sudah mengganggu ketertiban umum.

"Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu," paparnya.

Disamping itu, lanjut pria kelahiran Palembang ini, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi.

Itu mengganggu ketertiban publik. Oleh karena itu, maka pihaknya akan melarang aksi tersebut.

“Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP,” tegas Tito yang juga menyampaikan, pihaknya bersama Panglima TNI akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menduduki Gedung DPR-MPR.

“Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Kalau bermaksud menguasai DPR, maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah, itu ada pasal makar,” urainya panjang lebar. (Fathoni)

16. Perkara Penodaan Agama, Beri Kesempatan Hakim Wujudkan Keadilan

Kamis, 01 Desember 2016 21:48 Nasional

Jakarta, NU Online

Ketua PBNU Robikin Emhas meminta masyarakat dan seluruh pihak yang ada untuk memberi kesempatan kepada para hakim yang akan menyidangkan perkara kasus penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membuktikan dirinya selaku wakil Tuhan di dalam penegakan hukum di bumi Nusantara.

Robikin menjelaskan, setelah amandemen UUD 1945, Indonesia bukan hanya rechtstaats (negara hukum). Tapi negara hukum yang demokratis (democratiche rechtsstaats) atau negara demokrasi berdasarkan hukum (constitutional democracy).

Diantara prinsip pokok negara hukum adalah equality before the law. Yakni adanya pengakuan dekratif normatif dan perlakuan

empirik bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Ia menjelaskan. secara profesional Polri bergerak cepat. Hanya butuh waktu 14 hari Penyidik merampungkan penyidikan sejak hasil gelar perkara tanggal 15 November 2016 diumumkan ke publik. Persis sesuai janji pemerintah tatkala menerima delegasi demonstran di Istana Negara tanggal 14 Oktober 2016.

Setelah mampir 2 jam di Kejaksaan, hari ini perkara dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Suatu proses yang boleh dibilang cepat sesuai janji pemerintah.

“Kini penuntasan penanganan perkaranya ada di tangan lembaga yudikatif,” ujarnya.

Ditegaskannya, sesuai prinsip independent and imparcial judiciary (peradilan yang bebas dan tidak memihak), hakim yang memeriksa dan mengadili dugaan penodaan agama ini harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

“Itu artinya proses peradilan yang akan berlangsung tidak boleh dipengaruhi, apalagi diintervensi, oleh kepentingan siapa pun dan apapun, baik kepentingan kekuasaan, kapital maupun kekuatan massa,” paparnya.

Kebebasan dan kemandirian hakim tersebut dimaksudkan untuk satu tujuan. Yakni agar hakim dapat menemukan kebenaran dan keadilan hukum. Suatu keadilan berdasar hukum yang berlaku, sesuai derap nafas hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). Red: Mukafi Niam

17. Doa Bersama, Kawasan Seputar Monas Padat

Jumat, 02 Desember 2016 10:10 Nasional

Jakarta, NU Online

Doa bersama yang hari ini, Jum'at (2/12) diselenggarakan dengan titik pusat di Monumen Nasional membuat kawasan tersebut sangat padat. Jl Medan Merdeka Selatan dan Medan

Merdeka Timur dipenuhi massa yang sebagian besar berbaju putih. Jl Merdeka Utara di mana Istana Negara berada sengaja ditutup. Demikian pula Jl Merdeka Barat di mana terdapat kantor Mahkamah Konstitusi, RRI, Museum Nasional, Indosat, dan beberapa kantor kementerian, juga ditutup.

Sejak pukul 06.00 massa sudah mulai mengarah ke Monas. Di Jl Kwitang Raya, yang dekat dengan kawasan perdagangan Senin, sejumlah orang membagi-bagikan roti sebagai sarapan dan air dalam kemasan kepada jamaah yang lewat. Sementara di trotoar Jl Thamrin, terdapat ibu-ibu yang menerima donasi makanan dari jamaah yang lewat yang tampaknya akan dibagikan kepada jamaah yang membutuhkan.

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) sangat padat. Banyak sekali massa yang berjalan kaki ke arah Monas. Kendaraan-kendaraan yang bergerak menuju daerah Gajah Mada dialihkan ke arah Tanah Abang. Tetapi tidak ada massa berhenti di pancuran air HI yang biasanya sangat padat saat akhir pekan di mana ada hari bebas kendaraan bermotor.

Sejumlah mobil dengan sound system sudah siap digunakan untuk berorasi. Salah satu orator di atas mobil yang sudah beraksi di bundaran Bank Indonesia menyampaikan pesan agar jamaah mampu menahan diri, menahan nafsu. Hal yang sama disampaikan oleh orator lain di jalan Thamrin yang mengingatkan agar jamaah mengikuti komando.

Dua orang perempuan berjilbab sempat bertanya kepada NU Online karena kebingungan mencari pintu tenggara, yang merupakan pintu khusus untuk jamaah wanita.

Para jamaah terlihat menikmati suasana pagi yang segar ini. Tak lupa mereka melakukan swafoto. Kebanyakan dengan latar belakang poster yang mereka bawa yang isinya meminta agar Ahok ditahan.

Sejumlah sarana pendukung juga sudah disiapkan seperti mobil ambulan, toilet, mobil tangki air untuk wudhu, dan lainnya.

Pasukan keamanan, baik tentara, polisi sudah siap siaga. Satpol PP juga membantu mengatur massa di beberapa lokasi.

Tak lupa, para pedagang keliling, dengan insting bisnisnya, memanfaatkan situasi ini untuk menggelar dagangannya. Prinsipnya adalah di mana ada gula, di situ ada semut. Pedagang dapat untung, jamaah hilang lapar atau hausnya. Di sisi lain, pertokoan yang dekat dengan area Monas terlihat menutup gerainya. Saat NU Online lewat di Jl Suryopratomo, sempat mendengar pria berpakaian rapi yang memberi penjelasan kepada satpam tentang banyaknya massa. Ia memilih untuk sementara menutup usaha guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (Mukafi Niam)

18. Kapolri Minta Massa Dukung Proses Hukum Ahok

Jumat, 02 Desember 2016 12:01 Nasional

Jakarta, NU Online

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta massa aksi Doa Bersama 2 Desember 2016 mendukung proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama.

"Apa yang kami lakukan sudah maksimal. Saya mohon dukungan dari saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Mari bersama-sama mengawal proses tersebut," kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam aksi doa bersama di kawasan Monas, Jakarta, Jumat.

Kapolri juga meminta massa untuk berdoa bersama agar proses hukum Ahok terus berjalan.

Di tengah-tengah sambutan tersebut, massa aksi doa bersama secara spontan menyerukan "buktikan-buktikan".

Ia juga mengajak seluruh umat Islam yang hadir beribadah dengan bersungguh-sungguh.

"Hari ini kita mari melaksanakan ibadah. Mari niatkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh," katanya dari mimbar yang terletak di Pintu Silang Monas Barat Laut.

Namun sambutan Kapolri harus terhenti beberapa kali karena massa meneriakkan yel-yel. Panitia penyelenggara sampai meminta mereka tenang dan menghormati Kapolri.

Acara Doa Bersama 2 Desember 2016 digelar di Monas mulai Jumat pagi dengan pembacaan dzikir, shalawat, hingga diakhiri shalat Jumat berjamaah.

Sebagian massa sudah mendatangi kawasan Monas pada Kamis (1/12) malam dan Jumat dini hari, sementara Masjid Istiqlal sudah dibanjiri massa sejak Kamis (1/12) malam dari berbagai daerah sebagai tempat berkumpul dan bermalam. (Antara/Mukafi Niam)

19. Greg Fealy Ungkap Kecenderungan Paham Keagamaan karena Pengaruh Medsos

Sabtu, 10 Desember 2016 09:30 Nasional

Jakarta, NU Online

Arus informasi melalui media sosial (medsos) seolah makin tak terbendung. Hal ini terbukti ketika seseorang mendapatkan sebuah informasi, langsung dibagikan tanpa harus dikonfirmasi terlebih dahulu dan dicek kebenarannya, terutama terkait dengan persoalan keagamaan sehingga turut membentuk pemahamannya soal agama.

Kenyataan tersebut muncul dalam kegiatan Tadarus Islam Nusantara yang digelar Pascasarjana STAINU Jakarta, Jumat (9/12) malam yang diisi Associate Profesor Australian National University (ANU) Greg Fealy sebagai narasumber utama.

Fealy yang cukup fasih berbahasa Indonesia ini tidak memungkiri bahwa kenyataan tersebut turut memberikan pemahaman dan gerak keagamaan seseorang seperti yang terjadi dalam fenomena aksi 212.

Greg mengaku telah mengikuti aksi tersebut dengan turun ke lapangan dan mencoba memberikan pertanyaan substansial kepada beberapa peserta aksi.

Menurut penelitian yang dilakukannya itu, substansi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tidak dipahami oleh mereka. Sebab mereka hanya mengetahuinya lewat media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang viral dibagikan oleh sesama teman.

“Sumber utama saat ini adalah Sosmed dan sumber online. Saya sendiri ikut dalam aksi 212. Saya banyak bertanya kepada peserta aksi, bapak dan ibu tahu dari mana bahwa Ahok penista agama? Mereka jawab, dari sosmed dan WA grup. Saya tanya lagi, apakah bapak ibu sudah mengetahui video tentang Ahok? Mereka jawab, ya belum sempat, tetapi yang penting saya tahu dari sumber itu bahwa Ahok penista agama,” ujar Greg Fealy panjang lebar.

Poinnya, penulis buku Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 itu ingin menegaskan, jangan bertindak gegabah terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengetahuan dan informasi yang benar terkait persoalan agama, dan lainnya. Utamanya informasi yang didapat dari sumber media sosial, harus dikonfirmasi terlebih dahulu dan dikroscek kevalidannya sebelum memutuskan bertindak dan ikut menyebarkan.

Selain membahas masalah tersebut, Greg Fealy juga memaparkan beberapa hasil penelitiannya terkait dengan afiliasi masyarakat dengan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Menurutnya, NU masih memegang angka tertinggi terkait afiliasi masyarakat terhadap pandangan keagamaan NU.

Diskusi berlangsung terbuka. Greg meminta para peserta diskusi juga memberikan berbagai pandangannya sehingga menjadi input bagi dirinya. Peserta sebagian besar adalah mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta. Hadir juga alumni dan beberapa mahasiswa Antropologi UI.

Selain Greg Fealy, beberapa narasumber juga memaparkan pandangannya terkait Peta Gerakan Islam Indonesia Kontemporer antara lain, Peneliti Senior The Wahid Institute Ahmad Suaedy, Wakil Ketua LBM PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, dan Direktur Pascasarjana STAINU Jakarta, Mastuki HS. (Fathoni)

20. Ahok Divonis Dua Tahun, PBNU: Hormati Proses Hukum!

Selasa, 09 Mei 2017 12:30 Nasional

Jakarta,

NU

Online

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima vonis dua tahun penjara dari Majelis Hakim setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama. Usai pembacaan putusan Ahok bersama tim penasihat hukum bersepakat untuk mengajukan banding.

Terkait proses hukum tersebut, Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas berkomentar, sebagai negara hukum, siapa pun harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Untuk itu, apa pun putusan hakim, katanya, harus dihormati.

“Sebaliknya, seluruh pihak juga harus memberikan penghormatan yang sama kepada Pak Ahok atas upaya hukum banding yang dilakukan dalam mengekspresikan keberatannya terhadap putusan pengadilan,” katanya dalam siaran pers, Selasa (9/5).

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tak mengeluarkan hujatan atau cibiran terhadap warga negara yang menggunakan hak hukumnya atas suatu proses peradilan. Karena hal itu merupakan pengejawantahan terhadap prinsip kesetaraan di mata hukum sebagaimana dijamin konstitusi.

“Di lain pihak, biarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku *judex facti* menjalankan fungsi judiciary secara bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding

nantinya,”

tambahnya.

Menurutnya, kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri. (Mahbib)

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Fitri
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 7 Mei 1989
Alamat : Simbang RT 9/ RW5,
Bebengan, Boja-Kendal
No. Telepon : 085743602736
Email : chanfitri9@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. S1 – Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang.
2. S2- Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi-UIN Walisongo Semarang

C. KARYA TULIS ILMIAH

1. “Etika Komunikasi Citizen Journalism di Media Internet Perspektif Islam (Analisis Konten Topik Pilihan Demo 4 November pada Blog Kompasiana.com) pada *Jurnal Ilmu Dakwah* 2016
2. “Urgensi Jurnalistik Islam dalam Dakwah di Media Baru” pada *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2017

Semarang, 20 Juli 2018

Fitri